

**MUJIBUR RAHMAN (1920-1975 M) DAN TERBENTUKNYA
NEGARA BANGLADESH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Humaniora
Dalam Bidang Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Oleh:

PUJIATUN PATMASARI
NIM: 11420023

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PALEMBANG**

2016

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Pujiatun Patmasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan Terbentuknya
Negara Bangladesh**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Pujiatun Patmasari
Nim	: 11420023
Jurusan	: Sejarah dan Kebudayaan Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 8 Desember 2015
Dosen Pembimbing I

Dr. Nor Huda, M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Pujiatun Patmasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan Terbentuknya
Negara Bangladesh**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Pujiatun Patmasari
Nim	: 11420023
Jurusan	: Sejarah dan Kebudayaan Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 8 Desember 2015
Dosen Pembimbing II

Otoman, S.S., M. Hum
NIP. 19760516 200710 0 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh Pujiatun Patmasari, NIM: 11420023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada Tanggal 8 Desember 2015

Dosen Pembimbing I

Dr. Nor Huda, M.A.

NIP. 19701114 200003 1 002

Pada tanggal 8 Desember 2015

Dosen Pembimbing II

Otoman, S.S., M. Hum

NIP. 19760516 200710 1 005

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu lembaga Perguruan Tinggi, dan sejauh pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, 8 Desember 2015

Pujiatun Patmasari
NIM: 11420023

MOTTO DAN DEDIKASI

Janganlah melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran

{ Pujiatun Patmasari }

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ♥ Allah SWT, yang selalu memberikan limpahan nikmat, rahmat, dan barokahnya kepadaku yang Insya Allah fiddunya wal akhirot.*
- ♥ Ibuku (Mujianah) & Ayahku (Sujito Hadiwijoyo) tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang tak berujung, berkorban tanpa pamrih, berdo'a tiap sujudnya, bersemangat tanpa putus asa untuk kami anakmu.*
- ♥ Kakakku tercinta Baru Sumardiono, yang selalu memberikan dukungan & motivasi kepadaku.*
- ♥ Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang yang menjadi tempatku dalam menuntut ilmu.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Hal i
NOTA DINAS PEMBIMBING I.	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.	v
PERNYATAAN.....	vi
MOTTO DAN DEDIKASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
KATA PENGANTAR.	x
INTISARI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	9
D. Tinjauan Pustaka.	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.	19
BAB II PROSES TERBENTUKNYA NEGARA BANGLADESH	
A. Sekilas Tentang Sejarah Bengala.....	21
B. Latar Belakang Geografi Bangladesh.	24
C. Politik dalam Negeri Pakistan.....	26
D. Peran Negara Asing.....	36

BAB III	BIOGRAFI MUJIBUR RAHMAN	
	A. Riwayat Hidup Mujibur Rahman.....	41
	B. Aktivitas Ideologi Politik Mujibur Rahman.....	46
	C. Ideologi Politik Mujibur Rhman.	58
BAB IV	PERAN MUJIBUR RAHMAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BANGLADESH	
	A. Kondisi Sosial Politik sebelum Terbentuknya Negara Bangladesh	64
	B. Kondisi Sosial Politik setelah Terbentuknya Negara Bangladesh	70
	C. Kontribusi Politik Mujibur Rahman.....	73
	D. Faktor-faktor Pendorong Lahirnya Negara Bangladesh.....	87
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.	91
	B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna yaitu dengan memberikan akal fikiran serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi dengan judul **“Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan Terbentuknya Negara Bangladesh”**. Skripsi ini di buat untuk dapat memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam. Serta tidak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga nantinya penulis bisa mendapatkan syafa'atnya. Amiin Ya Robbal'alamiin.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari segala cobaan dan rintangan yang membentang dalam perjalanan. Namun semua itu bisa teratasi dan bisa kulalui karena banyak sekali anugrah dari-Nya, do'a, motivasi, dan bimbingan dari orang tua, para dosen, dan para sahabat-sahabatku. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril ataupun materil hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan anugrah dan barokah-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. DR. J Suyuthi Pulungan, MA. Selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Otoman S. S., M. Hum. Selaku Ketua Jurusan SKI.
5. Bapak Dr. Nor Huda selaku pembimbing 1, Bapak Otoman S. S., M. Hum selaku pembimbing II dan Bapak Imron S. Ag., M. A. Dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar dan teliti.
6. Ibu Bety selaku Penguji I dan Bapak Padila selaku Penguji II.
7. Ibu Dra. Sri Suryana selaku dosen Pembimbing Akademik serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Adab dan Humaniora selaku pendidik yang selama ini telah mendidik dan memberikan ilmu serta pengalaman belajar yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku yang senantiasa setia kala suka & duka: Echa cha echa (Eka Susanti Pratiwi), Pratiwi Ahmad (Endang Pratiwi), Astryd Imod (Herniasih Agustria Cahyani), LuuVy (Ahmad Wahyudi), Abang Pikang (Ahmad Rifa'i), Roman Saputra & teman-teman seperjuangan angkatan 2011 khususnya jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam diantaranya adalah Ade Inda Suari, Asri Wulandari, Fazil Hulihan, Heni Yunita, Herni Juwita,

Imanudin, Inda Lestari, Inda Zilarsimakini, Isra Rahmat, Khuswatun Khasanah, Lesta Minarni, Lido Timaro, Meri Andani, Nurul Hikmah dan Okta Novianti. Selain itu, sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, BSA, dan Politik angkatan 2011.

9. Sahabat-sahabatku KKN kelompok 32, diantaranya adalah Nurul Farida, Ega Vansela, Desi Ratnasari, Selvina Jayanti, Irmanila, Khoirul Roziqin, Putra Tryhaldika, dan Saharudin.

10. Sahabat-sahabatku di Kost Pak Burhan, Jl. Moh Ali Lorong Makmur V, Kel. Sekip Jaya, Kec. Ilir Timur I Rt. 21 Rw. 07 No. 87 yaitu Ayuk Idot (Kholidawaty), Bobo (Ghea Rosdiana Tirta), Cimoet (Gayatri), Mega Hartati, Husna, Maya, Nanda, Elis, Bariyah, Rani dan Weni.

Palembang, 8 Desember 2015

Penulis

Pujiatun Patmasari
NIM: 11420023

INTISARI

Kajian Sejarah Islam
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi, 2015

Pujiatun Patmasari, “Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan Terbentuknya Negara Bangladesh”

xiv + 93 halaman + lampiran

Penelitian ini mendeskripsikan rangkaian sejarah perjuangan masyarakat Muslim di Pakistan terkhusus Pakistan Timur (sekarang Bangladesh). Hal ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang jenisnya termasuk kajian pustaka (*libraryreseach*) dengan cara pendekatan sosio-politik. Kerangka pikir dari permasalahan disebabkan adanya kenyataan sosial-politik yang perlu penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana proses terbentuknya negara Bangladesh? *Kedua*, bagaimana biografi Mujibur Rahman? *Ketiga*, bagaimana peran Mujibur Rahman dalam pembentukan negara Bangladesh?.

Sementara itu, penulis menggunakan teori sebagai ketentuan pada kegiatan penelitian. *Pertama*, teori dua bangsa (*the two nation theory*) yang menjelaskan bahwa komunitas Hindu dan Muslim merupakan dua bangsa yang terpisah. *Kedua*, teori peran (*role*) merupakan kedudukan Mujibur Rahman sebagai Presiden pertama di Bangladesh. *Ketiga*, teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, yakni Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang memiliki permasalahan. *Keempat*, teori konflik menurut Max Weber menjelaskan bahwa konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Dalam kegiatan penelitian, penulis menggunakan metode sejarah melalui tahapan-tahapan yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Adapun hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa proses terbentuknya negara Bangladesh didukung oleh berbagai macam faktor, hal ini terbagi dua penyebab yaitu penyebab tidak langsung dan langsung. Penyebab tidak langsung adalah campuran dari rasa ketidakpuasan dan kekecewaan orang-orang Bengali terhadap dominasi orang-orang Pakistan Barat dalam bidang politik, administrasi/pemerintahan, ekonomi dan bahkan sosial-budaya. Sedangkan penyebab langsungnya adalah ketika Pemilihan Umum 1970 M yang dimenangkan oleh Partai Liga Awami atas pimpinan Mujibur Rahman. Akhirnya pada tanggal 26 Maret 1971 M dinyatakan sebagai Hari Kemerdekaan Negara Bangladesh.

Kata kunci: Mujibur Rahman - Ideologi politik - Sejarah terbentuknya negara Bangladesh

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Sheikh Mujibur Rahman, Presiden pertama Bangladesh (Pakistan Timur).	41
Gambar 2: Sheikh Mujibur Rahman dan Fazilatunnesa	44
Gambar 3: Sheikh Mujibur Rahman dan Shaheed Suhrawardy.....	47
Gambar 4: Universitas Calcutta Islamia College adalah tempat kuliah SheikhMujibur Rahman	48
Gambar 5: Sheikh Mujibur Rahman ketika menjadi pemimpin politik pada 1949	49
Gambar 6: Peristiwa aksi <i>All-Party State Language</i>	50
Gambar 7: Sheikh Mujibur Rahman berdiskusi dengan Sher-E A.K Fazlul Haque	51
Gambar 8: Pertemuan United Front	52
Gambar 9: Pidato Sheikh Mujibur Rahman atas permtaan 6-point	54
Gambar 10: Sheikh Mujibur Rahman di tangkap atas kasus <i>Argatala Conspiracy</i>	55
Gambar 11: Pertemuan setelah kemenangan Pemilihan Umum pada 1970	57
Gambar 12: Pidato Sheikh Mujibur Rahman atas Kemerdekaan Bangladesh.....	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tulisan Teuku May Rudy, digambarkan bahwa “Anak Benua India”, sebelum terpecah menjadi India, Pakistan dan Bangladesh adalah sebuah wilayah yang saat ini terletak di kawasan Asia Selatan, yang mencakup luas kira-kira 2.075 mil dari utara ke selatan dan 2.120 mil dari timur ke barat. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan dengan wilayah Tibet (Cina) dan Afghanistan, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan laut (Samudera Indonesia), di sebelah timur berbatasan dengan Burma, dan di sebelah barat berbatasan dengan Persia (Iran).¹

Di kawasan India sendiri terdiri dari tiga bagian, yakni India bagian Utara terbentang tiga pegunungan: Hindu Kush, Karakorum dan Himalaya, sebelah Timur membentang pegunungan Sulaiman dan Kirthar, sementara di sebelah Selatan dikelilingi oleh lautan Arab, Samudera India dan teluk Benggala. Luas wilayahnya sebesar 360.000 mil persegi, pada posisi 61° sampai 96° BT, dan antara 8° sampai 37° LU.² Nama India ini terambil dari nama sungai Sindhu, satu diantara sungai-sungai besar di anak Benua India, yang sekarang ini pemerintah di sana berusaha hendak mengembalikannya kepada namanya yang asli, yaitu *Bharat*. Maka disebut juga

¹Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 300-305.

²B. Mudisi, *India Sejarah Ringkas: dari Prasejarah sampai Terbentuknya Bangladesh*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012), h. 1.

dengan nama *Sind*. Sind juga menjadi nama daerah tempat kedudukan pusat negara Pakistan sekarang ini yaitu *Karachi*.³

Bagian dari anak Benua India yang pertama digabungkan ke dalam Dunia Muslim adalah Sind (sekarang di Pakistan). Selain itu, di negara lain yaitu Bengal yang merupakan bagian dari Kesultanan Delhi. Inggris yang datang mula-mula sebagai pedagang, kemudian mulai melakukan penaklukan anak Benua itu di abad XVIII dengan awal penaklukan ke daerah-daerah pantai. Selanjutnya, Inggris memperluas kekuasaannya melalui Bengal ke Oudh, India Tengah, dan Rajputana. Kaisar Mughal Bahadur Shah menjadi tawanan Inggris. Ia diturunkan tahtanya oleh Inggris dan secara resmi dinyatakan sebagai bagian dari Kolonial Kerajaan Inggris. Pada 1906 M, Liga Muslim dibentuk untuk membalas serbuan Inggris yang bertujuan untuk mendapatkan hak-hak politik Muslim dan memelihara komunitas Muslim dari dominasi Hindu dan penganiayaan Inggris. Liga Muslim bekerja sama dengan Kongres India yang didominasi Hindu untuk mengusahakan kemerdekaan India. Ide suatu negara Muslim terpisah diajukan oleh penyair besar Muslim Muhammad Iqbal, dan Liga Muslim menyetujui tujuan pokok politik Muslim anak Benua itu untuk mencapai negara muslim terpisah.⁴

Kongres maupun Liga Muslim menerima deklarasi pada Juli 1947 M, parlemen Inggris mengesahkan UU Kemerdekaan (*The India Independence Bill*). UU tersebut terlaksana pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1947 M. Hal itu, secara resmi,

³Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Pustaka Nasional PTELTD Singapore, 1994), h. 482.

⁴M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 158-161.

anak Benua India dibelah menjadi dua dominion,⁵ yakni India dan Pakistan sebagai bagian dari persemaikmuran (*Commonwealth*) Inggris.⁶

Berdirinya Pakistan merupakan sebuah negara yang muncul di atas peta dunia. Louis Mountbatten, Raja Muda Inggris di India, menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Liga Muslim Muhammad Ali Jinnah,⁷ sebagai presiden pertama negara Muslim yang baru didirikan, Pakistan.⁸ Ide Pakistan dalam visi sebuah negara Islam berdaulat di India merupakan ingatan akan kejayaan pemerintahan Islam di India (berarti masa suram pada masyarakat Hindu). Salah satu faktor yang mengantarkan Muhammad Ali Jinnah pada suksesnya melahirkan sebuah negara Pakistan yaitu antara lain Kongres dan pemerintah Inggris. Dalam menghadapi Kongres, Inggris mengambil sikap lunak pada Liga Muslimin. Separatisme Muslim digunakan untuk menghentikan serangan kaum nasionalis. Ketegangan antara Kongres dan pemerintah Inggris sangat membantu Liga Muslim untuk menjamin pada saat-saat yang genting lewat dukungan kaum politisi dan pegawai sipil, dan memastikan milik eksekutif Liga Muslim pada saat Kongres itu dilarang.⁹

⁵Dominion adalah negara yang merdeka dan berpemerintahan sendiri, tetapi menjadi anggota persemaikmuran negara besar. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 211.

⁶Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 138.

⁷Muhammad Ali Jinnah (1876-1948 M), ia dilahirkan di Karachi pada tanggal 25 Desember 1876 M. Ali Jinnah merupakan kepala negara pertama di negara Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947 M dengan gelar “qaid-i azm” (pemimpin besar). Lihat Susmihara, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 345-346.

⁸M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, h. 161.

⁹B. Mudisi, *India Sejarah Ringkas: dari Prasejarah sampai Terbentuknya Bangladesh*, h. 169-169.

Sementara itu, India merupakan sebuah negara yang sekuler, walaupun mayoritas beragama Hindu, tetapi tidak berdasarkan agama Hindu. Pakistan dibangun atas dasar aspirasi keagamaan, yaitu untuk menyediakan tempat tinggal bagi Muslim di anak Benua India yang dasarnya betul-betul Islam. Agama dengan demikian telah melahirkan antusiasme yang sangat berlebihan yang membawa munculnya Pakistan. Walaupun banyak bahasa dan budaya di Pakistan, tetapi Muslim Pakistan mempunyai ajaran yang sama untuk mempersatukan mereka dalam aksi yang sama, Kemerdekaan Pakistan.¹⁰

Kemerdekaan Pakistan telah menyebabkan berpisahnya dua wilayah yang mayoritas Islam yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Karena basis pemisahan (partisi) itu adalah pertimbangan wilayah mayoritas Hindu dan wilayah mayoritas Muslim, maka Pakistan secara *teritorial* (suatu negara) menjadi dua belahan Barat India termasuk setengah Punjab, sedangkan Pakistan Timur meliputi negara bagian Bengali dalam provinsi di British India.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, Bangladesh adalah negara yang lahir pada 26 Maret 1971 M, dengan cara melepaskan diri dari Pakistan. Bangladesh sebelumnya bernama Provinsi Pakistan Timur, yang memiliki saudara yaitu Provinsi Pakistan Barat, keduanya menjadi bagian dari negara Islam Pakistan. Sebagaimana diketahui, kemerdekaan Pakistan merupakan wadah bagi aspirasi dan kepentingan

¹⁰David Loshak, *Pakistan Crisis* (London: Heinemann, 1971), h. 41.

¹¹Idzam Fautanu, *Konsep Negara Islam Muhammad Assad: Studi Atas Pemikiran dan Kontribusinya Terhadap Pakistan*, h. 157.

komunitas Muslim di anak Benua India. Sebaliknya, aspirasi dan kepentingan komunitas Hindu tertampung dalam negara India yang merdeka.

Kajian mengenai lahirnya Bangladesh sedikit banyak dapat dikomparasikan dengan negara kita Indonesia. Artinya ada pelajaran yang bisa ditarik dari sana. Yakni bagaimana mempertahankan keutuhan bangunan suatu bangsa yang penduduknya beraneka ragam dan majemuk. Kurangnya saling pengertian dan pemahaman akan merusak keutuhan tersebut, yang pada gilirannya menimbulkan kekecewaan atau ketidakpuasan dan pada akhirnya pemisahan diri.¹² Bangladesh merupakan negara yang terletak di sebelah timur negara Pakistan dan India. Negara Bangladesh ini berbentuk republik dengan nama Republik Rakyat Bangladesh, dan ibukotanya adalah Dacca.¹³

Sebagai negara merdeka, Bangladesh ini dideklarasikan oleh Sheikh Mujibur Rahman. Ia merupakan bapak bangsa dan presiden pertama Republik Rakyat Bangladesh. Munculnya Bangladesh sebagai negara merdeka di Asia Selatan memiliki akar historis dengan negara induknya yaitu Pakistan. Saat Pakistan masih tersegmentasi ke dalam Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang secara geografis dipisah oleh India, Bangladesh hanyalah salah satu provinsi dari Pakistan yang bernama Bengal.

Pendirian Bangladesh tersebut didorong oleh realitas bahwa pada saat Bangladesh masih jadi salah satu provinsi dari Pakistan, di wilayah Pakistan Timur

¹²Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 186-187.

¹³Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, *Islam di Asia Selatan*, (Bandung: Humaniora, 2006), h. 289.

terdapat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi. Secara umum, wilayah Pakistan Timur lebih banyak tertinggal dibandingkan daerah Pakistan Barat. Pendirian negara Bangladesh pun didorong oleh realitas bahwa partisipasi politik masyarakat Bengal selama berlangsung dengan Pakistan, dalam pemerintahan kurang sekali, karena elit pemerintahan didominasi elit-Punjab.

Bangladesh berdiri sebagai negara merdeka tidak bisa terlepas dari dukungan India saat terjadi konflik antara Pakistan dan India. India merasa keberatan atas penetapan Pakistan yang tumbuh dan berkembang sebagai negara Islam, serta munculnya pengistimewaan terhadap kelompok keagamaan tertentu, sedangkan di Bengal terdapat minoritas Hindu. Dengan keadaan ini, masyarakat Bengal merasa terdorong untuk memisahkan diri dari Pakistan. Selanjutnya mereka mendirikan negara sendiri yang bernama Bangladesh yang mengedepankan identitas nasional masyarakat Bangladesh.¹⁴

Faktor-faktor pendorong lahirnya negara Bangladesh, seperti telah disinggung dalam awal pembahasan bahwasanya lahirnya negara Bangladesh didorong oleh berbagai macam faktor, antara lain dalam bidang politik, administrasi, sosial-budaya, ekonomi dan jarak yang terlampau jauh antara Provinsi Pakistan Timur dengan pemerintah pusat di Pakistan Barat. Faktor-faktor ini dapat dimasukkan ke dalam penyebab tidak langsung. Sementara itu, penyebab langsungnya lebih bersifat politik dan militer (perang sipil).¹⁵

¹⁴*Ibid.*, h. 290-291.

¹⁵Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 191-192.

Dengan demikian, di kawasan anak Benua India, kini telah berdiri tiga negara, yakni: India, Pakistan, dan Bangladesh. Tiga negara ini merupakan kawasan tunggal, baik secara geografis maupun kultural karena penduduk dari ketiga negara itu saling berkaitan, dilihat dari aspek rasial, linguistik, religi, sosial dan budaya. Penelitian ini berusaha menganalisis tentang berdirinya Negara Bangladesh tersebut. Penelitian ini adalah peran yang dinamakan ahli tokoh pendiri Bangladesh, Mujibur Rahman. Dia merupakan tokoh sentral dari gagasan pendirian negara Bangladesh yang terpisah dengan negara induknya, Pakistan.

Alasan akademis akan keterkaitan penulis untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan Terbentuknya Negara Bangladesh”, dapat dijelaskan sebagai berikut. Seperti telah disinggung pada awal pembahasan mengenai Mujibur Rahman bahwa dia merupakan bapak negara yang mendeklarasikan Bangladesh. Selain itu, ia menjabat sebagai Presiden pertama Bangladesh dan kemudian menjadi Perdana Menterinya Bangladesh, yakni dimulai pada tahun 1971-1975 M. Dalam rentang waktu inilah Mujibur Rahman berperan penting dalam pembentukan negara Bangladesh, dimana belum banyak yang mengetahui akan hal tersebut. Mujibur Rahman dalam kepemimpinannya bersifat karismatik terhadap masyarakat Bengal.

Alasan lainnya adalah bahwa sepanjang pengetahuan penulis, jarang ditemukan penelitian-penelitian tentang Islam di Bangladesh. Bahkan, tulisan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi belum banyak dan belum ada di Palembang.

Padahal, secara historis, Islam di Bangladesh berkembang dan memiliki tempat tersendiri di kalangan orang-orang Bengal.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses terbentuknya negara Bangladesh?
- 2) Bagaimana biografi Mujibur Rahman?
- 3) Bagaimana peran Mujibur Rahman dalam pembentukan negara Bangladesh?

Penelitian mengenai Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan terbentuknya negara Bangladesh ini penulis merasa perlu untuk memberi batasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang pembatasan di satu segi dan perumusan segi lainnya. Penelitian ini menjelaskan tentang Mujibur Rahman (1920-1975 M). Alasannya, pada tahun tersebut merupakan biografi dari Mujibur Rahman yang memiliki antusiasme dalam pembentukan negara Bangladesh. Selain itu, pada tahun 1971 M diambil sebagai tahun berdirinya negara Bangladesh dan menjadi masa periode awal kepemimpinan Mujibur Rahman. Sementara itu, pada tahun 1975 M diambil sebagai batas akhir periode penulisan ini karena pada tahun tersebut menunjukkan bahwa masa kepemimpinan Mujibur Rahman telah berakhir, yakni ditandai meninggalnya Mujibur Rahman.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa rumusan dan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. *Pertama*, untuk menjelaskan proses terbentuknya negara Bangladesh. *Kedua*, untuk mengetahui biografi Mujibur Rahman. *Ketiga*, untuk menjelaskan peran Mujibur Rahman dalam pembentukan negara Bangladesh.

Ada dua kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut: *Pertama*, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada kalangan akademis maupun masyarakat umum mengenai Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan terbentuknya negara Bangladesh, dimulai dari terpecahnya negara Pakistan. Pakistan tersendiri terbagi dua bagian yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Kedua bagian tersebut merupakan bangsa yang terpisah. Ternyata antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur memiliki fenomena permasalahan di dalam bidang politik, sehingga masyarakat muslim Bengali memiliki cita-cita dan kesadaran untuk menciptakan sebuah negara yakni Bangladesh.

Kedua, penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya mahasiswa jurusan sejarah dan kebudayaan Islam untuk mengembangkan peneliti tentang masalah yang sama. Dari hasil penelitian yang akan ditempuh ini, diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmiah di bidang sejarah sosial-politik.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis melakukan apa yang disebut dengan tinjauan pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Adapun buku yang penulis jadikan tinjauan pustaka yaitu buku: *India Sejarah Ringkas: Dari Prasejarah sampai Terbentuknya Bangladesh*, karya B. Musidi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012). Buku ini menjelaskan tentang terbentuknya Bangladesh, yang menguraikan kondisi politik dalam negeri Pakistan dan peranan negara-negara besar. Inggris merebut India lewat usaha yang tidak mengenal lelah dan pengorbanan yang sangat besar. Secara taktis Inggris menyingkirkan bangsa Eropa, (Portugis, Perancis dan Belanda). Langkah berikutnya adalah merebut tempat-tempat strategis (Bombay, Madras, dan Calcutta) dengan melancarkan politik belah bambu dan militer. Langkah terakhir adalah melenyapkan penguasa Mughal pada tahun 1859 M. Sejak itu Inggris menjadi penguasa di kawasan Asia Selatan. Salah satu imperium Inggris ini pada tanggal 14 Agustus 1947 M memperoleh kemerdekaannya dan mengambil nama Pakistan (yang terdiri dari Pakistan Barat dan Pakistan Timur). Sementara itu, India memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1947 M.¹⁶

Buku lainnya adalah *Islam di Asia Selatan*, karya Ajid Thohir dan Ading Kusdiana (Bandung: Humaniora, 2006). Buku ini memberikan informasi tentang Islam di Bangladesh, yang menguraikan tentang batas-batas potensi wilayah dan etnografi, serta membahas sejarah dan fenomena sosial agama. Salah satu wilayah yang sangat

¹⁶B. Musidi, *India Sejarah Ringkas: Dari Prasejarah sampai Terbentuknya Bangladesh*, h. vi

menarik untuk dikaji adalah anak Benua India, Pakistan, dan Bangladesh. Secara sosio-ekonomi yang tergolong masih miskin kecuali India (mungkin yang sudah mulai maju). Kultur dalamnya pun sangat kekhasan itu terjadi karena aspek-aspek geografis, historis, bahasa dan perkembangan sosial-politik.¹⁷

Kemudian, ada buku yang berjudul *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, Suwarno. Yogyakarta: Ombak, 2012. Buku ini mengupas latar belakang geografi Bangladesh, menguraikan sejarah Bengala, dan faktor-faktor pendorong lahirnya Bangladesh. Kebudayaan India purba, kebudayaan India masa Weda, kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha baik di India bagian Utara maupun di India bagian Selatan, masuk dan berkembangnya agama Islam, serta kerajaan-kerajaan Islam baik Kesultanan Delhi maupun Kesultanan Mughal. Selanjutnya, ditambah pembahasan tentang Peran Muhammad Iqbal dalam memperjuangkan Kemerdekaan Pakistan, Akar Konflik India dan Pakistan soal Kashmir, dan lahirnya Negara Bangladesh 1971 M.¹⁸

Dari tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada penulis yang membahas tentang Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan terbentuknya negara Bangladsh. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut peran Mujibur Rahman dalam pendirian negara Bangladesh.

¹⁷Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, *Islam di Asia Selatan*, h. xiii.

¹⁸Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. x.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ini penulis jadikan sebagai suatu batasan yang bersifat praktis dan sebagai ketentuan yang menjadi tolak ukur dalam mempelajari dan memahami sejarah tentang berdirinya sebuah negara dalam penulisan ini maka dibutuhkan teori-teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Dalam sidang tahunan Liga Muslim pada Maret 1940 di Lahore, dihasilkan sebuah resolusi yang menuntut berdirinya Negara Islam Pakistan di wilayah India Barat laut (meliputi Provinsi Punjab, North West Frontier, Sind dan Baluchistan) dan India Timur laut (Provinsi Benggala dan Assam). Untuk mendukung tuntutan berdirinya Negara Islam Pakistan, sebagaimana telah diungkapkan oleh Muhammad Ali Jinnah menyusun teori yang disebut dengan “Teori Dua Bangsa” (*the two nation theory*). Isi pokok teori ini menjelaskan bahwa komunitas Hindu dan Muslim merupakan dua bangsa yang terpisah. Komunitas Muslim merupakan satu bangsa dengan filsafat keagamaan, tradisi dan literatur yang berbeda dibandingkan komunitas Hindu. Demikian pula kedua komunitas itu tidak saling campur dan sumber inspirasinya berasal dari sejarah yang berlainan. Maka sudah sepantasnya bila komunitas Muslim memiliki *homeland* (tanah tempat tinggal/tanah air) sendiri.¹⁹

Berdirinya negara Bangladesh dikarenakan adanya seseorang dalam suatu kelompok sosial, yakni adanya peran Mujibur Rahman dalam perjuangan ke arah kemerdekaan negara Bangladesh (Pakistan Timur). Menurut Soerjono Soekanto (1990) dalam *Sosiologi Suatu Pengantar*, menyatakan bahwa teori peranan (*role*)

¹⁹Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 168.

merupakan aspek dinamis kedudukan.²⁰ Biasanya peranan sosial seseorang diatur oleh norma-norma sosial yang ada, oleh sebab itu norma-norma sosial sangat menentukan kedudukan seseorang dalam kelompok.²¹

Pendirian negara Bangladesh didorong oleh realitas bahwa partisipasi politik masyarakat Bengal selama bergabung dengan Pakistan dalam pemerintahan yang dirasa kurang, karena elit pemerintahan didominasi elit-Punjab. Karena itu, penelitian ini juga menggunakan teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, yakni: a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan politik, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya.²²

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori konflik dalam hal gagasan dan cita-cita, sebagai mana yang ditekankan oleh Max Weber. Weber berpendapat, orang sering tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia mereka, baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial, ataupun konsepsi tentang bentuk gaya hidup kultural yang terbaik. Lebih dari itu, gagasan dan cita-cita tersebut

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 243-244.

²¹Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 435.

²²Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005), h. 30.

bukan saja hanya dipertentangkan, melainkan dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan lainnya, misalnya pertentangan politik. Jadi, orang dapat berkelahi untuk memperoleh kekuasaan dan pada saat yang sama berusaha saling meyakinkan satu sama lain bahwa bukan kekuasaan itu yang mereka tuju, melainkan kemenangan prinsip-prinsip yang secara etis dan filosofis yang benar. Jadi, Weber berpendapat bahwa gagasan bukan semata-mata hasil dari kondisi-kondisi material yang ada, melainkan keduanya memiliki signifikansi kausalnya sendiri-sendiri. Teori konflik melihat kapan dan bagaimana mereka menciptakan solidaritas, kapan mereka mendominasi dengan cara memberikan undang-undang dan kapan semua proses itu disusun hingga melahirkan suatu perlawanan.²³

Jika dikaitkan teori konflik Max Weber dengan pembentukan negara Bangladesh adalah hal gagasan dan cita-cita. Ide yang dimaksud yaitu ide atas kemerdekaan yang didorong oleh seorang tokoh Muslim untuk membentuk pemerintahan sendiri yang didukung atas kesadaran masyarakat Muslim sehingga cita-cita tersebut berhasil.

Dari uraian teori di atas, penulis menggunakan teori sebagai ketentuan dan menjadi tolak ukur dalam suatu kegiatan penelitian. *Pertama*, penulis menggunakan teori dua bangsa (*the two nation theory*) yang menjelaskan bahwa komunitas Hindu dan Muslim merupakan dua bangsa yang terpisah. *Kedua*, teori peran (*role*) merupakan kedudukan Mujibur Rahman sebagai Presiden pertama di Bangladesh.

²³LB Wirawan, *Teori-Teori Sosial: Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71.

Ketiga, teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, yakni Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang memiliki permasalahan. *Keempat*, teori konflik menurut Max Weber menjelaskan bahwa konflik dalam hal gagasan dan cita-cita.

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang memiliki dua kata depan yakni *meta* (menuju, melalui, mengikuti, sesudah) dan kata benda *hodos* (jalan, perjalanan, cara, arah). Sementara itu, kata *methodos* sendiri berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis, ilmiah, uraian ilmiah. Jadi, metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat yang praktis.²⁴ Penelitian ini merupakan sebuah kajian sejarah. Ilmu-ilmu alam menjadikan alam sebagai objeknya, sedangkan ilmu-ilmu sosial menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian, maka sejarah juga mempunyai objek sendiri, yaitu manusia dalam waktu.²⁵

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada peran Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan terbentuknya negara Bangladesh yang mana penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang jenisnya termasuk kajian pustaka (*libraryresearch*) yakni mengkaji dan meneliti literatur-literatur yang mengemukakan tentang masalah

²⁴Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 90.

²⁵Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 19.

Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan terbentuknya negara Bangladesh, baik itu sumber primer maupun sekunder.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan sosio-politik. Bila pendekatan ini dipergunakan untuk membuka kembali karya-karya sejarah konvensional, maka dapat dikatakan bahwa sejarah adalah identik dengan politik. Alasannya, karena melalui karya-karya seperti itu lebih banyak diperoleh pengetahuan tentang jalannya sejarah yang ditentukan oleh kejadian politik, perang, diplomasi, dan tindakan tokoh-tokoh politik.²⁶

Penelitian ini mengikuti prosedur dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penulisan sejarah, yang tersusun dalam empat tahap yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.²⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Heuristik

Heuristik (Pengumpulan sumber) adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu “*heuriskein*” yang berarti menemukan. Jadi heuristik adalah kemampuan menemukan dan menghimpun sumber-sumber yang di perlukan dalam penulisan sejarah.²⁸ Sumber primer di dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Informasi primer ini biasanya dikenal dengan ilmu pengetahuan tentang peristiwa

²⁶Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2001), h. 25.

²⁷*Ibid.*,h. 104.

²⁸Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, h. 147.

dari tangan pertama atau langsung dibuat (waktunya sama) dengan ketika peristiwa itu terjadi.²⁹

Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber primer yang diperoleh dari pencarian dokumen-dokumen dan catatan-rekaman (*record*) yang langsung melibatkan saksi mata. Sumber-sumber yang termasuk sumber tertulis berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan langsung dengan penelitian diperoleh dari website dalam format pdf. Dalam mewujudkan langkah ini, maka penulis mengkaji karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad M. Rahman Jalal berjudul “*The Sheikh Mujib Declaration of Independence of Bangladesh: U.S. Government Records and Media Documentation*”.³⁰ Sedangkan sumber tidak tertulis adalah hasil catatan-rekaman (*record*) yang memuat informasi tentang kenyataan masa lalu (*past actuality*). Informasi adalah tujuan utama catatan. Karena informasi dapat dimuat dalam berbagai cara, maka catatan bisa dibedakan atas gambar, lisan, dan tulisan.³¹

Setelah pengumpulan sumber primer, penulis juga mengumpulkan sumber data sekunder, dimana sumber data sekunder adalah data penunjang, yaitu data pendukung seperti, jurnal ilmiah, artikel-artikel, disertasi, tesis, skripsi, buku-buku dan internet. Sumber data sekunder inilah yang digunakan oleh penulis untuk data penunjang dan pelengkap dalam penelitian ini.

²⁹Abdurahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 44.

³⁰Muhammad, M. Rahman Jalal, *The Sheikh Mujib Declaration of Independence of Bangladesh: U.S. Government Records and Media Documentation*, (Los Angeles: Latimes, 1971), h. 2.

³¹Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, h. 156.

b. Kritik Sumber

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah selanjutnya ia harus menyaringnya secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta dan yang menjadi pilihannya. Langkah-langkah inilah yang disebut kritik sumber, baik terhadap bahan materi (eksternal) sumber maupun terhadap substansi (isi) sumber.³²

Pada tahap ini peneliti melakukan dua kritik sumber yakni kritik sumber eksternal dan kritik sumber internal. Kedua kritik ini digunakan peneliti untuk memverifikasi mengenai keaslian dan keabsahan sumber-sumber yang telah didapatkan dari buku-buku, atau di peroleh dari pencarian dokumen-dokumen dan catatan-rekaman yang didapat melalui website dalam bentuk format pdf tersebut.

c. Interpretasi

Penafsiran atau interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas pada masa lampau. Fungsi interpretasi senantiasa terlibat dalam banyak proses, seleksi, organisasi, dan fakta. Sementara itu, proses interpretasi merupakan proses kerja yang melibatkan berbagai aktivitas mental seperti seleksi, analisis, komparasi, serta kombinasi dan sintesis. Interpretasi bisa disebut juga proses analisis-sintesis adalah kegiatan analisis-sintesis telah berlangsung sejak kritik sumber, yakni kritik eksternal dan kritik internal.³³

³²Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 103.

³³Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 83-87.

Pada tahap ketiga ini setelah data terkumpul dan diseleksi, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data tersebut dan menghubungkan masing-masing catatan tersebut menurut isinya, kemudian diberi penafsiran untuk merekonstruksi peristiwa sejarah sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

d. Historiografi

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.³⁴ Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan). Pada tahap ini merupakan hasil penafsiran peneliti dari sumber-sumber yang telah di kumpulkan dan telah melalui tahapan kritik sumber (ekternal dan internal).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penguraian masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dikemas dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁴Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, h. 116-117.

BAB II : Membahas tentang proses terbentuknya negara Bangladesh yang menjelaskan sekilas tentang sejarah Bengala, latar belakang geografis Bangladesh, politik dalam negeri Pakistan dan peran negara-negara Asing.

BAB III : Membahas tentang biografi politik Mujibur Rahman yang menjelaskan, latar belakang keluarga dan pendidikan Mujibur Rahman, dan aktivitas politik Mujibur Rahman dan ideologi politik Mujibur Rahman.

BAB IV : Membahas tentang peran Mujibur Rahman dalam pembentukan negara Bangladesh yang menjelaskan, kondisi sosial politik sebelum terbentuknya negara Bangladesh, kondisi sosial politik setelah terbentuknya negara Bangladesh, kontribusi politik Mujibur Rahman dan faktor-faktor pendorong lahirnya negara Bangladesh.

BAB V : Merupakan penutup yang akan mengemukakan simpulan dan saran sebagai akhir dari seluruh penelitian ini.

BAB II

PROSES TERBENTUKNYA NEGARA BANGLADESH

A. Sekilas Tentang Sejarah Bengala

Sejarah awal Bengala cukup gelap. Umumnya dipercaya bahwa sekitar 1000 SM suku Bang (termasuk rumpun Dravida) mulai menghuni wilayah Bengala, karena terdesak dari Lembah Gangga oleh suku bangsa Arya. Dalam masa dinasti Maurya dan Gupta, Bengala menjadi bagian dari Kerajaan Magadha. Eksistensi Bengala sebagai kerajaan Hindu independen tercapai dalam abad VIII, ketika Gopala mendirikan Dinasti Pala.³⁵ Di bawah Dinasti Pala yang memerintah selama kira-kira dua abad, Bengala menikmati kemakmuran yang tiada tara dan dianggap sebagai periode klasik sejarah Bengala. Kesenian berkembang dan budaya Bengala terbentuk, terutama berpusat di dua universitas, yaitu Uddandapura dan Vikramasila. Salah seorang Raja Dinasti Palayang terbesar adalah Dharmapala (752-794 M). Selama pemerintahan Dharmapala, Bengala menjadi negeri paling terkemuka di kawasan India Utara dan dia membangun kembali kebesaran kota kuno Pataliputra.³⁶

Pada waktu kekuatan Islam berkuasa di India bagian utara, Bengala berada di bawah pemerintahan Muslim.³⁷ Sultan Balban (1266-1287 M) dari wangsa Budak

³⁵Dinasti Pala yang beragama Buddha menguasai wilayah ini selama empat ratus tahun sebelum selanjutnya digantikan oleh Dinasti Sena yang beragama Hindu. Islam masuk ke Benggala pada abad ke-12 melalui pedagang Arab. Misionaris Sufi dan penaklukan Muslim membantu penyebaran agama Islam di wilayah ini. Sobaryanto, *Sejarah Bangladesh dan Sejarah Benggala*. Diakses pada tanggal 25 Mei 2015 dari <http://www.kaskus.co.id/thread/52ddb6c19cb17c3328b471c/sejarah-bangladesh-dan-sejarah-benggala>.

³⁶Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 189.

³⁷Perkembangan kebudayaan Islam mencapai puncaknya pada masa Dinasti Mughal sehingga masyarakat muslim mendominasi wilayah India utara, seperti Sind, Balukistan, Punjab, provinsi

(Mamluk) pernah menguasai Bengala. Namun, penguasaan atas Bengala memang selalu mendatangkan masalah tersendiri bagi para Sultan Delhi.³⁸ Hal ini karena wilayah Bengala sangat subur dan letaknya yang jauh dari pusat ibukota sering dimanfaatkan para gubernurnya untuk memberontak. Pada masa Sultan Ghiyatsuddin Tughlaq (1320-1325 M), Bengala menjadi wilayah kekuasaannya, yang dibagi menjadi dua provinsi dengan gubernurnya masing-masing. Provinsi Bengala Barat yang berpusat di Kota Lakhnawati, gubernurnya adalah Alauddin Ali, dan Provinsi Bengala Timur yang berpusat di Sonargaun, gubernurnya adalah Fakhuruddin Mubarak Syah. Sepeninggal Sultan Ghiyatsuddin Tughlaq, kedua gubernur Bengala itu masing-masing memerdekaan diri. Diduga semenjak periode ini, proses islamisasi Bengala dilakukan secara intensif, sehingga wilayah ini nantinya mayoritas beragama Islam.³⁹

Bengala dipersatukan secara penuh oleh Sultan Syamsuddin Ilyas (1345-1358 M), pendiri Dinasti ini, Bengala mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan perdagangan. Berikutnya, Bengala berturut-turut berada di bawah kekuasaan Sayyid Alauddin Husain Syah dan keturunannya (1494-1539 M), Syir Syah Sur dan keturunannya (1539-1564 M), Sulaiman Kararani dan

perbatasan barat laut yang sekarang menjadi bagian negara Pakistan. Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 305.

³⁸Delhi adalah ibukota kerajaan-kerajaan Islam di India sejak tahun 608 H/1211 M. Sebagai ibu kota kerajaan-kerajaan Islam, Delhi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di anak Benua India. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 289. Sultan Delhi diantaranya adalah, Sultan Izzuddin Aibak, Sultan Muhammad Tughlaq, Sultan Khalji, Sultan Sayyid, dan Sultan Zahirudin Babur. Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 258-261.

³⁹Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 189-190.

keturunannya (1564-1576 M), serta pada akhirnya dilakukan oleh Sultan Akbar dan menjadi bagian dari imperium Mughal hingga direbut oleh bangsa Inggris.

Penguasa Inggris atas anak Benua India sesungguhnya bermula dari Bengala dengan cara menggerogoti kekuasaan Imperium Mughal. Ini mulai ketika EIC (*East India Company*) diberi konsesi untuk mendirikan “*factory*” di Calcutta pada tahun 1690 M. Dari kota Calcutta yang berada di Bengala Barat inilah, Inggris memulai aktivitas kolonialnya. Robert Clive, peletak dasar kolonisasi Inggris di anak Benua India, yang dapat menganeksasi Bengala dari Nawab Surajuddaula melalui perang Plassey (1757 M).⁴⁰ Sejak itu kekuasaan kolonial Inggris menancap kuat di Bengala dan kemudian melebarkan sayapnya ke wilayah-wilayah lain sehingga menguasai anak Benua India. Dengan demikian, Bengala merupakan wilayah kolonial Inggris di anak Benua India yang paling dieksploitasi secara ekonomis. Tidak mengherankan bila pemerintah sebagian besar miskin, kendatipun tanahnya subur.⁴¹

Pada masa pemerintahan *Viceroy* Lord Curzon (1898-1905 M),⁴² Bengala akan pecah menjadi dua provinsi. Bengala Timur yang mayoritas penduduknya Muslim dijadikan sebagai provinsi terpisah dari Bengala Barat yang sebagian besar penduduknya Hindu. Rencana Curzon akan membagi Bengala menjadi dua provinsi

⁴⁰Perang Plassey adalah pertempuran yang meletus pada 23 Juni 1757 M di Palashi (sekitar 150 km sebelah utara Kolkata) antara East India Company Britania melawan Nawab Bengala dan pertempuran ini dimenangkan oleh East India Company, sehingga wilayah Bengala dianeksasi. Lihat Jean Paul Sartre, *Perang Plassey Meletus*, diakses pada 3 November 2015 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Plassey.

⁴¹Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 190-191.

⁴²Viceroy adalah pejabat kerajaan yang menjalankan urusan negara (tingkatan provinsi) atas nama penguasa monarki. Kata Viceroy memiliki dua kata, yaitu: kata *vice* dalam bahasa latin adalah di tempat, dan kata *roy* dalam bahasa perancis adalah raja. Lihat artikel diakses pada 3 November 2015 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Viceroy>.

itu disahkan melalui UU pemisahan Bengala pada September 1905 M. Akan tetapi rencana ini mendapat reaksi yang sangat keras, khususnya dari komunitas Hindu (dimotori oleh Partai Kongres), yaitu pada Oktober 1905 M melancarkan gerakan “*Swadeshi*”,⁴³ gerakan untuk memboikot barang-barang produksi Inggris. Akhirnya rencana ini dibatalkan.

Namun demikian, Bengala tetap terbelah menjadi dua provinsi ketika pemerintahan kolonial Inggris memerdekakan anak Benua India menjadi dua negara *dominion*, India dan Pakistan, pada Agustus tahun 1947 M. Bengala Barat yang mayoritas Hindu dan pusat pemerintahan di Calcutta, masuk ke dalam negara India. Sementara Bengala Timur yang mayoritas Muslim dan pusat pemerintahan di Dacca (kemudian berubah menjadi Dhaka) bergabung ke dalam Pakistan. Waktu itu Bengala Timur bernama Provinsi Pakistan Timur.⁴⁴

B. Latar Belakang Geografis Bangladesh

Bangladesh, yang berarti bangsa Bengali, mempunyai luas wilayah yang relatif kecil, hanya sekitar 147.570 km² atau 56.977 mil.⁴⁵ Namun, sekalipun wilayahnya kecil, Bangladesh dikenal sebagai salah satu negara yang berpenduduk paling padat dan

⁴³Swadeshi yaitu memboikot barang-barang asing dan meninggalkan segala produk peradaban luar yang menjajah. Gerakan ini berusaha keras bisa memperhatikan kebangsaan sehingga seluruh masyarakat diharuskan untuk bersikap sederhana, bersahaja dan hanya memakai hasil-hasil produk nasional. Lihat Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, *Islam di Asia Selatan*, (Bandung: Humaniora, 2006), h. 183.

⁴⁴Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 191.

⁴⁵Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, *Islam di Asia Selatan*, h. 338.

paling miskin di dunia. Pada waktu memisahkan diri dari Pakistan tahun 1971 M, penduduk Bangladesh berjumlah lebih dari 80 juta jiwa.

Wilayah Bangladesh sebagian besar dibentuk oleh delta dua sungai utama, yaitu Sungai Gangga yang berhulu di pegunungan Himalaya India (di Bangladesh disebut Sungai Padma) dan Sungai Brahmaputra (di Bangladesh disebut Sungai Jamuna) yang bermata air di Pegunungan Himalaya Nepal. Kedua sungai itu dipertemukan oleh Sungai Meghna dan disebut sebagai Sungai Mhapadma. Dari kedua sungai tersebut, dihasilkan anak-anak sungai yang banyak sehingga Bangladesh benar-benar merupakan lahan yang sangat subur bagi pertanian. Tetapi meskipun sangat subur dan dikenal sebagai lumbung padi di Asia Selatan, Bangladesh selalu dihadapkan pada ancaman banjir bandang yang datang setiap musim hujan.

Wilayah Bangladesh terdiri atas bagian Bengala sebelah timur (Bengala Barat masuk wilayah India) dan ditambah dengan Distrik Assam yang bernama Syihet, beribu kota di Dhaka. Penduduk Bangladesh dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni suku mayoritas Bengali dan suku bukit Chittagong. Penduduk Muslimnya dapat di rincikan: Islam 89,7%, Hindu 9,2%, Budha 0,7% dan Katolik-Roma 0,3% dan selebihnya kelompok animis sebanyak 0,1%. Bahasa utama yang dipakai penduduknya adalah bahasa Bengali, sementara bahasa Inggris dipergunakan secara luas dalam pemerintahan, dunia usaha dan pendidikan tinggi.⁴⁶

⁴⁶Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h.187-188.

C. Politik dalam Negeri Pakistan

Lahirnya organisasi Kongres (*Indian National Congress*) pada tahun 1885 M, sering dianggap sebagai awal bangkitnya kesadaran nasional di kalangan intelektual berpendidikan Barat di anak Benua India yang sebagian besar beragama Hindu. Sedangkan berdirinya organisasi Liga Muslim pada 1906 M dimulai perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Pakistan. Kedua organisasi tersebut merupakan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Pakistan adalah hasil dari proses perkembangan kondisional pergerakan kebangsaan (*national movement*) anak Benua India, terutama dari relasi dan interaksi antara Liga dengan Kogres. Pada perkembangannya, gerak langkah Kongres dipimpin oleh Mahatma Gandhi (1869-1948) yang mendominasi Kongres dan perjuangan kemerdekaan India, sedangkan Muhammad Ali Jinnah (1876-1948) sebagai pemimpin yang mendominasi Liga Muslim dan perjuangan kemerdekaan Pakistan.⁴⁷

Istilah Pakistan diciptakan oleh seorang mahasiswa Muslim India yang sedang studi di Universitas Cambridge, bernama Choudhary Rahmat Ali, pada bulan Maret 1933 M. Istilah Pakistan adalah akronin dari bahasa Urdu dan bahasa Parsi untuk menggambarkan *homeland* bagi kaum Muslim India, yaitu singkatan dari Punjab, Afghania (*North-West Frontier Province*), Kashmir, Iran, Sind (termasuk Kach dan Katiawar), Tukharistan, Afghanistan dan Baluchistan. Menurut Rahmat Ali,

⁴⁷*Ibid.*, h. 165-167.

Pakistan juga berarti tanah dari orang-orang Pak, yakni orang-orang yang batinnya suci dan bersih.⁴⁸

Perkembangan politik anak Benua India setelah 1940 M seakan-akan hanya melegitimasi tuntutan Liga Muslim bagi berdirinya Negara Islam Pakistan. Tuntutan tersebut tidak lagi tergoyahkan, bahkan memperoleh dukungan yang lebih banyak dan lebih luas dari kaum Muslim. Konsekuensinya timbul perbedaan tajam dan konflik terbuka berupa bentrokan berdarah antara komunitas Muslim dan pemerintah kolonial Inggris tidak ada pilihan lain kecuali membagi anak Benua India menjadi dua negara merdeka yaitu India bagi mayoritas Hindu seperti yang dituntut oleh Kongres dan Pakistan yang dituntut oleh Liga Muslim bagi mayoritas Muslim.⁴⁹

Permasalahan Kongres dan Liga Muslim merupakan permasalahan politik paling awal dalam negeri Pakistan. Selanjutnya permasalahan pada persetujuan Tashkent antara India dan Pakistan. Pasca perang tahun 1965 M tidak mengubah posisi kedua negara yang bersengketa. Masalah-masalah mengemuka kembalinya Presiden Ayub Khan ke Pakistan pada bulan Januari 1966 M. Para mahasiswa dan kelompok oposisi kecewa terhadap hasil-hasil yang dicapai. Para mahasiswa itu didukung oleh dua partai agama konservatif: *Nizam-i-Islami* dan *Council Moslem League*,⁵⁰ sedangkan Mujibur Rahman dari Liga Awami dan Abdul Hamid Khan Bashani dari Partai Awami Nasional.⁵¹

⁴⁸*Ibid.*, h. 168.

⁴⁹*Ibid.*, h. 168-169.

⁵⁰*Nizam-i-Islami* adalah partai Islam yang dirancang untuk melaksanakan hukum Islam yaitu membentuk sistem pemerintahan Republik Islam Pakistan di atas pilar-pilar Islam dan menegakkan

Bashani yang kemudian mendukung persetujuan karena alasan ideologi: telah mengendorkan cengkeraman imperialis. Sementara itu, Mujibur Rahman enggan berbicara agar tidak melukai para pemimpin India yang telah menahan diri dari perluasan perang tahun 1965 M ke Pakistan Timur. Baginya isu Kashmir merupakan masalah Pakistan Barat. Mujibur Rahman lebih memusatkan perhatiannya pada perbedaan-perbedaan antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur.

Sementara Pakistan sedang dirundung kekacauan, partai-partai politik Pakistan Barat menyelenggarakan Konferensi Nasional untuk membahas isu pokok yang sedang dihadapi negara, utamanya hasil Persetujuan Tashkent dan Konferensi mengalami kegagalan dengan ditolakny usulan otonomi bagi Pakistan Timur oleh Mujibur Rahman.⁵² Gagalnya Konferensi untuk menyelesaikan masalah-masalah politik yang dihadapi kedua sayap Pakistan mendorong Ayub Khan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Yahya Khan pada tanggal 25 Maret 1969 M, yang segera menggulirkan Keadaan Darurat.⁵³

Pada tanggal 28 November 1969 M atas desakan berbagai partai politik dan desakan Program Enam Butir, Yahya berjanji untuk menyelenggarakan Pemilu dan membagi Pakistan Barat menjadi empat daerah pemilihan: Punjab, Perbatasan Barat

syariat Islam dalam seluruh segi kehidupan rakyat Pakistan. Cecep Zakaria El Bilad, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 dari <https://zakariaselbilad.wordpress.com/2009/01/23/perjalanan-politik-islam-di-pakistan-misteri-di-balik-terbunuhnya-benazir-butho>. Dan *Council Moslem League* adalah dewan Liga Muslim yang merupakan sebuah faksi dari Liga Muslim Pakistan pada tahun 1962 M yang mendukung rezim Presiden Jenderal Ayub Khan. Lihat diakses pada 29 Oktober 2015 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Council_Muslim_League.

⁵¹B. Mudisi, *India Sejarah Ringkas: dari Prasejarah sampai Terbentuknya Bangladesh*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012), h. 187.

⁵²*Ibid.*, h. 187-188.

⁵³*Ibid.*, h. 189.

Laut, Baluchistan dan Sind. Selanjutnya, Yahya Khan mulai mengadakan perundingan-perundingan dengan Mujibur Rahman dan para pemimpin Pakistan Barat. Partai-partai politik Pakistan Barat menyukai pemerintahan pusat yang kuat dalam sebuah Konstitusi Islam, akan tetapi partai-partai politik di Pakistan Timur (lebih-lebih Liga Awami) menghendaki otonomi lebih besar dan mendukung Program Enam Butir Mujibur Rahman. Sementara itu, Bhutto dengan *Pakistan People Party* (P3)-nya gagal menawarkan sosialisme buat Islam.⁵⁴

Yahya memperkenalkan *The Legal Framework Order* pada tanggal 31 Maret 1970 M, yang memuat lima prinsip pokok yang dirancang untuk mengarahkan dan membuat suatu rencana politik yang akan menggantikan pemerintahan militer, yaitu: (1) Pakistan harus didasarkan pada ideologi Islam; (2) negara mempunyai konstitusi demokratik; (3) integritas wilayah Pakistan akan ditegakkan dalam konstitusi mendatang; (4) ketidaksamaan yang memberi ciri kedua sayap akan diperkecil dengan ketentuan perundangan-perundangan dijamin dalam konstitusi; (5) pembagian kekuasaan antara pusat dan propinsi-propinsi harus dibuat propinsi pada tingkatan otonomi maksimum konsisten dengan memberi pusat kekuasaan yang menandai untuk

⁵⁴*Pakistan People Party* (Pakistan Partai Rakyat) adalah sebuah gerakan dalam partai rakyat Pakistan yaitu politik, sosialis dan sosial yang demokratis. Didirikan sejak tahun 1967 M dan dipimpin oleh keturunan keluarga Bhutto-Zardari. Lihat artikel diakses pada 28 Oktober 2015 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_Peoples_Party. Dan Slogan sosialisme adalah roti, kapre, makan (makanan, pakaian, perumahan). Dia menjalankan program nasionalisasi dan land-reform sebagai wujud sosialisme pembangunannya. Namun, realitas politik memaksanya untuk berubah pandangan untuk lebih mempertimbangkan Islam sebagai kekuatan yang akan mengokohkan kekuasaannya dan melancarkan jalan bagi sosialismenya. Cecep Zakarias El Bilad, artikel diakses pada 28 Oktober 2015 dari <https://zakariaselbilad.wordpress.com/2009/01/23/perjalanan-politik-islam-di-pakistan-misteri-di-balik-terbunuhnya-benazir-butho>.

melaksanakan tanggung jawab federal termasuk mempertahankan integritas wilayah negara.⁵⁵

Sebuah *The Legal Framework Order*, diumumkan untuk membuat garis besar pada Dewan Nasional yang baru akan disusun dan kewajiban-kewajiban pembuat konstitusinya akan ada. Dewan 300 dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan 162 dipilih oleh Pakistan Timur dan 138 dipilih oleh keempat propinsi Pakistan Barat. Pemilu diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 1970 M dan Dewan Nasional hanya diberi waktu 120 hari untuk menghasilkan sebuah konstitusi baru. Jika dewan tidak dapat melengkapi rancangan konstitusi pada waktu yang sudah ditetapkan, dewan itu akan dibubarkan dan putaran pemilu lain akan diselenggarakan. Presiden memiliki hak untuk membuktikan konstitusi demikian, sehingga dokumen yang disiapkan oleh dewan tidak berlawanan dengan lima prinsip dasar dalam *The Legal Framework Order*.⁵⁶

Mujibur Rahman tidak puas terhadap tawaran Yahya dan sejak ditetapkannya Pemilu pada Oktober 1970 M, Liga Awami berkampanye atas dasar Program Enam Butir. Baik Yahya Khan maupun Mujibur Rahman masing-masing bersikeras pada pendiriannya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Pakistan sedang muncul dua nasionalisme terpisah, yaitu Nasionalisme Pakistan Barat yang didasarkan pada kezaliman Pakistan Barat atas Pakistan Timur dan Nasionalime

⁵⁵B. Musidi, *India Sejarah Ringkas*, h. 190.

⁵⁶B. Mudisi, *Dari Era Ayub Khan sampai Era Bhutto* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012), h. 11.

Pakistan Timur yang bertumpu pada hubungan kesamaan. Dalam hal ini Islam tidak lagi menjadi tali pengikat.⁵⁷

Pemilu diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 1970 M memberi Liga Awami perolehan kursi 160 (74,9%) dari 162 kursi yang disediakan, sementara Bhutto memperoleh 81 kursi dari 138 kursi yang tersedia.⁵⁸ Pemilu bulan Desember 1970 M itu merupakan titik balik. Pemilu menghasilkan akibat yang tidak diduga sebelumnya, yaitu berupa bangkitnya para pemimpin politik. Mandat Mujibur Rahman adalah untuk membahas suatu tingkatan otonomi bagi Pakistan Timur, diantaranya yaitu Mujibur Rahman menuntut ekonomi individual dan persamaan sosial. Tujuan utamanya adalah kemakmuran Benggala Timur. Dalam mengejar tujuan ini, ia telah bergabung dengan Mohammad Ali Jinnah dan mengambil bagian yang aktif dalam pergerakan Pakistan.⁵⁹

Bhutto adalah seorang pemimpin baru. Dengan demikian kekuatan Bhutto dan Mujib segera diketahui setelah Pemilu diumumkan. Pasca Pemilu Pakistan Barat dan Pakistan Timur masing-masing telah memperoleh pemimpin mereka sendiri, mandat mereka yang amat berbeda telah disahkan oleh rakyat. Mujib menghendaki otonomi untuk Pakistan Timur, sementara Bhutto menghendaki pemulihan pemerintahan sipil dan suatu pengaturan kembali perekonomian. Keduanya tidak bersedia duduk bersama selama 120 hari di Dewan Nasional guna merancang sebuah konstitusi yang sejajar dengan prinsip-prinsip luar yang telah diletakkan dalam *The*

⁵⁷B. Musidi, *India Sejarah Ringkas*, h. 190.

⁵⁸*Ibid.*, h. 190.

⁵⁹B. Mudisi, *Dari Era Ayub Khan sampai Era Bhutto*, h. 11.

Legal Framework Order-nya Yahya Khan. Dewan Nasional yang baru diundang bersidang pada tanggal 3 Maret 1971, tetapi Bhutto memutuskan untuk memboikot sidang, dengan berdalih bahwa ia sedang berusaha mencari kesepakatan dengan Mujib atas isu-isu konstitusional penting sebelum ia dapat masuk ke Dewan Nasional. Yahya Khan menjawabnya dengan menunda sidang Dewan Nasional dan tindakan itu mendorong Mujib memerintahkan para pengikutnya untuk tidak bekerja sama dengan pemerintahan militer.

Pada minggu pertama bulan Maret bendera Pakistan mulai diganti dengan bendera Liga Awami. Pada tanggal 7 Maret 1971 M, Mujibur Rahman mulai mengajukan syarat-syarat baru untuk menghadiri sidang Dewan Nasional. Itu berarti Jendral Yahya Khan dan para anggotanya harus lebih dulu mengakomodasi Liga Awami, menerimanya sebagai mayoritas dalam Dewan Nasional dan Mujibur Rahman sebagai perdana menteri. Syarat-syarat yang diajukan oleh Mujib tidak diterima, justru Mujibur Rahman ditahan dan dibawa ke Pakistan Barat. Sejumlah pengikutnya lari ke Calcutta, India, guna membentuk pemerintahan di pengasingan. Operasi dilancarkan pada tanggal 25 Maret dan berakhir sampai 17 Desember 1971 M, ketika Mukti Bahini dengan dibantu oleh angkatan perang India memaksa pasukan Pakistan secara resmi menyerah dalam sebuah upacara resmi pengambilan Dhaka dan membangun negara Bangladesh merdeka.⁶⁰

Yahya menyatakan bahwa Dewan Nasional akan bersidang pada tanggal 13 Maret 1971 M, selanjutnya Bhutto menyatakan kesediaannya berkompromi.

⁶⁰*Ibid.*, h. 11-13.

Ketegangan-ketegangan di Pakistan Timur makin meningkat begitu sentimen anti Pakistan Barat sampai menjelang tanggal 21 Februari 1971 M dan mulailah diketengahkan ide-ide pembentukan negara terpisah, Bangladesh.⁶¹

Pada tanggal 23 Februari 1971 M, Yahya Khan membubarkan kabinet sipilnya dan menggantinya dengan gubernur militer. Mujibur Rahman pada tanggal 25 Februari 1971 M menolak perundingan lanjutan atas Program Enam Butir. Sedangkan pada tanggal 1 Maret 1971 M Bhutto menuntut pembubaran Dewan Nasional dan mengancam akan melancarkan suatu gerakan massa jika Dewan Nasional bersidang tanpa anggota P3 (*Pakistan People Party*). Dengan demikian tidak ada alternatif untuk menunda sidang Dewan Nasional. Menghadapi tindakan Yahya, Mujibur Rahman pada tanggal 4 Maret 1971 M melancarkan *hartal*.⁶² Yahya menyimpulkan bahwa Liga Awami tidak dapat dipengaruhi dari posisinya lewat perundingan-perundingan.⁶³

Pada tanggal 7 Maret 1971 M, Yahya mengumumkan bahwa Dewan Nasional tidak akan bersidang seperti yang direncanakan yaitu pada tanggal 25 Maret 1971 M. Menanggapi hal itu Mujib mengajukan tuntutan baru, yaitu; (1) pencabutan keadaan darurat; (2) pemindahan kekuasaan kepada para wali terpilih; (3) menarik

⁶¹B. Mudisi, *India Sejarah Ringkas*, h. 191.

⁶²*Hartal* adalah istilah dalam banyak bahasa Asia Selatan untuk aksi mogok, pertama kali di gunakan selama gerakan kemerdekaan India. Hal ini disebut protes yang melibatkan tempat kerja, kantor, toko, pengadilan sebagai bentuk pembangkangan sipil. Selain menjadi pemogokan umum, melibatkan penutupan sukarela sekolah dan tempat-tempat bisnis. Ini adalah modus menarik untuk simpati dari pemerintah untuk mengubah keputusan tidak populer atau tidak diterima. Sebuah hartal sering digunakan untuk alasan politik, misalnya dengan sebuah partai politik oposisi memprotes kebijakan atau tindakan pemerintah. Lihat artikel diakses pada 3 November 2015 dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Hartal>.

⁶³B. Musidi, *India Sejarah Ringkas*, h. 191.

kembali pasukan ke barak-barak mereka; (4) suatu penyelidikan atas penembakan polisi. Selanjutnya, Mujibur Rahman melancarkan non kooperasi secara serentak di seluruh negeri dan berhasil.

Pada tanggal 26 Maret 1971 M, dalam sebuah pidato lewat radio Yahya mencela gerakan non kooperasi Mujibur Rahman sebagai suatu tindakan penghianatan sebab telah menimbulkan huru-hara, teror dan kekacauan. Akhirnya pemimpin Pakistan Barat takut kehilangan dominasinya dan menolak untuk menyerahkan kekuasaan kepada para wakil Pakistan Timur.⁶⁴

Pakistan menguak kepalsuan teori dua bangsa Jinnah yang meramalkan keberadaan Pakistan di atas Islam dan perlunya menghimpun kaum Muslimin India. Tetapi ikatan etnik dan bahasa telah menahan kaum Muslimin tetap terpisah dan pemisahan itu diperburuk oleh keluhan-keluhan ekonomi Timur melawan Barat. Para ahli Pakistan mengakui bahwa politik negara mereka telah terpisah karena perbedaan dan tidak demokratis. Kaum Muslim Benggala tidak diwakili dalam jabatan sipil dan militer, tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang penting, dan tidak tertarik untuk menggunakan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional dan akibatnya merasa tidak memperoleh kesamaan dalam Islam. Ketidaksamaan ekonomi dan dominasi elite Pakistan Barat menjadi lebih besar dari pada suatu ideologi yang abstrak. Kondisi-kondisi itu jelas tidak mampu mengikat kedua sayap Pakistan itu menjadi satu.⁶⁵

⁶⁴*Ibid.*, h. 191-192.

⁶⁵*Ibid.*, h. 191-192.

Perkembangan-perkembangan politik dalam skala internasional juga mempengaruhi keamanan India. Pada bulan Juli 1971 M, Penasehat Keamanan Nasional Presiden Nixon, Henry Kissinger ke New Delhi guna membahas kondisi politik anak Benua India yang mudah berubah. Amerika Serikat akan memulihkan hubungannya dengan Cina Komunis dan Menteri Luar Negeri India, T.N. Kaul mendapat jaminan bahwa hubungan Amerika Serikat-Cina tidak akan mengorbankan India.

L.K Jha, Dubes India di Washington DC memperoleh penjelasan Kissinger, bahwa Cina akan campur tangan jika India menyerang Pakistan dan India dapat meminta bantuan Amerika Serikat seperti pada tahun 1962 M. Usaha India untuk memperbaiki hubungannya dengan Cina tidak berhasil. Selanjutnya, India berusaha mengikatkan hubungannya dengan Uni Soviet, setelah melihat bahaya yang mengelilinginya, yaitu pendekatan Amerika Serikat-Cina, ancaman perang dari pihak Pakistan dan usaha-usaha Islamabad dengan dukungan Washington untuk melibatkan PBB di Pakistan Timur. Peningkatan hubungan India-Uni Soviet merupakan langkah proteksi yang mungkin ada pada Dewan Keamanan dan perlindungan terhadap penyerangan pihak ketiga.⁶⁶

⁶⁶*Ibid.*, h. 194-195.

D. Peran Negara Asing

1. Uni Soviet

Hubungan Uni Soviet dengan Pakistan dimulai sejak bulan Juni 1955 M, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengunjungi Uni Soviet. Beberapa bulan kemudian Khrushchev melakukan kunjungan balasan ke India, dan mendapatkan sambutan hangat. Karena hal itu, Khrushchev menekankan bahwa India telah bertindak sebagai negara yang berdaulat dalam sengketa dengan Pakistan mengenai wilayah Kashmir.⁶⁷

Uni Soviet menolak mengakui harapan-harapan Liga Awami untuk merdeka yang dengan tegas didukung India sejak akhir bulan April 1971 M. Uni Soviet tidak henti-hentinya mendesak India untuk mencari penyelesaian lewat perundingan-perundingan dengan Pakistan atas dasar otonomi regional bagi Pakistan Timur. Sikap Uni Soviet dapat dirunut yaitu: (1) sebelum India dan Uni Soviet menandatangani perjanjian, Uni Soviet mendesak India untuk tidak mengucilkan Pakistan; (2) agaknya Uni Soviet tidak ingin membuat Amerika Serikat tersinggung sebelum pertemuan tingkat tinggi tahun 1972 M.⁶⁸

Pada tanggal 1 Oktober 1971 M pemimpin delegasi Pakistan Timur di Amerika Serikat mengulangi pernyataan bahwa suatu penyelesaian politik dari krisis di anak Benua India sebagai negara merdeka. Sementara para pemimpin India

⁶⁷Priya Esselborn, *Rusia ingin Pertahankan Hubungan dengan India*, diakses pada 29 Oktober 2015 dari <http://www.dw.com/id/rusia-ingin-pertahankan-hubungan-dengan-india/a-16472122>.

⁶⁸B. Mudisi, *India Sejarah Ringkas*, h. 195.

disibukkan dalam kerangka dasar diplomasi, pertempuran perbatasan terjadi pada bulan Oktober 1971 M di Kamalpur, ujung timur laut India. Pertempuran besar pertama berupa pertempuran tank dan udara di Boyra, perbatasan Benggala Barat dengan Pakistan Timur, pada tanggal 21 November 1971 M. Insiden Boyra mendorong Pakistan ke dalam keadaan darurat dan pada tanggal 25 Nopember 1971 M, Yahya Khan menyatakan bahwa situasi militer amat buruk. Pada tanggal 3 Desember 1971 M, Pakistan menyerang landasan udara di India Barat Laut.⁶⁹

India dan Pakistan ditakdirkan untuk saling bertabrakan karena ideologi mereka yang saling berlawanan. Dalam tiap perang dari ketiga perang yang terjadi antara India dan Pakistan, para pemimpin dari kedua negara dipaksa untuk mempertahankan legitimasi cita-cita mereka. Liga Awami merupakan suatu koalisi sekuler, demokrasi, sosial, dan nasionalisme.⁷⁰ Benggala disulut oleh ketidakpuasan terhadap ikatan Islam dan kebijakan yang represif dari pimpinan Pakistan Barat. Liga Awami adalah menifestasi politik perubahan dan sebagai suatu gerakan politik mewakili kemungkinan pemisahan diri, sebagai gerakan sekuler mewakili suatu ancaman terhadap dasar ideologi Pakistan.⁷¹

⁶⁹*Ibid.*, h. 196.

⁷⁰Liga Awami dengan pemimpinnya Mujibur Rahman (Mujib) telah menetapkan basis bagi koalisi dengan beberapa partai dari sayap barat Pakistan sebelum bulan Maret 1971, dan tidak ada keraguan bahwa ini merupakan suatu basis yang memuaskan bagi hubungan jangka panjang antara kedua belah sayap. Bhutto kemudian meminta agar koalisi antara partai-partai dominan di sayap timur dan barat dapat menciptakan pembangunan yang berjangkauan luas yang tentu saja dalam segala macam sistem politik. Dalam isu ini ternyata Bhutto lah yang benar. Tetapi kemudian banyak pimpinan dari Liga Awami yang tidak terlalu tertarik terhadap sistem demokrasi dalam kerangka penggabungan kedua sayap Pakistan. Lihat *Dinamika Keterlibatan Militer dalam Demokratisasi Pakistan studi kasus: Pemerintahan Pervez Musharraf (1999-2008)*, h. 7.

⁷¹B. Mudisi, *India Sejarah Ringkas*, h. 196-197.

Perkembangan yang berlangsung di Pakistan Timur merupakan tantangan. Sebagai tantangan mendorong mencari formulasi untuk menanggulangi beban pengungsi baik secara ekonomi maupun secara politik. Para pemimpin India cemas akan usaha Pakistan untuk meniadakan gerakan sekuler dan demokratik itu. Beban pengungsi yang luar biasa dengan implikasi ekonomi dan politik mendorong India untuk campur tangan dalam krisis di Pakistan Timur, sebab India tidak berminat untuk menyerap 9.8 juta penduduk baru. Pengungsian besar-besaran membahayakan keamanan, mempengaruhi stabilitas dan otoritas Pemerintahan India, karena Uni Soviet memihak India maka India merasa aman untuk campur tangan di Pakistan Timur.⁷²

2. Amerika Serikat

Dukungan Amerika Serikat berawal dari peranan Pakistan, terutama Yahya Khan dan Sultan Khan, Menteri Luar Negeri Pakistan dalam memulihkan hubungan Amerika Serikat-Cina. Pada tanggal 7 Mei 1971 M, sebuah sub komite Panitia Hubungan Luar Negeri Senat mengadakan pemungutan suara untuk menunda penjualan senjata ke Pakistan. Akibatnya, pada tanggal 10 Juni 1971 M Senator Frank Church dan William Saxbe mengamandemen rancangan undang-undang militer dan ekonomi Amerika Serikat ke Pakistan sampai mayoritas pengungsi dipulangkan.⁷³

Pakistan menghadapi krisis ideologi yang mengancam keberadaannya, berupa: (1) Pakistan Timur ingin merdeka, sementara Pemerintah Pakistan tidak

⁷²*Ibid.*, h. 197.

⁷³*Ibid.*, h. 198.

bersedia mengakomodasi kehendak untuk otonomi. Ini berarti mengungkit masalah legitimasi Pakistan untuk menggabungkan Kashmir yang rakyatnya Islam. Karena ikatan ideologi lemah, maka tuntutan untuk otonomi dihadapi dengan kekerasan, sehingga mendorong India untuk mendukung gerakan itu. (2) Dampak dari hal-hal itu, mendorong India dan Pakistan saling berhadapan, sebab beban pengungsi yang berat di India dari intervensi negara-negara adidaya dalam konflik regional. Karenanya India memutuskan untuk berperang dari pada menyerap pengungsi ke dalam masyarakat yang sudah penuh sesak. (3) Kelalaian Amerika Serikat terhadap minat India dan kekejaman rezim Pakistan mendorong India makin mendekati Uni Soviet.⁷⁴

Dari sudut pandang India perang itu berakibat penolakan terhadap teori dua bangsa Jinnah, sebab ikatan-ikatan Islam yang diduga menjadi perekat Pakistan terbukti lemah, sementara perbedaan-perbedaan etnik, bahasa dan ras jauh lebih penting untuk menjadi bernaung di bawah simbol integrasi nasional bukannya ikatan agama. Terpecahnya Pakistan memperlemah tuntutannya atas Kashmir, sebab Pakistan Barat tidak mampu menyakinkan Pakistan Timur tetap bersama dalam sebuah negara yang sama. Dampak berikutnya mempersulit pimpinan Pakistan meletakkan suatu tuntutan atas Kashmir berlandaskan komposisi keagamaan. Dengan demikian keinginan untuk penyelenggaraan plebisit⁷⁵ dan minat sebenarnya dalam

⁷⁴*Ibid.*, h. 198-199.

⁷⁵Plebisit adalah pemungut suara atas sebuah daerah untuk menentukan status daerah tersebut (yakni di Kashmir). Lihat Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 455.

penggabungan Kashmir menjadi berseberangan. Alasannya, Pakistan lebih dulu menghapuskan wilayah yang dirampas dari perang tahun 1947-1948 M.⁷⁶

Pada tanggal 25 Maret 1971 M, pasukan Pakistan melibas Liga Awami dan lain-lainnya di Dacca dalam usahannya untuk mengakhiri perlawanan. Tindakan ini begitu kejam sehingga memperkeras sikap mereka untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Pada tanggal 27 Maret 1971 M sebuah negara merdeka diumumkan oleh seorang opir Pakistan, Mayor Ziur Rahman di Chittagong.⁷⁷

Selanjutnya, ada dua hal yang dapat dicermati. *Pertama*, ada aliensi yang sedang berkembang di kalangan orang-orang Pakistan Timur tentang konsep sebuah tanah Muslim bersatu di anak Benua India. Ini merupakan suatu konsekuensi perbedaan-perbedaan sumber antara kedua sayap Pakistan bersatu. Sumber-sumber alam di timur sedikit sementara sumber-sumber tenaga manusia masih terbelakang selama berabad-abad yang dilalaikan oleh para penguasa Muslim dan Inggris. *Kedua*, ada suatu pertumbuhan sejalan dengan perasaan disebut Benggala. Kedua faktor itu mempengaruhi proses sosialisasi pada hampir setiap lapisan elite, dan selama perang saudara membanjiri semua orang Pakistan Timur.⁷⁸

⁷⁶B. Mudisi, *India Sejarah Ringkas*, h. 198-199.

⁷⁷Alburuj Razzaq Rahman, *Bangladesh Liberation War 1971*, h. 3.

⁷⁸B. Musidi, *India Sejarah Ringkas*, h. 201.

BAB III BIOGRAFI POLITIK MUJIBUR RAHMAN

A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

Nama Mujibur Rahman, menurut bahasa Bengali: *Sheikh Mujibur Rohman*, sedangkan nama populernya adalah Sheikh Mujib (nama pendeknya Mujib atau Mujibur) dan gelar kehormatannya ialah Bangabandhu (menurut bahasa Bengali: *Bongobondhu*).⁷⁹ Ia dilahirkan dari keluarga muslim terhormat pada tanggal 17 Maret 1920 M di desa Tungipara (Kabupaten Gopalganj), provinsi Benggala di British India. Sheikh Mujibur Rahman merupakan anak ketiga di antara empat anak perempuan dari pasangan Sheikh Lutfar Rahman dan Sheikh Shahara Khatun.⁸⁰



Gambar 1
Sheikh Mujibur Rahman, Presiden pertama Bangladesh (Pakistan Timur)
(Sumber Foto: www.Father of the Nation.com)

⁷⁹Diakses pada 28 Mei 2015 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Mujibur_Rahman.html.

⁸⁰Md. Sayedur Rahman, dkk., *Evaluation of Charismatic Leader of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman* (Bangladesh: Universitas Begum Rokeya Rangpur, 2014), h. 2.

Pada tahun 1927 M Mujibur Rahman berusia tujuh tahun, ia mulai sekolah tingkat dasar di Gimadanga dan lulus pada tahun 1932 M. Setelah kelulusan Sekolah Dasar tersebut, Mujibur Rahman melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama dengan sekolah yang sama yaitu di Gimadanga. Namun, pada tahun 1934 M Mujibur Rahman dipaksa untuk istirahat dari studi oleh keluarganya, saat itu ia berusia empat belas tahun karena salah satu matanya harus dioperasi. Kemudian pada tahun 1935 M Mujibur Rahman kembali sekolah yakni tepat duduk di kelas III Sekolah Menengah Pertama, ia berpindah sekolah di sekolah umum Gopaganj dan menamatkannya pada tahun 1935 M. Setelah kelulusan dari Sekolah Menengah Pertama, Mujibur Rahman melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di sekolah Misionaris dan lulus pada tahun 1938 M.⁸¹

Sheikh Mujibur Rahman menikah pada usia 18 tahun dengan seorang wanita bernama Fazilatunnesa yang ketika itu baru berusia 8 tahun. Fazilatunnesa terkenal sebagai wanita yang berhati lembut dan peduli orang-orang miskin. Ia lahir di Tungipara (Kabupaten Gopalganj) pada tanggal 8 Agustus 1930 M.⁸²

Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai lima orang anak. Kelima anaknya itu adalah dua anak perempuan yang masing-masing bernama Sheikh Hasina dan Sheikh Rehana, sedangkan tiga anak laki-lakinya bernama Sheikh Kamal, Sheikh Jamal, dan

⁸¹Muhammad Kadira Nurula, *Independence of Bangladesh in 266 Days: History and Documentary Evidence* (Dhaka: Mukto Publishers, 2004), h. 2.

⁸²Sheikh, Hasina Wajed, *Sheikh Mujibur Rahman*, diakses pada 8 November 2015 dari [http://www.Sheikh Mujibur Rahman \(Bangabandhu\) part 1 - early life of 'khoka', socially-driven teenager, inspired by Suhrawardy, family - biography of Muslim and Bengali.htm](http://www.Sheikh Mujibur Rahman (Bangabandhu) part 1 - early life of 'khoka', socially-driven teenager, inspired by Suhrawardy, family - biography of Muslim and Bengali.htm).

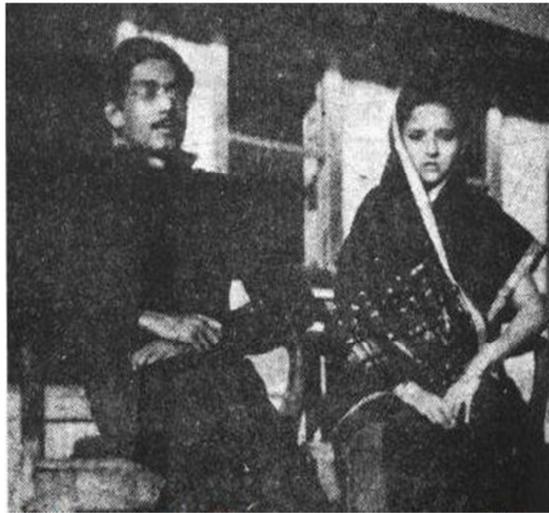
Sheikh Rasel.⁸³ Kedua putrinya yaitu Sheikh Hasina Wazed adalah putri sulungnya, ia lahir pada tanggal 28 September 1947 M di Tungipara (Kabupaten Gopalganj). Ketika Hasina berusia 48 tahun, dia menjadi Perdana Menteri di Bangladesh (pada tahun 1966-2001 M dan tahun 2009-sekarang),⁸⁴ dan Sheikh Rehana adalah puntri bungsunya yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1974 M di Tungipara (Kabupaten Gopalganj).

Sementara itu, ketiga putranya yaitu Sheikh Kamal adalah putra sulungnya yang lahir pada 5 Agustus 1949 M di Tungipara (Kabupaten Gopalganj). Sheikh Kamal lulusan dari Universitas Dhaka jurusan Sosiologi dan istrinya bernama Sultan Kamal Khukur (lahir pada tahun 1951 M di Dhaka). Kemudian Sheikh Jamal merupakan putra keduanya yang lahir pada tanggal 28 April 1954 M di Tungipara (Kabupaten Gopalganj). Sheikh Jamal adalah lulusan dari Universitas Dhaka jurusan Seni (musik) dan ia juga kursus gitar di Chhayanaut (sekolah musik). Selain itu, ia terlibat dalam kegiatan-kegiatan budaya yang beragam dan juga seorang olahragawan. Kamal dinyatakan sebagai penyelenggara perjuangan gerilya Mukti Bahini pada tahun 1971 M. Istri Kamal bernama Parveen Jamal Rosy (lahir tahun 1956 M) di Syihet. Kemudian putra bungsunya adalah Sheikh Russel yang lahir pada

⁸³Jalaluddin Haider, *Bangladesh's Wuest For Closure: can the Execution of Mujib's Assassins Finally Deliver the Country from it's Darkest Chapter* (Drik: Majority World, 2010), h. 3.

⁸⁴Diakses pada 7 November 2015 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Hasina_Wajed.

tanggal 18 Oktober 1964 M di Dhaka, ia adalah seorang mahasiswa semester 1V di Universitas Dhaka jurusan kedokteran.⁸⁵



Gambar 2
Sheikh Mujibur Rahman bersama Fazilatunnesa
(Sumber Foto: [www.Father of the Nation.com](http://www.FatheroftheNation.com))

Sheikh Mujibur Rahman meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975 M di Dhaka karena dibunuh.⁸⁶ Pembunuhan Sheikh Mujibur Rahman ini berlangsung ketika sekelompok perwira militer junior (tentara) menyerbu kediaman Presiden Sheikh Mujibur Rahman dengan tank,⁸⁷ yang pada awalnya adalah untuk menangkapnya. Pada saat detik-detik pembunuhannya, Mujibur Rahman masih bersikap baik dan melayani sebagaimana seorang Presiden Bangladesh. Meskipun

⁸⁵Diakses pada 7 November 2015 dari http://www.bangobondhu.Org/index.php?option=com_homevideo&Itemid102&videofamily&chln2&me1arhive&arcworldarc_liberation_war1&gidslbg.

⁸⁶Diakses pada 28 Mei 2015 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Sheikh_Mujibur_Rahman.

⁸⁷Tank adalah mobil berlapis baja yang beroda gigi yang bergerak (berputar) di atas roda rantai yang melinkari roda-roda giginya dilengkapi dengan senjata berat pada bagian atas tengah di atas ruang kemudi dan dapat digerakkan berputar ke arah sasaran. Lihat Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), h. 482.

begitu, pembunuhan tetaplah terjadi karena pembunuhan sudah direncanakan sebelumnya.⁸⁸ Komplotan dalam pembunuhan ini dibagi menjadi empat kelompok, yakni kelompok yang terdiri dari anggota Bengal *Leacers* dari Divisi Pertama Lapis Baja dan 535 Divisi Infanteri di bawah Mayor Huda.⁸⁹ Ketika itu, mereka langsung menyerang Mujibur Rahman. Anak Mujibur Rahman yakni Sheikh Kamal, melepaskan tembakan dari jendela lantai dua menuju pintu masuk, karena tahu nyawa ayahnya terancam.

Beberapa menit kemudian, setelah bunyi tembakan yang diluncurkan oleh Sheikh Kamal, Mujibur Rahman ditembak oleh komplotan pembunuh, seperti yang direncanakan oleh komplotan pembunuh. Akhirnya, Mujibur Rahman meninggal dunia di tempat atas serangan tersebut. Selain itu, Fazilatunnesa yang merupakan istri dari Mujibur Rahman tewas di lantai atas, sedangkan Sheikh Abu Nasser (staf pribadinya) dan beberapa pegawai tewas di WC. Namun, anak Mujibur Rahman yang bernama Sheikh Jamal dan Sheikh Russel terakhir dibunuhnya yakni setelah semuanya telah terbunuh.

Sheikh Hasina dan Sheikh Rehan, merupakan kedua putri Sheikh Mujibur Rahman yang selamat dan berhasil melarikan diri. Pada saat kejadian tersebut keduanya sedang mengunjungi negara Jerman Barat. Dengan berhasilnya melarikan diri tersebut, Sheikh Hasina dan Sheikh Rehana dilarang untuk kembali lagi ke

⁸⁸M. Hasan, *Zulfikar Ali Bhutto: Semua Kekuatan untuk Dokumentasi Rakyat dan Sosialisme ke Orang-orang (di Inggris), The Mirage Power, Oxford University* (Inggris: The Oxford University Press, 2000), h. 393.

⁸⁹Divisi adalah balatentara yang terdiri dari 10-20 ribu personil (dipimpin oleh seorang panglima). Infanteri adalah pasukan pejalan kaki. Mayor adalah perwira bagian walikota. Lihat Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Serba Jaya, 2010), h. 87, 181, dan 312.

Bangladesh.⁹⁰ Sheikh Hasina dan Sheikh Rehana berlindung dengan pemerintah India, yang diterbangkan ke India sebelum kejadian pembunuhan terjadi.⁹¹ Selain itu, tentara keamanan tewas yaitu Sheikh Fazlul Haque Moni beserta istrinya Begum Arzu Moni (serta bayi dalam kandungannya), Dhanmondhi, Abdur Rab dan para menteri pemerintah yang tewas tepat di pintu gerbang yaitu Sahid, Abdul Nayeem Khan Rinto, Arif, Suhamto Abdullahabu dan Col. Jamaluddin Ahmad.⁹²

B. Aktivitas Politik Mujibur Rahman

Pada tahun 1939 M, Mujibur Rahman memulai karir politiknya menjadi seorang pemimpin sekelompok mahasiswa misionaris di Gopalganj. Ia terkenal sebagai anak cerdas yang mempunyai semangat dan Mujibur Rahman adalah seorang yang sosialitasnya sangat tinggi terhadap lingkungannya. Misalnya, Mujibur Rahman pernah mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah bersama Huseyn Shaheed Suhrawardy.⁹³ Kunjungan yang mereka lakukan adalah memperbaiki gedung sekolahan, yakni memperbaiki atap sekolah yang sudah retak atas permintaan mahasiswa Gopalganj. Kemudian pada tahun 1940 M, Mujibur Rahman bergabung dengan organisasi yang bernama “Nikhil Bharat Muslim Chathra Federation” (*All*

⁹⁰B. Raman, *Mujib dan Islam (PHP)*, arsip pada 11 Juni 2007. Diakses pada 28 Mei 2015 dari <http://web.archive.org/web/20070611031127/http://www.saag.org/papers3/paper232.html>.

⁹¹Md. Sayedur Rahman, dkk., *Evaluation of Charismatic Leader of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, h. 5.

⁹²Dul, Ghaffar Choudhury, *Bang Mata Sheikh Fazilatunnesa Mujib*, diakses pada 7 November 2015 dari <http://mukthirgaan.blogspot.co.id/2011/10/bangmata-sheikh-fazilatunnesa-mujib.html>.

⁹³Huseyn Shaheed Suhrawardy (lahir pada tanggal 8 September 1892-5 Desember 1963) di Kota Midnapore. Ia adalah seorang politikus Bengali dan ia menjabat sebagai Perdana Menteri terakhir Bengal selama British Raj (Perdana Menteri kelima Pakistan). Lihat artikel diakses pada 15 September 2015 dari [Huseyn Shaheed Suhrawardy - Wikipedia, the free encyclopedia.htm](http://Huseyn%20Shaheed%20Suhrawardy%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm).

India Muslim Students Federation), dan dia terpilih menjadi dewan penting di organisasi tersebut selama satu tahun lamanya.



১৯৫৬ সালে প্রধান মন্ত্রী লোহরাওয়াদীর সাথে শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান

Gambar 3

Mujibur Rahman bersama Huseyn Shaheed Suhrawardy
(Sumber Foto: www.Father of the Nation.com)

Setelah dua tahun bergabung di *Nikhil Bharat Muslim Chathra Federation*, tepat pada tahun 1940 M, Mujibur Rahman lulus test ujian dan tercatat resmi menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Humaniora. Di tahun yang sama, Mujibur Rahman aktif, dan terlibat langsung menyalurkan aspirasi-aspirasi atas kepeduliannya terhadap warga Pakistan, sehingga Mujibur Rahman ini mempunyai keinginan untuk menciptakan negara Pakistan yang pada saat itu belum merdeka.⁹⁴

⁹⁴Diakses pada 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.



Gambar 4

Universitas Calcutta Islamia College, tempat kuliah Sheikh Mujibur Rahman
(Sumber Foto: www.maps.com)

Mujibur Rahman adalah seorang mahasiswa yang aktivis,⁹⁵ terbukti pada karir politiknya yang terus meningkat, meskipun usianya masih muda. Mujibur Rahman menjadi anggota dewan di Liga Muslim pada tahun 1943 M. Setelah Mujibur Rahman menjadi dewan di Liga Muslim beberapa tahun lamanya, Mujibur Rahman terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Mahasiswa. Prestasi yang seperti inilah menunjukkan bahwa Mujibur Rahman ahli dan memang benar-benar pandai di bidang politik atas karir-karirnya yang pernah diperolehnya.⁹⁶

Pada tahun 1949 M, Mujibur Rahman akhirnya dapat menyelesaikan kuliahnya di Universitas Calcutta Islamia College. Mujibur Rahman kembali memainkan perannya sebagai seorang pemimpin, yaitu ia merintis karir politiknya

⁹⁵Aktivis adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan suatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya atau aktivis bisa diartikan sebagai seseorang yang menggerakkan (demonstrasi dan sebagainya). Lihat Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 25.

⁹⁶Diakses pada 28 Mei 2015 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Mujibur_Rahman.

dalam bentuk peduli akan kesejahteraan masyarakat di Bangladesh dengan cara melindungi masyarakat muslim. Usaha yang dilakukan Mujibur Rahman dalam kesejahteraan masyarakat Bangladesh pertama kali adalah dilihat pada tahun 1948 M, yakni Mujibur Rahman mengadakan kunjungan ke departemen hukum yang berada di Universitas Dhaka. Mujibur Rahman menjalin hubungan komunikasi dengan mahasiswa dan para pemimpin politik di Universitas Dhaka. Semenjak diadakan pertemuan antara pegawai politik dan para petani di aula A. K. Fazlul Huq's pada tanggal 2 Maret 1948 M, yang dipimpin oleh Mujibur Rahman berhasil membentuk sebuah organisasi bernama *The All-Party State Language* dan diresmikan pada tanggal 11 Maret 1948 M.⁹⁷



Gambar 5
Sheikh Mujibur Rahman, ketika menjadi pemimpin politik pada 1949
(Sumber Foto: <http://banglapedia.search.com.bd>)

Dewan aksi *The All-Party State Language* (semua pihak negara bahasa) menyerukan pemogokan umum pada tanggal 11 Maret 1948 M terhadap Bangla atas permasalahan bahasa. Gerakan ini merupakan suatu tindakan untuk memprotes

⁹⁷Diakses pada 28 Mei 2015 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Mujibur_Rahman.

konspirasi Liga Awami yang ingin menerapkan bahasa Urdu menjadi satu-satunya bahasa negara Pakistan. Pada hari tersebut, Mujibur Rahman ditangkap bersama dengan beberapa anggota dewan. Saat itu, mereka sedang menggelar demonstrasi⁹⁸ di depan gedung sekretariat. Para komunitas mahasiswa memprotes atas penangkapan Mujibur Rahman tersebut karena merasa tidak adil. Dalam menghadapi gerakan mahasiswa yang kuat, pemerintah Liga Muslim terpaksa melepaskan Mujibur Rahman dan pimpinan mahasiswa lainnya pada tanggal 15 Maret 1948 M. Menyusul pembebasannya, dewan *The All-Party State Language* menggelar rapat umum di Universitas Bat Tala Dhaka, pada tanggal 16 Maret 1948 M yang dipimpin oleh Mujibur Rahman. Hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa bahasa provinsi adalah Bengali, sedangkan bahasa negara Pakistan akan menjadi bahasa Urdu dan tidak ada bahasa lain.⁹⁹



Gambar 6
Peristiwa aksi *the All-Party State Language*
(Sumber Foto: www.Father of the Nation.com)

⁹⁸Demonstrasi adalah protes keras tentang ketidakadilan atau penyelewengan dilakukan dengan banyak orang (disertai poster dan yel-yel). Lihat Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1998), h. 149.

⁹⁹Diakses pada 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.

Pada tanggal 9 Juni 1953 M, Mujibur Rahman terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Liga Awami di Pakistan Timur yang menjabat sebagai sesi dewan. Upaya yang dilakukan untuk menempa persatuan di antara Moulana Bhashani, A.K Fazlul Huq dan Syahid Suhrawardy dengan tujuan mengambil Liga Muslim dipemilihan umum. Untuk mencapai tujuan ini, sisi dewan khusus partai dipanggil untuk mengikuti rapat sebuah resolusi pada tanggal 14 November 1953 M, yakni membentuk Front Jukta (*United Front*).¹⁰⁰



Gambar 7
Mujibur Rahman berdiskusi bersama Sher-E A.K Fazlul Haque
(Sumber Foto: www.Father of the Nation.com)

Pemilihan Umum pertama diadakan pada tanggal 10 Maret 1954 M. Front Persatuan memenangkan pemilihan ini yakni memperoleh 223 kursi dari total kursi sebanyak 237 kursi. Mujibur Rahman berhasil mengalahkan pemimpin Liga Awami yakni Wahiduzzaman.

¹⁰⁰Diakses pada 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.



Gambar 8
Pertemuan United Front
(Sumber Foto: www.Father of the Nation.com)

Di tahun 1955 M, Mujibur Rahman terpilih menjadi anggota dewan Legislatif Liga Awami pada bulan Juni 1955 M. Kemudian, Liga Awami mengadakan pertemuan publik di Paltan Meidan pada tanggal 17 Juni 1955 M, dimana Mujibur Rahman mengajukan program 21-point menuntut otonomi untuk Pakistan Timur. Selain itu, pada tanggal 23 Juni 1955 M, dewan Liga Awami memutuskan bahwa para anggota akan mengundurkan diri dari DPR jika otonomi tidak diberikan kepada Pakistan Timur. Sedangkan pada tanggal 31 Oktober 1955 M, partai Muslim ini benar-benar modern dan sekuler atas pimpinan Mujibur Rahman yang pada akhirnya ia terpilih kembali menjadi Sekertaris Jenderal Partai.¹⁰¹

Pada tahun 1958 M, Presiden Pakistan (Mirja Iskandar) dan Gubernur tentara militer (Ayub Khan), memberlakukan darurat militer pada tanggal 7 Oktober

¹⁰¹Diakses pada 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.

1955 M dan melarang politik. Mujibur Rahman ditangkap pada tanggal 11 Oktober 1955 M atas kasus palsu yang ditujukannya. Mujibur Rahman dibebaskan dari penjara setelah 14 bulan dipenjara. Ia dibebaskan dari penjara setelah ia memenangkan permohonan tertulis di pengadilan tinggi. Kemudian Mujibur Rahman mulai aktif kembali yakni melakukan kegiatan politik bawah tanah untuk melawan rezim hukum perkawinan dan diktator Ayub Khan. Selama periode ini, Mujibur Rahman mendirikan sebuah organisasi bawah tanah yang disebut *Swadhin Bangla biplobi porishad*, atau Dewan Revolusioner kemerdekaan Bangla yang terdiri dari pemimpin mahasiswa yang luar biasa memiliki kinerja untuk kemerdekaan Bangladesh.

Liga Awami mengadakan pertemuan yang ditempatkan di kediaman Mujibur Rahman pada tanggal 25 Januari 1964 M. Pertemuan ini menghasilkan keputusan bahwa terpilihnya Maulana Abdurrashid sebagai presiden partai dan Mujibur Rahman sebagai Sekertaris Jenderal. Peristiwa jalannya sejarah ketika Mujibur Rahman memimpin panitia *the All-Party State Language* untuk menolak kerusuhan komunal yakni gerakan anti Ayub Khan. Lagi-lagi atas kasus tersebut Mujibur Rahman ditangkap selama 14 hari sebelum pemilihan presiden. Mujibur Rahman dibebaskan pada tahun 1965 M setelah menjalani hukuman penjara selama satu tahun. Ia dibebaskan atas keputusan dari pengadilan tinggi.¹⁰²

¹⁰²Diakses pada 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.

Pada tanggal 5 Februari 1966 M, Konferensi Nasional partai oposisi diadakan di Lahore. Mujibur Rahman mengusulkan permintaan tuntutan otonomi sebelum komite yang dipilih dari konferensi. Permintaan tuntutan otonomi adalah sebuah piagam, yakni menuntut kebebasan bangsa Bengali. Pada bulan Maret 1966 M, Mujib terpilih sebagai Presiden Liga Awami. Pada tanggal 8 Mei 1966 M, Mujib ditangkap lagi setelah pidatonya untuk para pekerja pabrik goni (guni) di Narayangnj. Pemogokan negara diamati pada tanggal 7 Juni 1966 M untuk menuntut pembebasan Mujib dan tahanan politik lainnya.¹⁰³



Gambar 9

Pidato Mujibur Rahman atas permintaan 6-point
(Sumber Foto: [www.Father of the Nation.com](http://www.FatheroftheNation.com))

Dengan dipenjarakan Mujibur Rahman, tuntutan otonomi makin berkembang sehingga pada tanggal 7 Januari 1968 M, Mujibur Rahman dan 28 orang

¹⁰³Diakses pada 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.

lainnya dituduh mengilhami pemisahan Pakistan Timur termasuk P.N. Ojha (Wakil Komisaris Tinggi India di Dacca) dijebloskan ke dalam penjara (*Argatala Conspiracy Trial*). Karena gagal dibuktikan para tertuduh justru menjadi pahlawan dan memperjuangkan hak-hak Pakistan Timur.

Pada tahun 1968 M, pemerintah Pakistan melawan Mujibur Rahman dan 34 tentara militer Bengali. Mujibur Rahman dituduh sebagai dalang dalam kasus *Argatala Conspiracy* yang menyebabkan banyak orang ditangkap oleh pemerintah Pakistan. Selain itu, Mujibur Rahman juga dituduh bersekongkol dengan pemerintah Pakistan tentang rencana pemisahan dari negara Pakistan. Sejak itulah Mujibur Rahman menjadi terdakwa, ia ditahan di Dhaka barat. Setelah peristiwa tersebut, di seluruh provinsi mengadakan demonstrasi menuntut pembebasan Mujibur Rahman dan sidang terdakwa baru dimulai pada tanggal 19 Juni 1968 M di Dhaka barat.



Gambar 10
Mujibur Rahman di tangkap atas kasus *Argatala Conspiracy*
(Sumber Foto: www.Father of the Nation.com)

Sementara itu, dewan aksi mahasiswa sentral yang telah terbentuk sejak pada tanggal 5 Januari 1969 M berusaha untuk menekan permintaan atas 11 titik Mujibur Rahman. Dewan *The All-Party State Language* ini memaksa pemerintah Pakistan untuk menarik kasus *Argatala Conspiracy* dan melepaskan Mujibur Rahman dari penjara. Pada tanggal 22 Februari 1969 M, pemerintah pusat Bowditch membebaskan Mujibur Rahman dan terdakwa yang lainnya.¹⁰⁴

Peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Mujibur Rahman menjadikannya terpilih kembali menjadi Presiden Liga Awami pada pertemuan komite kerja pada tanggal 1 April 1970 M, memutuskan untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum yang dijadwalkan akhir tahun. Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 1969 M Mujibur Rahman memilih perahu sebagai simbol Pemilu partainya dan melalui kampanye Pemilu di Dhaka. Bertepatan pada tanggal 28 Oktober 1969 M, Mujibur Rahman berbicara tentang bangsa melalui radio dan televisi. Ia menyerukan kepada rakyat untuk memilih calon partainya yang akan melaksanakan tuntutan otonomi. Pemilihan umum diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 1970 M, Liga Awami dijamin memiliki suara sebanyak 167 dari 169 Kursi majelis nasional di majelis provinsi.

¹⁰⁴Diakses pada 28 Mei 2015 dari http://www.bhclondon.org.uk/Father_of_the_Nation.html.



Gambar 11
Pertemuan setelah kemenangan pemilihan umum pada 1970
(Sumber Foto: www.FatheroftheNation.com)

Pada tanggal 3 Januari 1971 M, Mujibur Rahman resmi terpilih menjadi presiden pertama di Pakistan Timur (Bangladesh). Ia mengucapkan sumpah kepada rakyat atas terpilihnya sebagai presiden ketika pertemuan di kursus ras tanah. Anggota Liga Awami mengambil sumpah tersebut untuk membingkai sebuah pemerintahan atas dasar permintaan tuntutan otonomi dan berjanji untuk tetap setia kepada orang-orang yang telah memilihnya.¹⁰⁵ Pada tanggal 5 Januari 1971 M, Zulfiqar Ali Bhutto yang merupakan pemimpin semua partai mengumumkan kesiapannya untuk membentuk pemerintah koalisi di pusat dengan Liga Awami.¹⁰⁶

¹⁰⁵Diakses pada 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.

¹⁰⁶Zulpikar Ali Bhutto adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk semua orang, baik bersifat demokrasi maupun sosial. Lihat artikel Hassan, *The Mirage of Power* (United Kingdom: Oxford University Press, 2000), h. 6.



Gambar 12

Pidato Mujibur Rahman atas Kemerdekaan Bangladesh

(Sumber Foto: Jalaluddin, Haider. 2010. *Bangladesh's Wuest For Closure: can the Execution of Mujib's Assassins Finally Deliver the Country from it's Darkest Chapter*. Drik: Majority World. h. 3.)

C. Ideologi Politik Mujibur Rahman

Bangladesh merupakan negara Islam, dikarenakan mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut Al-Maududi, negara Islam harus memiliki atas bahwa kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial-moral yang dibawa oleh para nabi. Kepercayaan itulah yang menjadi satu-satunya titik awal dari filsafat politik islam. Ajaran pokok Islam menyatakan bahwa manusia, secara individu dan kolektif harus memberikan semua haknya dan memimpin menetapkan aturan, dan melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya kepada sesamanya.

Sebuah negara Islam (Bangladesh), menurut Al-Maududi, harus memiliki karakteristik. *Pertama*, tak seorang pun, bahkan seluruh rakyat, dapat menggugat kedaulatan karena hanya Tuhan yang berdaulat, sedangkan manusia hanyalah subjek.

Kedua, Tuhan merupakan pemberi hukum sejati dan otoritas legislasi ada di tangannya. Sebuah komunitas tidak dapat berlindung kepada legislasi yang sepenuhnya mandiri. Juga, tidak dapat mengubah hukum yang telah diletakkan Tuhan, sekalipun tuntutan untuk mewujudkan legislasi atau perubahan hukum Ilahi ini telah diambil secara mufakat. *Ketiga*, negara Islam, dalam setiap hal, harus didirikan berdasarkan hukum yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Pemerintah menyelenggarakan negara itu diberi hak untuk ditaati dalam kemampuannya sebagai agen politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan sepanjang ia bertindak sesuai dengan kemampuannya. *Keempat*, negara Islam bersifat universal dan mencakup seluruh manusia. Dalam perspektif ini, negara Islam berusaha memberi bentuk dalam setiap aspek kehidupan kegiatan manusia sesuai dengan nilai-nilai moral dan rencana perubahan sosial.¹⁰⁷

Kelima, negara Islam bersifat ideologis. Jika keterangan Al-Qur'an dan Sunnah dikaji secara seksama, tampak sekali, bahwa negara dalam pandangan Islam berdasarkan ideologi dan tujuannya tiada lain adalah untuk melaksanakan ideologi itu. Jadi, negara merupakan alat pembaharuan yang karenanya ia harus melaksanakan perannya. Dalam kedudukan ini, sesuai dengan hakikatnya sebagai negara Islam, negara harus dikelola orang-orang yang dipercaya atau beriman kepada ideologi yang

¹⁰⁷Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1998), h. 158-165.

menjadi landasan dan juga beriman kepada hukum-hukum Allah yang wajib dilaksanakan oleh negara itu.¹⁰⁸

Al-Maududi mengemukakan komposisi dan struktur negara Islam. Menurut Maududi, dalam Islam hanya Allah yang memiliki kedaulatan. Kedudukan orang-orang untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi disebut sebagai wakil-wakil penguasa tertinggi. Dalam hubungan ini, Al-Quran menyatakan bahwa:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antaramu untuk mengangkat sebagai wakil-wakil-Nya yang berkuasa di bumi ini, sama seperti mereka yang telah diangkat-Nya di antara orang-orang yang hidup pada masa-masa sebelumnya.” (Q.S an-Nur 23:25).¹⁰⁹

Penjelasan diatas merupakan model negara Islam menurut Maududi yang berbeda dengan model yang diterapkan oleh Mujibur Rahman. Sedangkan menurut Mujibur Rahman tentang ideologinya adalah sebagai perubahan bangsa, setelah pemilihan umum (tahun 1970) dan terpilihnya Mujibur Rahman sebagai presiden Bangladesh. Pakistan Timur (negara Bangladesh) mendukung ideologi Mujibur Rahman yaitu Program Enam Butir, karena Mujibur Rahman telah memperjuangkan hak otonomi bagi Pakistan Timur. Program Enam Butir tersebut yaitu: (1) pembentukan pemerintahan federal yang bersifat parlementer lewat pemilihan umum yang langsung dan bebas, (2) pemerintah federal hanya mengawasi mengontrol urusan luar negeri dan pertahanan, (3) diberlakukannya sistem mata uang/kebijakan fiskal secara terpisah yang akan mendorong pertukaran modal dari timur ke barat atau

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 165-167.

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 168-169.

sebaliknya, (4) perpajakan akan diurus oleh provinsi dan pemerintah federal memperoleh dana dari provinsi, (5) setiap provinsi dapat mengadakan hubungan/perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain dan mengawasi alokasi pendapatan valuta asing, (6) setiap unit provinsi boleh memiliki milisi¹¹⁰(tentara) sendiri.¹¹¹

Menurut Undang-undang No. 60 (1 Januari 1970 M) yang berisi tentang memperbolehkan kembali kegiatan politik, dan mengizinkan rapat-rapat umum (sebelumnya tidak diberlakukan oleh pemerintah Pakistan). Selanjutnya, Yahya Khan dan para pemimpin Pakistan Barat mendukung Program Enam Butir Mujibur Rahman.¹¹²

Pada intinya ideologi Mujibur Rahman yang diterapkan setelah kemerdekaan Bangladesh memiliki tujuan utama yaitu keinginan untuk mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban, serta membangun negara itu sehingga setiap warga meyakini kemampuan-kemampuannya dan mau menyumbangkan kemampuannya itu demi kesejahteraan seluruh warga. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, adanya pemerintah pusat yang kuat mampu untuk mengambil keputusan dan melaksanakannya demi kepentingan dan kemajuan negaranya. Kemudian, untuk mengatasi persoalan yang ditemukan, seorang pemimpin yang kuat dan berpandangan luas sangat diperlukan. Pemimpin itu harus

¹¹⁰Milisi adalah orang yang menjadi prajurit karena memenuhi kewajiban masuk tentara. Lihat Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 281.

¹¹¹Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 192-193.

¹¹²B. Musidi, *India Sejarah Ringkas: dari Prasejarah sampai Terbentuknya Bangladesh*, h.189-190.

memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan sebagai kepala negara. Selain itu, elit penguasa dan pemerintah juga harus benar-benar berwibawa dan mampu menetapkan dirinya sebagai pelaksana aspirasi rakyat. Jelasnya, pemerintah harus lebih mencerminkan jiwa pengabdian yang murni, bukan semata-mata untuk berkuasa.¹¹³

Sementara itu, persoalan legislatif dalam Islam, pada dasarnya merupakan persoalan masyarakat sebagai satu-kesatuan. Dengan demikian, peranan yang harus dimainkan wakil-wakil rakyat yang duduk di badan legislatif adalah membuat undang-undang. Anggaran ulama bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibebankan kepada ulama tidak hanya keliru tetapi juga mengingkari kebenaran adanya proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah. Fakta historis mengindikasikan bahwa pihak yang berwenang untuk membentuk hukum Islam adalah para penguasa, bukan ahli-ahli fiqih. Meskipun begitu, nasihat yang diberikan oleh ulama tetap harus diakui dan diperlukan untuk menjelaskan beberapa istilah teknis di bidang perundang-undangan, agama, pemerintahan dan hukum. Untuk itu semua, keberadaan lembaga-lembaga yang bertugas mengelolanya sangat diperlukan. Jadi, tugas ulama bukanlah membuat undang-undang, melainkan menjalankan tugas sebagai pemimpin agama bagi masyarakat.

Tentang Islam demokrasi, Fazlur Haque Moni menyatakan bahwa negara Islam bisa dijatuhi sanksi oleh rakyatnya. Karena itu, negara Islam itu bersifat

¹¹³John J. Donohoque dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 481-482.

demokratis dalam arti yang seutuhnya. Demokrasi dapat mengambil bentuk yang beraneka ragam sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Di sebuah masyarakat Muslim yang ditandai oleh adanya lembaga pemerintahan yang terpusat secara ketat tidaklah tepat jika negara itu menggunakan demokrasi parlementer sehingga demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, tentang ide pemilihan langsung atau tidak langsung, sangat bergantung pada realitas dan kondisi masyarakat yang ada.¹¹⁴

Tugas utama negara adalah mengamankan terlaksananya hukum, ketertiban dan keamanan dalam negeri. Semua kekuatan yang secara potensial dapat mengganggu terlaksananya hukum, ketertiban atau membahayakan keamanan harus segera dilumpuhkan dengan berbagai macam cara. Kewajiban negara adalah menggunakan secara efektif daerah-daerah perbatasan dan menjamin keutuhan wilayah negara Islam tersebut.¹¹⁵ Sedangkan fungsi Dewan Penasihat Ideologi Islam pada masa Ayub Khan (Gubernur tentara militer) adalah: (1) membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang mungkin lebih baik bagi kaum Muslim untuk menyelesaikan kehidupan mereka dengan ajaran-ajaran Islam; dan (2) memberikan nasihat kepada pemerintah tentang perbuatan undang-undang yang bertentangan dengan Islam.¹¹⁶

¹¹⁴Abd. A'la, "Islam sebagai Faith in Action: Menguak Liberalisme Teologi Fazlur Rahman", dalam *Akademika Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVI No. II (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005), h. 59.

¹¹⁵Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, *Islam di Asia Selatan*, (Bandung: Humaniora, 2006), h. 266-268.

¹¹⁶*Ibid.*, h. 272-273.

BAB IV

PERAN MUJIBUR RAHMAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BANGLADEH

A. Kondisi Sosial Politik sebelum Terbentuknya Negara Bangladesh

Dalam bidang politik sejak negara Islam Pakistan merdeka, sudah terdapat gejala dan tanda ketidakpuasan dari orang-orang Bengali. Akar ketidakpuasan ini terletak pada kenyataan bahwa jumlah penduduk Bangladesh 54% dari seluruh penduduk Pakistan. Namun dominasi politik berada di tangan orang-orang Pakistan Barat, khususnya orang-orang Punjab. Ketidakpuasan orang-orang Bengali juga muncul ketika pemimpin Partai Liga Muslim (*The Muslim League*) Bengala sebelum kemerdekaan, yaitu Husain Shaheed Suhrawardy, tidak dipilih sebagai ketua menteri (*the chief minister*= gubernur) Provinsi Pakistan Timur. Justru yang diangkat adalah Khwaja Nazimuddin, orang Pakistan Barat yang berbahasa Urdu. Suhrawardy kemudian keluar dari partai Liga Muslim dan pada tahun 1949 M, kemudian mendirikan Partai Liga Awami (*The Awami League*). Partai ini segera menjadi populer di kalangan rakyat Pakistan Timur karena memperjuangkan nasionalisme orang-orang Bengali.¹¹⁷

Kondisi sosial politik Mujibur Rahman identik dengan permasalahan negara. Mujibur Rahman mulai bergabung dengan Liga Muslim (di Bengal) pada tahun 1943 M yang dipimpin oleh Husain Shaheed Suhrawardy dan Maulana Bhashani. Ketika itu, ia terpilih sebagai Sekertaris di partai dan kemudian menjadi Sekertaris Jenderal. Sementara itu, di Universitas Dhaka ia mendirikan Liga Mahasiswa Muslim Pakistan

¹¹⁷Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 192.

Timur (1943 M). Selain itu, kegiatan politik yang dilakukan oleh Mujibur Rahman yakni pada tahun 1954 M ia terpilih menjadi anggota DPR di Pakistan Timur dengan jabatan sebagai Menteri Pertanian. Prestasi politik lainnya ditunjukkan pada tahun 1956 M, ketika ia bergabung dengan sebuah pemerintahan koalisi dengan jabatan sebagai Menteri Perdagangan dan Industri.¹¹⁸

Sementara itu, dominasi politik orang-orang Pakistan Barat juga merambah dalam bidang administrasi/pemerintahan, di mana terdapat ketidakseimbangan proporsi yang menjadi pejabat sipil, militer dan keanggotaan parlemen. Sebagai contoh, pejabat militer angkatan bersenjata Pakistan yang berasal dari orang-orang Bengali, hingga akhir 1960-an, hanya berjumlah sekitar 6%. Hampir seluruh pejabat tinggi yang ada di Pakistan Timur berasal dari Pakistan Barat. Sebaliknya hampir tidak ada satupun pejabat Pakistan Barat yang berasal dari Pakistan Timur. Ini jelas menimbulkan kebencian/kecemburuan sosial di kalangan orang-orang Bengali (mengenai kebencian orang-orang Bengali terhadap dominasi orang-orang Pakistan Barat, terutama Punjab).¹¹⁹

Dalam segi ekonomi, hingga tahun 1960-an, ekspor Pakistan (antara lain komoditi jute, kain katun, hasil-hasil pertanian dan manufaktur) sebagian besar disumbang oleh Pakistan Timur. Akan tetapi alokasi pembangunan terfokus di Pakistan Barat. Ini berarti Pakistan Timur menjadi tulang punggung perekonomian Pakistan, tetapi kurang terdapat pemerataan hasil-hasil pembangunan karena sebagian

¹¹⁸Diakses pada 28 Mei 2015 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Mujibur_Rahman.html.

¹¹⁹Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 193.

terbesar dana terserap di Pakistan Barat. Ketidakadilan ekonomi ini juga melanda bidang industri, investasi, dan perbankan. Sebagai contoh, dana bantuan luar negeri sekitar 70% dipusatkan untuk pembangunan Pakistan Barat, sementara Pakistan Timur yang penduduknya lebih padat hanya mendapat sisanya ($\pm 30\%$). Keluhan orang-orang Pakistan Timur terhadap dominasi perekonomian Pakistan Barat hanya dijawab oleh penguasa Pakistan Barat, yaitu: 1) sumber-sumber ekonomi Pakistan Timur, selain jute dan kertas, tidak menarik investor, dan 2) hasil-hasil devisa sebagian besar digunakan di Pakistan Barat untuk keperluan infrastruktur pemerintah, termasuk militer/angkatan bersenjata.¹²⁰

Fakta membuktikan bahwa orang-orang Pakistan Timur dengan saudara mereka di Pakistan Barat diikat oleh persamaan ideologis, yakni sama-sama beragama Islam. Tetapi persamaan agama saja terbukti tidak cukup untuk mempertahankan keutuhan negara. Hal ini karena secara lebih mendasar dalam bidang sosial-budaya, terdapat perbedaan yang cukup riil antara orang-orang Pakistan Timur dengan orang-orang Pakistan Barat. Contohnya adalah soal bahasa yang dapat dianggap sebagai simbol sosial-budaya. Jika di Pakistan Barat bahasa Urdu menjadi bahasa *lingua franca* utama, sedangkan di Pakistan Timur penduduknya menggunakan bahasa Bengali. Bahasa Urdu dan bahasa Bengali mempunyai perbedaan, meskipun sama-sama dalam huruf Arab. Bahasa Urdu sebagian besar

¹²⁰*Ibid.*, h. 194.

kosakatanya disumbang oleh bahasa Arab dan Persia, sebaliknya bahasa Bengali yang ditulis dalam huruf praktis, kosakata yang dominan tetap bahasa Sansekerta.¹²¹

Kebijakan pemerintah pusat di Karachi mengenai soal bahasa resmi juga menimbulkan ketidaksenangan orang-orang Pakistan Timur. Sejak masa Muhammad Ali Jinnah masih hidup,¹²² bahasa Urdu telah ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dan yang menentang ketetapan ini dianggap sebagai musuh negara Pakistan. Memang pada tahun 1954 M, Majelis Konstituante Pakistan merevisi ketetapan tersebut dengan keputusan bahasa Urdu dan bahasa Bengali, keduanya akan menjadi bahasa nasional Pakistan. Akan tetapi, keputusan ini tidak mengurangi kesenjangan antara orang-orang Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Selain soal bahasa, banyak orang Pakistan Barat yang menuduh orang Pakistan Timur sebagai kurang Islami karena tradisi Hindu sebagian masih dipakai.¹²³

Pada tanggal 6 Januari 1970 M, Mujibur Rahman terpilih menjadi Presiden Liga Awami atas kemenangan dalam pemilihan demokratis Pakistan. Partai Liga Awami di pertemuan Komite kerja pada tanggal 1 April 1970 M memutuskan untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum yang akan dijadwalkan akhir tahun ini.¹²⁴ Dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 1970 M,

¹²¹*Ibid.*, h. 194.

¹²²Muhammad Ali Jinnah lahir di Karachi pada hari ahad tanggal 25 Desember 1876 M dan meninggal pada tanggal 11 September 1948 M. Lihat Mustafa Mu'min, *Qasama al A'amam al-Islami al-Ma'ashir*, (Berikut: Dar-al-Fiqh, 1974), h. 1. Muhammad Ali Jinnah adalah seorang politikus muslim India dan pemimpin Liga Muslim India yang mendirikan Negara Islam Pakistan, serta menjabat sebagai gubernur jenderal yang pertama. Lihat Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 152.

¹²³Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 194-195.

¹²⁴Diakses pada 28 Mei 2014 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.

Partai Liga Awami pimpinan Mujibur Rahman, memenangkan suara sebanyak 160 kursi dari 162 kursi yang tersedia, di Provinsi Pakistan Timur. Sedangkan di Pakistan Barat yang tersedia dalam 4 provinsi (*Punjab, Sind, North West Frontier Province dan Baluchistan*), Partai Rakyat Pakistan (*The Pakistan People's Party*) pimpinan Zulfikar Ali Bhutto, meraih kemenangan dengan 81 kursi yang tersedia. Sementara untuk tingkat provinsi, Liga Awami memenangkan 188 kursi dari 300 kursi.¹²⁵

Dengan hasil kemenangan ini, Mujibur Rahman menuntut hak untuk menyusun konstitusi baru atas dasar 6 pasalnya dulu dan hak untuk membentuk pemerintahan/kabinet Pakistan. Akan tetapi, tuntutan ini ditolak oleh rezim militer Presiden Yahya Khan. Akibatnya, Mujibur Rahman mengubah strategi dengan menuntut pemisahan diri dari Pakistan dan membentuk negara sendiri yang disebut Bangladesh. Selanjutnya, timbul kerusuhan dalam skala luas sejak awal Maret 1971 M di Pakistan Timur. Pertempuran mulai pecah antara tentara Pakistan dengan para pendukung Liga Awami, terutama setelah para pemimpin Liga Awami (termasuk Mujibur Rahman) ditangkap oleh tentara Pakistan dan dipenjarakan. Perjuangan Mujibur Rahman akhirnya memuncak menjadi perang kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Mayor Ziaur Rahman.¹²⁶

Perang pembebasan Bangladesh adalah untuk kemerdekaan dari Pakistan. Alasan untuk perang antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat tetap bersatu karena agama mereka, Islam. Pakistan Barat memiliki 97% Muslim dan Pakistan Timur

¹²⁵Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 195-196.

¹²⁶*Ibid.*, h. 196.

memiliki 85% Muslim.¹²⁷ Jalannya perang pembebasan kemerdekaan pada tahun 1971 M (disebut perang saudara) di Pakistan Timur berubah ketika India campur tangan dengan mengirim pasukan untuk membantu kaum nasionalis Bengalis, pada November 1971 M. Hanya dalam waktu sekitar satu bulan, tentara Pakistan berhasil dilumpuhkan oleh kekuatan gabungan tentara India dan kaum nasionalis Bengali.

Pada 16 Desember 1971 M, tentara Pakistan terpaksa menyerah kepada kekuatan gabungan tersebut. Hal ini berakibat pemerintahan rezim militer Yahya Khan di Pakistan runtuh dan Bangladesh menjadi negara tersendiri, yang merdeka dan berdaulat. Alasan India melakukan intervensi di Pakistan Timur adalah India dinyatakan sebagai musuh bebuyutan Pakistan sejak awal kemerdekaan. India berharap bahwa dengan berdirinya Bangladesh kekuatan Pakistan akan semakin melemah. Di samping itu, karena adanya jutaan pengungsi Bengali yang berdatangan ke India, sehingga India harus menghentikan arus pengungsian dan mengembalikan mereka segera setelah Bangladesh berhasil didirikan.¹²⁸

Pada tanggal 26 Maret 1971 M, Mujibur Rahman resmi menandatangani deklarasi untuk kemerdekaan Bangladesh. M.A. Hannan, seorang pemimpin Liga Awami, dikatakan telah menjadi orang pertama yang membacakan dan mengumumkan Deklarasi Kemerdekaan lewat siaran radio. Peristiwa politik mendekati klimaks, yakni perang antara tentara Pakistan dan pejuang Bengali kebebasan. India memberikan perlindungan bagi para pengungsi dan melatih tentara

¹²⁷Diakses pada 28 Mei 2015 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Mujibur_Rahman.html.

¹²⁸Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 196-197.

Pakistan. Para tentara India, angkatan Udara dan angkatan Laut mengalahkan tentara Pakistan, sementara Bangladesh membantu India. Pakistan mencoba melawan, namun gagal untuk melawan mereka. Bangladesh akhirnya memperoleh kemenangan pada tanggal 16 Desember 1971 M, yang ditandatangani oleh Jenderal Niazi dan komandan India Umum Aurora pukul 16.31 di India, yang menyatakan bahwa Bangladesh dibebaskan dan merdeka.¹²⁹

B. Kondisi Sosial Politik setelah Terbentuknya Negara Bangladesh

Kelahiran negara Bangladesh pada tahun 1971 M adalah zaman dalam post-kolonial urutan Asia Selatan. Munculnya Bangladesh sebagai negara sekuler independen secara efektif menghancurkan “teori dua bangsa” yang telah terbentuk atas penciptaan Pakistan pada tahun 1947 M dan menunjukkan bahwa agama sendiri tidak cukup untuk menempa identitas nasional yang kohesif (berhubungan). Negara Bangladesh adalah produk dari Bengali Nasionalisme yang muncul untuk menentang Pakistan Barat atas eksploitasi ekonomi dari sayap Timur yang berupaya untuk melaksanakan hegemoni agama.¹³⁰

Pada tanggal 8 Januari 1972 M, Mujib melakukan perjalanan ke London. Di London Mujib bertemu dengan Perdana Menteri Edward Heath. Dalam perjalanan pulang dari London Mujib memiliki perhatian di New Delhi, di mana ia diterima oleh

¹²⁹Alburuj Razzaq Rahman, *Bangladsh Liberation War, 1971*, h. 2-3.

¹³⁰Bangladesh adalah untuk pembebasan yang menyebabkan pondasi negara Bangladesh memiliki empat pilar, yakni sekulerisme, sosialisme, demokrasi dan nasionalisme. Lihat Sanjay K. Bhardwaj, *Contesting Identities in Bangladesh: A Study of Secular and Religious Frontiers*, (London: Asia Research Center, 2010), h. 1.

Presiden India VV Giri dan Perdana Menteri Mahatma Gandhi.¹³¹ Selanjutnya, Mujibur Rahman datang ke Dhaka pada tanggal 10 Januari 1972 M, sedangkan pada tanggal 6 Februari 1972 M, Mujibur Rahman meninggalkan Dhaka untuk melakukan kunjungan ke India atas undangan pemerintah India, setelah dua puluh empat tahun otoritas Universitas Dhaka. Pada tanggal 1 Maret 1972 M, ia pergi ke Uni Soviet untuk kunjungan resmi. Tentara India sekutu meninggalkan Dhaka pada tanggal 17 Maret 1972 M atas permintaan Mujibur Rahman. Selanjutnya pada 26 Maret 1972 M, Mujibur Rahman mengambil alih kepemilikan semua aset milik negara Pakistan yang telah meninggalkan Bangladesh setelah perang kemerdekaan.¹³²

Setelah Bangladesh mendapat pengakuan dari negara-negara besar (seperti Amerika Serikat, Inggris, Eropa) Mujibur Rahman membantu Bangladesh masuk ke dalam PBB dan Gerakan Non-Blok. Ia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dan perkembangan bagi bangsa. Ia menandatangani perjanjian persahabatan dengan negara India, yang menjanjikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan yang luas dan mulai melatih pasukan keamanan Bangladesh dan personil pemerintah. Mujibur

¹³¹Mahatma Gandhi nama aslinya Mohandas Karamchand Gandhi, lahir di Porbandar, Gujarat, India Britania, pada tanggal 2 Oktober 1869. Lihat Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 147. Mahatma Gandhi meninggal di New Delhi, India pada 30 Januari 1948 M diusia 78 tahun. Mahatma Gandhi (bahasa sansekerta: jiwa agung) adalah seorang pemimpin spritual dan politikus dari India. Lihat Tri Rahayu Ningsih, *Pengaruh Ajaran Mahatma Gandhi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011), h. 1.

¹³²Diakses pada 28 Mei 2015 dari http://en.wikipedia.org/windex.php?title:Assassination_of_Sheikh_Mujibur_Rahman.

Rahman menjalin hubungan persahabatan dengan Mahatma Gandhi.¹³³ Di sisi lain Mujibur Rahman didakwa parlemen, yakni untuk menulis konstitusi baru dan menyatakan empat dasar. Empat dasar tersebut adalah nasionalisme, sekulerisme, demokrasi, dan sosialisme (dikenal sebagai Mujibisme).¹³⁴

Pada tahun 1973 M, sebuah konstitusi diproklamasikan yang mengakibatkan Mujib dan partainya memperoleh kekuasaan dengan mayoritas mutlak. Selanjutnya ia digariskan pada program negara untuk memperluas (difokuskan investasi negara dalam pertanian, infrastruktur pedesaan dan industri rumahan) di seluruh negeri.¹³⁵

Pada tanggal 16 Desember tahun 1974 M merupakan hari peringatan pembebasan kemerdekaan Bangladesh III, namun Bangladesh mengalami bencana kelaparan yang menyebabkan kematian, sehingga menewaskan sekitar 30.000 orang di Bangladesh. Permasalahan Bangladesh kelaparan merupakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Mujibur Rahman. Sedangkan pada tanggal 15 Agustus 1975 M adalah hari paling hitam dalam kehidupan nasional, yakni dikenal sebagai Hari Berkabung Nasional. Pada tanggal tersebut telah terjadi peristiwa pembunuhan di

¹³³Mahatma Gandhi dapat dianggap sebagai salah seorang tokoh yang paling penting terlibat dalam gerakan yang memperjuangkan India. Lihat Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 148. Mahatma Gandhi adalah seorang aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Lihat Tri Rahayu Ningsih, *Pengaruh Ajaran Mahatma Gandhi*, h. 2.

¹³⁴Sekularisme adalah paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu di dasarkan pada ajaran agama, sosialisme adalah ajaran atau paham kenegaraan yang berusaha supaya menjadi milik negara, demokrasi adalah pemerintahan rakyat dan nasionalisme adalah paham yang bertumpu pada negara tetapi tidak bermaksud mendirikan negara. Lihat Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), h. 468, 499, 119 dan 333.

¹³⁵Diakses pada 28 Mei 2015 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Mujibur_Rahman.html.

kediaman Mujibur Rahman yang dikenal dengan politik pembunuhan, kudeta dan konspirasi.¹³⁶

C. Kontribusi Politik Mujibur Rahman

Peran Mujibur Rahman dalam pembentukan negara Bangladesh adalah sebagai pemimpin mahasiswa, sebagai sekretaris jenderal dan sebagai presiden Bangladesh. Adapun penjelasannya peran Mujibur Rahman dalam pembentukan negara Bangladesh adalah sebagai berikut:

1. Mujibur Rahman sebagai Pemimpin Mahasiswa

Pada tahun 1939 M, Mujibur Rahman dinyatakan sebagai seorang pemimpin dari sekelompok mahasiswa misionaris di Gopalganj. Ia terkenal sebagai mahasiswa yang pandai sehingga banyak yang ia lakukan dalam bidang politik dan dia dikenal pada masyarakat Pakistan Timur memiliki sifat sosialitas terhadap lingkungannya. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Mujibur Rahman ketika menjadi pemimpin mahasiswa adalah memperhatikan dunia pendidikan.¹³⁷

2. Mujibur Rahman sebagai Sekretaris Jenderal

Pada tanggal 9 Juni 1953 M, Mujibur Rahman terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Liga Awami di Pakistan Timur yang menjabat sebagai anggota dewan.¹³⁸

Usaha yang dilakukan ketika Mujibur Rahman sebagai pemimpin yaitu menginginkan

¹³⁶Diakses pada 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.

¹³⁷Penjelasan detail pembahasan tentang Mujibur Rahman sebagai pemimpin mahasiswa telah diurai dalam BAB III pada halaman 52-53.

¹³⁸Diakses pada 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.

kesejahteraan masyarakat di Bangladesh dengan cara melindungi masyarakat muslim dan berusaha menahan pertikaian agar tidak terjadi kekerasan. Usaha yang dilakukan pertama kali adalah mengadakan kunjungan ke departemen hukum dan menjalin komunikasi dengan mahasiswa dan para pemimpin politik di Universitas Dhaka. selanjutnya, pada tahun 1955 M Mujibur Rahman terpilih menjadi anggota dewan Legislatif Liga Awami pada bulan Juli 1955 M dan sepuluh tahun kemudian tepat pada bulan Maret 1966 M, Mujibur Rahman terpilih sebagai Presiden Liga Awami,¹³⁹

3. Mujibur Rahman sebagai Presiden Bangladesh

Usaha yang dilakukan ketika Mujibur Rahman menjadi presiden adalah ia menjadi pemimpin partai Liga Awami (*The Awami League*), sepeninggalan wafatnya Husain Shaheed Suhrawardy. Selanjutnya, pada tahun 1972 M Mujibur Rahman menulis konstitusi baru. Sejarah politik Mujibur Rahman ketika menjadi presiden Bangladesh ada pada dokumen-dokumen, misalnya dokumen *US Declassified Documents, Congressional Records, Research Study by Bureau of Intelligence and Research, the pages of The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Baltimore Sun and The LA Times*. Dokumen-dokumen inilah yang menjadi bukti jelas mencerminkan bahwa deklarasi kemerdekaan Bangladesh diberikan oleh Sheikh Mujibur Rahman pada tanggal 26 Maret 1971 M.¹⁴⁰ Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹³⁹Penjelasan detail pembahasan tentang Mujibur Rahman sebagai sekretaris jenderal dengan jabatan anggota dewan telah diurai dalam BAB III pada halaman 54-61.

¹⁴⁰Muhammad, M. Rahman Jalal, *The Sheikh Mujib Declaration of Independence of Bangladesh: U.S. Government Records and Media Documentation*, (Los Angeles: Latimes, 1971), h. 2.

a. Dokumen US Declassified Documents

**DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY
OPERATIONAL INTELLIGENCE DIVISION
DI-2
DIA SPOT REPORT**

Date: 26 March 1971

Time: 3: 55 PM

SUBJECT: CIVIL War in Pakistan

REFERENCE:

1. Pakistan was thrust into civil war today when sheikh mujibur rahman proclaimed the east wing of the two-part country to be "the sovereign independent people's republic of bangladesh". Fighting is reported heavy in Dacca and other eastern cities where the 10,000 man paramilitary east pakistan rifles has joined police and private citizens in conflict with an estimated 23,000 west pakistani regular army troops. Continuing reinforcements by sea and air combined with the government's stringent martial law regulations illustrate islamabad's difficult situation, the attempt will probably fail, but not before heavy loss of life results.
2. Indian officials have indicated that they would not be drawn into a pakistani civil war, even if the east should ask for help. Their intentions might be overruled, however, if the fever of bengali nationalism spills across the border.
3. Sheikh mujibur rahman is little interested in foreign affairs and would cooperate with the united states if he could. The west's violent suppression, however, threatens to radicalize the east to the detriment of US interests. The crisis has exhibited anti-American facets from the beginning and both sides will find the United States a convenient scapegoat.

DISTRIBUTION:

White House Sit Room (LDX)

Dept of State RCI (LDX)

Djr of CIA Opns Cen (LDX)

Sec Def

Asst Sec Def, ISA

Asst Sec Def, PA

Asst Sec Def, ADMIN

Chairman, JCS (CAPT TRAIN)

Chairman, JCS (Mr. KEARNEY)

Asst To Staff

Djr, J-3

Djr, J-5

JCS (ACSAN) Rm 10929¹⁴¹

RELEASED BY: Joh Pavelle, JR

Captain, USN

DI-4/71564

PREPARED BY: John B. Hunt

Major, USA

DI-4A3/25009

DECLASSIFIED

E.O. 12953, Sect 3.6

¹⁴¹*Ibid.*, h. 2

Dokumen ini menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Maret 1971, pukul 3:55 PM dengan topik: Perang Sipil di Pakistan. Pakistan menolak kedalam perang saudara ketika Sheikh Mujibur Rahman menyatakan sayap timur menjadi “Republik Rakyat Bangladesh”. Di dalam dokumen ini menekankan ada perkelahian di Dacca antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur, di mana 10.000 orang para militer Pakistan Timur telah bergabung dengan polisi dan warga. Sedangkan pasukan tentara Pakistan Barat berjumlah 23.000 orang. Pejabat India tidak akan terlibat dalam perang saudara Pakistan, meskipun Pakistan Timur meminta bantuan. Sheikh Mujibur Rahman menjalin kerjasama dalam urusan luar negeri dengan negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat.

b. Dokumen Research Study Bureau of Intelligence and Research

Department of State
TELEGRAM

Date: 31 April 1971
Time: 11: 55 PM

ACTION: Amembassy COLOMBO
Amembassy KABUL
Amembassy KATHMANDU
Amembassy RANGOON
Amembassy BANGKOK
Amembassy TEHRAN
Amembassy ROME

Amembassy MANILLA
USINT KHARTOUM

STATE

1. Following message summarizes recent developments in East Pakistan: The situation in East Pakistan deteriorated sharply the night of March 25-26 after Presiden Yahya broke off negotiations with Mujibur Rhman and flew back to Islamabad. A series of stringent martial law regulations were promulgated in East Pakistan, including a ban on all political activities and the imposition of a 24-hour curfew, and troops moved rapidly and ruthlessly, including the use of tanks, to

take control of Dacca. In a nationwide broadcast on March 26, Yahya branded Mujibur a traitor, prohibited political activity in both wings and proscribed the Awami League.

2. Meanwhile those Awami League leaders who were able to escape went underground and a clandestine radio began to broadcast of the QUOTE sovereign and independent People's Republic of Bangla Deshuunquote made in the name of Mujib. The Martial Law Administration, however claims to have arrested Mujib and his leading lieutenants the night of March 25-26, and their failure to surface publicly thus far lends credence to this claim. On March 27 the clandestine radio announced the formation of a revolutionary army and a provisional government under the leadership of a QUOTE Major Zia Khan UNQUOTE.
3. There continue to be conflicting reports on the actual situation in East Pakistan although the city Dacca remains relatively quiet. With strict press censorship and the expulsion of foreign newsmen from East Pakistan hard news is difficult to come by. Eyewitness reports of the killing by the Pak Army of large numbers of Bengali students, intellectuals, police, Awami League Leaders, slum dwellers and members of the Hindu minority continue in. They have already been given prominence in the American press. Further reports may be expected as foreigners leave East Pakistan.
4. Claims regarding the situation put forward by martial law and Bengali sources differ widely, although even Radio Pakistan has now reported that QUOTE miscreants UNQUOTE have been active in Chittagong and Khulna. A Japanese wire service reported that Chittagong was the scene of civilian-military QUOTE conflagrations UNQUOTE Monday night, citing radio contact with Japanese ship anchored in the harbor as its source. Indian wire services continue to report widespread fighting in many places, as well as the arrival of aircraft and tanks from the West wing.
5. Europeans, mostly dependents of Yugoslav technicians evacuated from Dacca March 31, have said that the Pakistan Army appears to be firmly in control of the city and that some shops were opening. A Yugoslav foreign office official accompanying the group said the situation in Dacca has improved but is not yet normal. He also reports the Yugoslav Consul General has been unable to establish telephone contact with technicians in the ports of Chittagong and Clalna.¹⁴²

Pada dokumen ini menjelaskan bahwa perkembangan terakhir di Pakistan Timur dinyatakan situasinya sedang memburuk. Pada tanggal 25-26 Maret 1971 M, setelah Presiden Yahya memutuskan perundingan dengan Mujibur Rahman untuk

¹⁴²*Ibid.*, h. 4-6.

terbang kembali ke Islambad. Serangkaian peraturan darurat militer yang ketat telah diumumkan di Pakistan Timur, adanya larangan semua kegiatan politik. Dalam siaran nasional pada tanggal 26 Maret 1971 M, Yahya menyatakan bahwa Mujibur Rahman adalah penghianat, dimana Mujib dilarang dalam kegiatan politik di kedua sayap (Pakistan Barat dan Pakistan Timur) serta dilarang bergabung dengan Liga Awami. Sementara itu, para pemimpin Liga Awami yang mampu melarikan diri lewat jalan bawah tanah dan radio klandestin mulai menyiarkan dari penerbit bahwa kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh dibuat atas nama Mujib.

c. Dokumen Congressiobal Record

CONGRESSIONAL RECORD – SENATE
EXTENSIONS OF REMARKS **July 28, 1971**

PROCLAMATION OF INDEPENDENCE OF BANGLADESH
BY: HON. SEYMOUR HALPERN
OF NEW YORK
IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

Mr. Halpern, Mr. Speaker, as you know from my statements and from the resolutions and statutes I have intruced, I continue to be much concerned with the refugee problem of the Bengali people in the area known as East Pakistan.

My primary concern is the famine and cholera problem facing these refugees and the express desire to prevent the shipment of American arms to Pakistan. i would like to call you attention to certain political activities which are taking place in that area. While I do not recommend that any action be taken at this time, I think it well for us to be apprised of the fact that East Pakistan has declared it's indepancence as the new nation of Bangladesh. pakistan, as an entity, had 130million. In West Pakistan there are 55 million. The Bengali in what was East Pakistan numbered 75 million. If the new nation of Bangladesh translated, this means "Bengali homeland" become independent now it will be the eighth largest nation in the world. only China, India, the Soviet Union, the United States, Indonesia, Japan, and Brazil have more people.

Profil Albert P. Blaustein professor of law at Rutgers University, has procured from the Bangladesh in Calcutta a copy of the Bangladesh Declaration of Independence proclaimed on April 10, 1971. The text of that declaration is a follow:

**PROCLAMATION OF INDEPENDENCE OF BANGLADESH, APRIL
10, 1971**

Whereas free elections were held in Bangladesh from December 7, 1970 to January 17, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution and whereas at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League, and Whereas Gen. Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd of March, 1971, for the purpose of framing a Constitution, and whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for an indefinite period, and whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh Pakistan authorities started an unjust and treacherous war, and whereas in the facts and circumstance of such treacherous conduct, Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 millions of people of Bangladesh, in due fulfillment of the legitimate right of self determination of the people of Bangladesh duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh, and whereas in the conduct of a ruthless and savage war, the Pakistani authorities committed and are still committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others, on the civilian and unarmed people of Bangladesh, and whereas the Pakistan Government by carrying on an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government, and whereas the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh.

We the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme, on this day of April 10, 1971, duly constitute ourselves into a Constituent Assembly, and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice, declare and constitute Bangladesh to be an Sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, and do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice President of the Republic, and that the President shall be the Supreme Commander of all the armed forces of the Republic and shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon, shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary, shall have the power to levy taxes and expend moneys, shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just Government.

We the elected representatives of the People of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to

enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason what soever, the Vice President shall have and exercise all the powers, duties, and responsibilities herein conferred on the President. We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations devolved upon us as a member of the family of nations and by the Charter of the United Nation. We further resolve that this proclamation of Independence shall be deemed to have come into effect since 26th day of March 1971. To give effect to this our resolution, we further authorize and appoint Prof. M. Yusuf Ali, our duly constituted Potentiart to give to the President and Vice President oaths of office.¹⁴³

Dokumen ini berisikan tentang proklamasi kemerdekaan dari Bangladesh pada tanggal 28 Juli 1971 M oleh Hon Seymour di New York. Prof. Albert P. Blaustein adalah Profesor Hukum di Universitas Rutgers, mendapatkan laporan dari Bangladesh di Calcutta mengenai salinan Deklarasi Kemerdekaan Bangladesh yang diproklamasikan pada tanggal 10 April 1971 M. Inti dari isi proklamasi Kemerdekaan dari Bangladesh pada tanggal 10 April 1971 M adalah ketika dalam Pemilihan Umum di Bangladesh yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 1970 M samapai 17 Januari 1971 M, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang bertujuan untuk mendingkat konstitusi. Dalam Pemilihan Umum ini partai Liga Awami terpilih sebanyak 167 dari 169 kursi majelis Nasional di Majelis Provinsi. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, pemimpin tak terbantahkan dari 75 juta orang Bangladesh karena ia memiliki hak yang sah dari penentuan nasib sendiri rakyat Bangladesh sepatutnya membuat deklarasi kemerdekaan rakyat Bangladesh untuk membela kehormatan dan integritas Bangladesh.

Pada 10 April 1971 M, pemerintah revolusioner dari Bangladesh yakni Mujibur Rahman membentuk Majelis Konstitusi. Dimana Mujib memastikan nasib

¹⁴³*Ibid.*, h. 7.

bagi rakyat Bangladesh atas kesetaraan martabat manusia dan keadilan sosial. Selain itu, pada hari yang sama menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Bangladesh. Sedangkan pada tanggal 17 April 1971 M, pemerintah revolusioner mengambil sumpah jabatan di Meherpur, yang dikenal sebagai Mujibnagar. Mujibur Rahman terpilih sebagai Presiden, Syed Nazrul Island sebagai wakil Presiden, dan Ahmed Tazuddin sebagai Perdana Menteri.

d. Dokumen The Wall Street Journal

New York Times

New York, Saturday, March 27 1971

LEADER OF REBELS IN EAST PAKISTAN REPORTED SEIZED

NEW DELHI, Saturday, March 27 1971. The Pakistan radio announced today that Sheikh Mujibur Rahman, the national leader of East Pakistan had been arrested only hours after he had proclaimed his region independent and after open rebellion was reported in several cities in the East.

In a broadcast monitored here the radio. Quoting what it described as an official statement made in Dacca, said that Sheikh Mujibur was arrested early this morning at his home in Dacca.

The 51-year-old leader of the Awami League, the dominant party in the East, was arrested as the West Pakistan dominated army sought to reassert control in the East. Report reaching neighboring India indicated the army was gaining the upper hand in the battle that erupted yesterday between the army and East Pakistan citizens and militia.

Curfew Reported Lifted

The Pakistan radio reported that a 24-hour curfew imposed in Dacca yesterday was lifted for a nine-hour period this morning, indicating that the army was in control of the city.

United News of India said in a dispatch from the Indian border town of Agartala that the army had occupied the head quarters of the East Pakistani Rifles, the provincial militia. In Comilla district, after a prolonged fight.

The army was also reported to have occupied police stations in East Pakistan's Comilla and Noakhali districts. The agency said there were heavy casualties on both sides.¹⁴⁴

¹⁴⁴*Ibid.*, h. 8.

Dokumen ini menyatakan, bahwa laporan dari New York pada tanggal 27 Maret 1971 M, melaporkan tentang pemimpin pemberontak di Pakistan Timur. New Delhi, pada tanggal 27 Maret 1971 M, radio Pakistan menyiarkan bahwa Sheikh Mujibur Rahman pemimpin nasional Pakistan Timur menyatakan kemerdekaan.

e. Dokumen the pages of The New York Times

THE NEW YORK TIMES, SATURDAY, MARCH 27 1971

Leader of Rebels in East Pakistan Is Reported Seized
Continued From Page In Col. 8

Indian news dispatches quoting what they described as author hative sources in the area. Resident Agha Mohammad Yahya Khan, who flew back to west Pakistan late Thursday after the failure og his 11 days of negotiations with Sheikh Mujib, said in a broadcast: "I have orderred the armed decision to postpone the open forces to do their job and fullying of the National Assembly, restore the authority of the Government".

Accusing Sheikh Mujib of treason the President outlawed the Awami League East Pakistan's dominant political party, which in three weeks of striker and other prelest action had become in effect the regional government The: protest had been against President Yahya Khan's which the wami League dominated. The assembly was to have met March 3 to star drafting a constitution to return Pakistan to civilian rule.

The oresent rebellion erupted when the Pakistani Army moved to reimpose the authority of the mlitary Government, based in West Pakistan on the East. Indian news dispatches said the fighting was between troops from West Pakistani policemen and a paramilitary organization known as the East Pakistani Rifles on the other.

The Press Trust of India, this country's main news agency, reported that fighting was raging at Chittagong Comilia and Rangpur, as well as at Dacca. It said that at least 10.000 soldiers from West Pakistan had been transported to the East raising the total there to about 70.000.

Reports of fighting also came from what one Indian dispatch described as a clandestine radio station, presumably in the northern part of East Pakistan. this, it said was the some station that announced the prociation, Bangladesh, whose name is Bengali for the Bengal Nation.

The broadcast said that: those battling for East Pakistani indepence had surrounded West Pakistani troops in the cities of Sylhet, Jessore, Barisal and Khulna as well as in Crittagong and Comilia.

“Sheikh Mujibur Rahman is the only leader of the people of independence Bangladesh and his commands should be obeyed by all sections of people to save the country from the ruthless dictatorship of West Pakistanis”, the broadcast said.

It reiterated the Awami League’s decision to organize a strike throughout the eastern wing today to protest army attacks in the last few days that reportedly had resulted in the death of more than 100 civilians.

Curfew Is Announced

The first confirmation that the Government in West Pakistan had reasserted control of the East came, early yesterday when the Dacca radio went off the air briefly and the army authorities came on to announce a 24-hour curfew in Dacca and seven other districts in East Pakistan. The radio station had been under the control of the Awami League, which had seized it during the constitutional crisis.

Yesterday’s developments followed an announcement Thursday night of “a serious deadlock” in the talks between President Yahya Khan, Sheikh Mujib and Zulfikar Ali Bhutto, chairman of West Pakistan, the Pakistan People’s party.

President Yahya postponed the March 3 meeting of the National Assembly when Mr. Bhutto said his party, holding only a minority of the seats, would not attend. Opposing Sheikh Mujib’s demands for autonomy, Mr. Bhutto favored what he described as an effective central government.

Soon after the breakdown Thursday of the President’s talks with Sheikh Mujib, the martial-law administrator for East Pakistan, Lieut. Gen. Tikka Khan, began issuing a series of stringent orders to assert army control. The army seized the Intercontinental Hotel in Dacca and confined scores of foreign newsmen news dispatches, reports said.¹⁴⁵

Dokumen ini menjelaskan, bahwa laporan dari New York pada tanggal 27 Maret 1971 M, atas pemimpin pemberontak di Pakistan Timur. Presiden Yahya Khan menyatakan dalam siaran: “Saya telah disuruh atas keputusan bersenjata untuk menunda pasukan terbuka yang melakukan pekerjaan Majelis Nasional, yakni mengembalikan kewenangan Pemerintah.” Maksud dari idato Presiden Yahya Khan adalah menuduh Sheikh Mujibur Rahman sebagai penghianat, dan Mujibur Rahman dilarang untuk kegiatan partai politik yang dominan Liga Awami Pakistan Timur.

¹⁴⁵*Ibid.*, h. 9.

Namun, berita lain melaporkan bahwa pertempuran berkecamuk di Chittagong Comilia dan Rangpur, serta di Dacca dikatakan bahwa setidaknya 10.000 tentara dari Pakistan Barat diangkut ke Pakistan Timur sehingga mencapai total sekitar 70.000 tentara. Beberapa stasiun yang mengumumkan kemerdekaan Bangladesh yakni untuk Bengali. Siaran itu menyatakan bahwa: mereka berjuang untuk kemerdekaan Pakistan Timur, dimana telah dikepung oleh pasukan Pakistan Barat di kota-kota Sylhet, Jessore, Barisal, Khulna, Chittagong dan Comilia. Selanjutnya, memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Bangladesh akan dianggap berlaku sejak pada tanggal 26 Maret 1971 M.

f. Dokumen The Washington Post and The Baltimore Sun and The LA Times

PAKISTAN PLUNGES INTO CIVIL WAR

The main and his party are enemies of Pakistan, this crime will not-go unpunished. We will not allow some power hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny of 120 milion people.

President Mohammad Yahya Khan

Come out of your house with what ever weapons you have Resist the enemy forces at any cost, until the last enemy soldier is oanquished, and save the country from the rythless dictatorship of West Pakistan.

Sheikh Mujibur Rahman

Until the very last moment, it looked as if the two proud men entrusted with Pakistan's destiny might still be able to avert a head-on clash. From the East Pakistani capital President Mohammad Yahya Khan and Mujib as the leader of secessionist minded East Pakistan is know were about to reach a compromise. But then, with strunning suddenness, the pieces of Pakistan's complicated political puzzle flew apart. In the East Pakistani cities of Rangpur and Chittagong, federal swiftly deral troops poured machinegun fire into mobs of demonstrating Bengali nationalist. Swiftly, Yahya is sued orders to his army to "crush the movement and restore the full authority of the government". In his turn, Mujib proclaimed East Pakistan the "sovereign, independent People's Republic of Bangladesh (Bengal nation)". And with that, Pakistan was plunged into civil war.

Thus, in the 24th year of Pakistan's existence, the bond that had held the eastern and western sectors of the country in tenuous union anapped. Because

Pakistan's central government immediately imposed strict censorship on communications in and out of East Pakistan, early reports were sketchy. Still, even the fragmentary dispatches from neighboring India provided a dismal picture of bloody fighting that pitted a modern, professional army against rebels who were often armed with little more than passion and pitchforks. Hopelessly outgunned, the East Pakistani guerrillas reportedly suffered thousands of casualties. But although by the end of the week it appeared that the federal army—largely composed of fierce Punjabis—had dealt its Bengali adversary a devastating blow, few people thought that the widely separated wings of Pakistan could ever be effectively reunited again.

What made the Pakistani upheaval so unexpected was that it occurred even as Yahya and Mujib were in the midst of private negotiations. On hearing the reports of “massacres” in Rangpur and Chittagong, an enraged Mujib accused the army of unleashing a reign of terror. Yahya's response was to quit the talk in a huff and West Pakistan. Back in his home region, the President took to national radio to ban Mujib's Awami League, East Pakistan's dominant political organization. “Mujib's action of starting his non-cooperation movement is an act of treason,” the President declared.

Shortly after Yahya left Dacca, the army's tough martial-law administrator, Lt. Gen. Tikka Khan, slapped tight censorship over East Pakistan. All foreign correspondents were restricted to their hotels and then, after federal troops seized their notes and film, the reporters were expelled from the country. Among the correspondents forced to leave was Newsweek's Loren Jenkins, who filed this report.

From our windows in Dacca's modern Intercontinental Hotel, we watched a jeepful of soldiers roll up to a shopping center and taking aim with a heavy machine gun, open fire on a crowd. While the firing was still going on, some fifteen young Bengalis appeared in the street about 200 yards away and shouted defiantly at the soldiers. The youths seemed to be empty-handed, but the soldiers turned the marching gun on them anyway. Then, the federal soldiers moved down an adjacent alley leading to the office of a pro Mujib daily newspaper that had strongly denounced the army. The troops shouted in Urdu a language which few Bengalis understand warning anyone inside to surrender or be shot. No one emerged. So they blasted the building and set it afire. And when they emerged, they waved their hands in triumph and shouted “Pakistan Zindabad” (Long Live Pakistan).

By late in week, firing throughout the city was heavy and flashes of 105 mm, howitzers in the night preceded the heavy crump of incoming shells which seemed to be landing on the new campus of Dacca University. I woke up one morning to the sound of six Chinese-made T-54 light tanks clanging down Airport Road. A gray pall of smoke hung low over the muggy sky. Soon new artillery blasts were heard and new fires were seen in the region of Old Dacca, a warren of narrow open-sewer streets.¹⁴⁶

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 13.

Dokumen ini menjelaskan, bahwa Pakistan terjun ke perang sipil. Presiden Mohammad Yahya Khan dan Mujib sebagai pemimpin separatis sedang berdiskusi mengenai nasib Pakistan Timur. Di Rangpur dan Chittagong (Pakistan Timur), pasukan federal untuk menciptakan Bengali nasionalis. Dengan cepat, Yahya memberi perintah pasukannya untuk “menghancurkan gerakan dan mengembalikan kewenangan penuh dari pemerintah”. Pada gilirannya, Mujib menyatakan Pakistan Timur yang “berdaulat, mandiri Republik Rakyat Bangladesh (bangsa Bengal), dengan itu Pakistan Timur jatuh ke dalam perang saudara.

SATURDAY MORNING, MARCH 27, 1971

**CIVIL WAR FLARES as EAST PAKISTANIS CLAIM INDEPENDENCE
BY WILLIAM J. COUGHLIN**

New Delhi, Sheikh Mujibur Rahman declared independence for East Pakistan Friday as the long amoldering feud between the two wings of the Islamic nation flamed into apan civil war.

A clandestine radio broadeast monitored here from a station indetitying itself as “The Voice od Independent Bangladesh (Bengali homeland),” “the Sheikh has declared the 75 million people of East Pakistan as citizens of the govereign Independent Bangladesh”.

But the official Radio Pakistan announced today that Rahman was arrested only hours after he proclaimed East Pakistan Independence.

The radio, quoting an official announcement made in the East Pakistan capital of Dacca, said Rahman was taken into cuslody at his Dacca residence.

Reuters news agency quoted the Press Trust of India today as reporting that at least 20.000 civilians were killed in bilter fighting throughout East Pakistan Friday as government troops used tanks, artillery and machine guns against Rahman’s followers.

Radio reports reaching here reported heavy fighting between West Pakistani troops and the East Pakistani Rifles, loyal to Rahman.¹⁴⁷

¹⁴⁷*Ibid.*, h. 14.

Dokumen ini menyatakan, bahwa pada tanggal 27 Maret 1971 M oleh William J. Coughlin menulis yakni dari New Delhi, Sheikh Mujibur Rahman menyatakan kemerdekaan Pakistan Timur karena perseteruan panjang antara dua sayap dari negara Islam dinyalakan dalam perang sipil. Sebuah radio klandestin menyiarkan bahwa Mujib sebagai “*The Voice Independence Bangladesh* (Bengali tanah air)”, Sheikh Mujib menyatakan 75 juta orang Pakistan Timur sebagai warga Independen Bangladesh.

D. Faktor-faktor Pendorong Lahirnya Negara Bangladesh

Pada tahun 1950-an terjadi ketegangan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat yang menguasai kelompok militer dan pegawai sipil. Perpecahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni menjadi faktor-faktor lahirnya negara Bangladesh diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Geografis

Pada dasarnya wilayah Bangladesh terdiri atas bagian Bengala sebelah timur (Bengala Barat termasuk wilayah India), dan beribu kota di Dhaka. Ditinjau secara geografis letak antara Pakistan Barat dan Pakistran Timur sangat berjauhan dan jaraknya sejauh lebih dari 1.000 mil (\pm 1.600 km). Sehingga jalannya komunikasi antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur sulit untuk dilakukan.¹⁴⁸

¹⁴⁸Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 188.

2. Faktor Politik

Setelah pembunuhan perdana menteri pertama Pakistan Liaquat Ali Khan pada tahun 1951 M,¹⁴⁹ kekuasaan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan, dan kadang-kadang militer. Pakistan Timur menyadari jika salah satu dari mereka, seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, atau Husain Shaheed Suhrawardy, tidak terpilih sebagai ketua Menteri Pakistan, dengan cepat mereka akan dijatuhkan oleh Pakistan Barat. Kediktatoran militer Ayub Khan (27 Oktober 1958 - 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969 - 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat, hanya meningkatkan perasaan seperti itu.

Keadaan demikian mendorong tampilnya seorang pemimpin dari partai Liga Awami yang mempunyai kesempatan baik untuk memenangkan pemilihan umum pada tahun 1970 M, namun kemenangan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena dengan kemenangan tersebut Partai Liga Awami menuntut kemerdekaan Pakistan Timur.¹⁵⁰

3. Faktor Ketidakseimbangan Militer

Faktor penempatan militer yang tidak seimbang antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat disebabkan hanya divisi infanteri di Pakistan Timur. Selain itu juga ketidakadilan pembagian biaya dalam pengembangan militer untuk Perang India-

¹⁴⁹Liaquat Ali Khan lahir di wilayah Karnal pada 1 Oktober 1895. Ia dikenal sebagai politikus Pakistan yang diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Pakistan, mendampingi Muhammad Ali Jinnah yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Lihat Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 157.

¹⁵⁰Yahwa, Ki, *Sejarah Berdirinya Bangladesh*, diakses pada 19 Mei 2015 dari <http://yahwa-ki.blogspot.co.id/2012/09/sejarah-berdirinya-bangladesh.html>.

Pakistan pada tahun 1965 M, hal ini menjadi pemicu pecahnya Pakistan.¹⁵¹ Pada tahun 1971 M dalam peristiwa perang pembebasan Bangladesh, Mujibur Rahman menyatakan bahwa angkatan bersenjata hanya sebagai alat keamanan negara.¹⁵²

4. Faktor Bahasa

Penggunaan bahasa “Urdu” sebagai bahasa nasional. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh Pakistan Barat, sedangkan Pakistan Timur menggunakan bahasa Bengali. Di India, Bahasa Bengali dituturkan di negara bagian Bengala Barat, Assam, Tripura hingga Manipur, di samping penutur yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Bahasa Bengali dibagi menjadi dua dialek sosial yakni, yang disebut sebagai *Shadhu Bahasa* (yakni bahasa standar) yang didasarkan pada dialek kota Kolkata, sedangkan *Cholit Bahasa* adalah bahasa non-standar yang tergantung pada wilayah tutur Bahasa itu sendiri.

Di Bangladesh, bahasa Bengali didasarkan pada dialek yang dipakai di kota Dhaka. Istilah *Bengali* adalah istilah Inggris untuk menjabarkan bahasa dan masyarakat wilayah Bengala. Berasal dari kata *Vanga* yang kemudian berubah menjadi *Bangalaah* oleh lidah Persia, kemudian menjadi *Bengali* (dalam lafal setempat diucapkan sebagai *Benggoli*). Kata *Bangla* pun kini diterima sebagai istilah baku, sedangkan masyarakat setempat menyebut wilayahnya dengan istilah *Bongo*. Kini tanah Bengali terbagi menjadi dua wilayah, yakni *Poschim Bongo* (Bengal

¹⁵¹Rapid, *Syeikh Mujibur Rachman dan Bangladesh*, Skripsi (Padang: IAIN Imam Bonjol 2013), h. 1.

¹⁵²Artikel diakses pada 19 Mei 2015 dari <http://yahwa-ki.blogspot.co.id/2012/09/sejarah-berdirinya-bangladesh.html>.

Barat) dan *Purbo Bongo* (Bangladesh).¹⁵³ Sementara bahasa Inggris dipergunakan secara luas dalam pemerintahan, dunia usaha dan pendidikan tinggi.¹⁵⁴

5. Faktor Ekonomi

Pada wilayah Pakistan Barat tidak mungkin dapat mencukupi makanan untuk kebutuhan hidupnya, karena sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Namun di Peshawar dan Mardam (dua distrik yang subur di provinsi Pakistan Barat) terdapat berbagai bahan mentah untuk industri dan kemungkinan memperoleh tenaga listrik yang murah. Di Peshawar terdapat sebuah pabrik gula dan di Mardam pada tahun 1950 M, di harap akan menghasilkan 50,000 ton gula dalam 1 tahun sehingga diperkirakan North West Frontien Province akan memenuhi sebagian besar dari kekurangan-kekurangan gula di Pakistan Barat. Pada tahap selanjutnya, pembuatan pabrik pakaian-pakaian tenun, kulit, kayu dan sebagainya, sehingga penduduk di Pakistan Barat dalam segi ekonomi telah banyak yang tercukupi dari industri-industri yang ada. Namun lain halnya dengan Pakistan Timur, karena terpisah ribuan mil dari Pakistan Barat, penduduk terlalu banyak dan tidak mempunyai industri sendiri. Perdagangan dan perhubungan-perhubungannya di pusatkan di Calcutta (India), yaitu sebuah pelabuhan besar di India.¹⁵⁵

¹⁵³Bahasa Bengali adalah anak cabang dari Bahasa Indo-Arya. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia, dengan penutur lebih dari 200 juta jiwa yang masing-masing berada di Bangladesh (sekitar 120 juta), India (± 70 juta). Diakses pada 19 Mei 2015 dari <https://younghendra.wordpress.com/2009/11/13/profil-negara-bangladesh>.

¹⁵⁴Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, h. 188.

¹⁵⁵Rapid, *Syeikh Mujibur Rachman dan Bangladesh*, h 2-3.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis terhadap data yang ditemukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bangladesh berdiri pada tahun 1971 M setelah melepaskan diri dari Pakistan. Dalam beberapa hal, pendirian ini didorong oleh realitas bahwa saat Bangladesh masih menjadi salah satu provinsi dari Pakistan, di wilayah Pakistan Timur terdapat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi. Secara umum, wilayah Pakistan Timur lebih banyak tertinggal dibandingkan dengan Pakistan Barat. Pendirian negara Bangladesh pun didorong oleh realitas bahwa partisipasi politik masyarakat Bengal selama bergabung dengan Pakistan, dalam pemerintahan jarang sekali, karena elit pemerintahan didominasi elit-Punjab. Bangladesh berdiri sebagai negara merdeka tidak bisa terlepas dari dukungan India saat terjadi konflik Pakistan dan India. India merasa keberatan atas penetapan Pakistan yang tumbuh dan berkembang sebagai negara Islam, serta munculnya pengistimewaan terhadap kelompok keagamaan tertentu, sedangkan di Bengal terdapat minoritas Hindu. Dengan keadaan ini, masyarakat Bengal merasa terdorong untuk memisahkan diri dari Pakistan. Selanjutnya, mereka mendirikan negara sendiri yang bernama Bangladesh yang mengedepankan identitas nasional masyarakat Bangladesh.

Lahirnya negara Bangladesh pun didukung oleh berbagai macam faktor yang dapat dipilih menjadi penyebab tidak langsung dan langsung. Penyebab tidak langsung adalah campuran dari rasa ketidakpuasan dan kekecewaan orang-orang

Bengali terhadap dominasi orang-orang Pakistan Barat dalam bidang politik, administrasi/pemerintahan, ekonomi dan bahkan sosial-budaya. Sedangkan penyebab langsungnya adalah pada Pemilihan Umum 1970 M yang jelas dimenangkan oleh Partai Liga Awami atas pimpinan Mujibur Rahman, akan tetapi kemenangannya tidak diakui. Proses ini dipercepat dengan turut campurnya tentara India dalam perang sipil yang membantu kaum nasionalis Bengali melawan tentara Pakistan pada akhir tahun 1971 M. Sebagai hasilnya, tentara Pakistan kalah dan kemerdekaan Bangladesh menjadi sesuatu yang riil/nyata.

Sejarah terbentuknya negara Bangladesh tidak terlepas dari peran Mujibur Rahman. Peran Mujibur Rahman adalah sebagai berikut:

- I. Mujibur Rahman sebagai pemimpin Mahasiswa Misionaris di Gopalganj.
- II. Mujibur Rahman sebagai anggota dewan dan kemudian menjadi Sekertaris Jenderal di Liga Muslim.
- III. Mujibur Rahman sebagai anggota dewan Legislatif dan kemudian menjadi Sekertaris Jenderal Partai di Liga Awami.
- IV. Mujibur Rahman sebagai Presiden Bangladesh pada tahun 1971-1975 M.

Mujibur Rahman lahir pada 17 Maret 1920 M di desa Tugipara (Kabupaten Gopalganj) dan meninggal pada 15 Agustus 1975 M di Dhaka. Riwayat pendidikannya adalah, Sekolah Dasar di Gimadanga (lulus 1932 M), Sekolah Menengah Pertama di Gimadanga (lulus 1935 M), Sekolah Menengah Atas di Gopalganj (lulus 1938 M) dan lulus kuliah dari Fakultas Humaniora di Universitas Calcutta Islamia College (1940-1949 M).

B. Saran

Sesuai dengan penelitian mengenai Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan terbentuknya negara Bangladesh, penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada kalangan akademis memiliki kesadaran untuk mempelajari Sejarah Asia Selatan, khususnya di kawasan India, Pakistan dan Bangladesh. Diketahui bahwa, negara Bangladesh merupakan bagian dari Pakistan karena Pakistan itu terbagi menjadi dua yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur.
2. Diharapkan kepada semua warga negara khususnya negara Indonesia untuk memahami negara Bangladesh. Hal itu dikarenakan bahwa sejarah terbentuknya negara Bangladesh dimulai dengan permasalahan politik Islam, dimana Mujibur Rahman yang menjadi peran utama. Selain itu, lahirnya negara Bangladesh didukung oleh berbagai faktor diantaranya adalah dalam bidang geografi, politik, ketidakseimbangan militer, bahasa dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2001.
- Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Serba Jaya, 2010.
- A'la, Abdullah. *Islam sebagai Faith in Action: Menguak Liberalisme Teologi Fazlur Rahman dalam Akademika Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVI No. II. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005.
- Amundsen, Rounaq Jahan Inge. *The Parliament of Bangladesh Representation and Accountability*. Bangladesh: Centre for Policy Dialogue, 2012.
- Anwar, Desi. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2003.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo Lestari, 1998.
- David, Loshak. *Pakistan Crisis*. London: Heineman, 1971.
- Esposito, John L dan John J. Donohoque. *Islam dan Pembaharuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Fautanu, Idzam. *Konsep Negara Islam Muhammad Assad: Studi Atas Pemikiran dan Kontribusinya Terhadap Pakistan*.
- Haider, Jalaluddin. *Bangladesh's Wuest For Closure: can the Execution of Mujib's Assassins Finally Deliver the Country from it's Darkest Chapter*. Drik: Majority World, 2010.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*. Jilid III. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasan, M. *Zulfikar Ali Bhutto: Semua Kekuatan untuk Dokumentasi Rakyat dan Sosialisme ke Orang-orang (di Inggris), The Mirage Power, Oxfold University*. Inggris: The Oxford University Pers, 2000.

_____, *The Mirage of Power*. United Kingdom: Oxford University Press, 2000.

Ikhsan, Nur Dwi Chandra. *Sejarah Terbentuknya Negara Islam Pakistan (1857-1947 M) Skripsi*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, 2014.

Jalal, Muhammad M. Rahman. *The Sheikh Mujib Declaration of Independence of Bangladesh: U.S. Government Records and Media Documentation*. Los Angeles: Latimes, 1971.

Kadira, Muhammad Nurula. *Independence of Bangladesh in 266 Days: History and Documentary Evidence*. Dhaka: Mukto Publishers, 2004.

Kettani, M. Ali. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

K. Sanjay Bhardwaj. *Contesting Identities in Bangladesh: A Study of Secular and Religious Frontiers*. London: Asia Research Center, 2010.

Majid, Saleh Muhammad & Abdurahman Hamid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Maududi, Abul A'la. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1998.

Md. Sayedur Rahman, dkk. *Evaluation of Charismatic Leader of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*. Bangladesh: Universitas Begum Rokeya Rangpur, 2014.

Mu'min, Mustafa. *Qasama al A'amam al-Islami al-Ma'ashir*. Beirut: Dar-al-Fiqh, 1974.

Musidi, B. *India Sejarah Ringkas: Dari Prasejarah sampai Terbentuknya Bangladesh*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012.

, B. *Dari Era Ayub Khan sampai Era Bhutto*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012.

Rahayu, Tri Ningsih. *Pengaruh Ajaran Mahatma Gandhi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011.

Rapid. *Syeikh Mujibur Rachman dan Bangladesh*. Padang: IAIN Imam Bonjol, 2013.

- Retnoningsih, Ana & Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.
- Rochmat, Saefur. *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Setiadi, Elly M. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, dan Pemecahan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sjamsudin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Surajiyo. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Susmihara. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Suwarno. *Dinamika Sejarah Asia Selatan*. Yogyakarta: Ombak. 2012.
- Thohir Ajid & Kusdiana Ading. *Islam di Asia Selatan, Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam di India, Pakistan dan Bangladesh*. Bandung: Humaniora. 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Wirawan, I. B. *Teori-Teori Sosial: Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

SUMBER INTERNET

- Esselborn, Priya. *Rusia Ingin Pertahankan Hubungan dengan India*. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 dari <http://www.dw.com/id/rusia-ingin-pertahankan-hubungan-dengan-india/a-16472122>.
- Ghaffar, Abdul Choudhury. *BangMata Sheikh Fazilatunnesa Mujib*. Diakses pada tanggal 7 November 2015 dari <http://mukthirgaan.blogspot.co.id/2011/10/bangmata-sheikh-fazilatunnesa-mujib.html>.
- Hasina, Sheikh Wajed. *Sheikh Mujibur Rahman*. Diakses pada tanggal 8 November 2015 dari <http://www.SheikhMujiburRahman.com> (Bangabandhu) part 1 - early life of 'khoka', socially-driven teenager, inspired by Suhrawardy, family - biography of Muslim and Bengali.htm.
- Hendra. *Profil Negara Bangladesh*. Diakses pada tanggal 19 Mei 2015 dari <https://youkhendra.wordpress.com/2009/11/13/profil-negara-bangladesh>.
- Ki, Yahwa. *Sejarah Berdirinya Bangladesh*. Diakses pada tanggal 19 Mei 2015 dari <http://yahwa-ki.blogspot.co.id/2012/09/sejarah-berdirinya-bangladesh.html>.
- Paul, Jean Sartre. *Perang Plassey Meletus*. Diakses pada tanggal 2 November 2015 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Plassey.
- Sobaryanto. *Sejarah Bangladesh dan Sejarah Benggala*. Diakses pada tanggal 25 Mei 2015 dari <http://www.kaskus.co.id/sejarah-bangladesh-dan-sejarah-benggala>.
- Wikipedia. *Sheikh Mujibur Rahman*. Diakses pada tanggal 28 Mei 2015 dari http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Mujibur_Rahman.html.
- Wikipedia. *Sheikh Hasina Wajed*. Diakses pada tanggal 7 November 2015 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Hasina_Wajed.
- Wikipedia. *Assassination of Sheikh Mujibur Rahman*. Diakses pada tanggal 28 Mei 2015 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Sheikh_Mujibur_Rahman.

- Wikipedia. *Huseyn Shaheed Suhrawardy*. Diakses pada tanggal 8 September 2015 dari <http://Huseyn Shaheed Suhrawardy - Wikipedia, the free encyclopedia.htm>.
- Wikipedia. *Bangabandhu Sheikh Mujib*. Diakses pada tanggal 28 Mei 2015 dari <https://www.albd.org/index.php/en/party/bangabandhu-sheikh-mujib/lifesketch>.
- Wikipedia. *Father of The Ntion*. Diakses pada tanggal 28 Mei 2015 dari <http://www.bhclondon.org.uk/Father of the Nation.html>.
- Wikipedia. *Viceroy*. Diakses pada tanggal 2 November 2015 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Viceroy>.
- Wikipedia. *Council Muslim League*. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Council_Muslim_League.
- Wikipedia. *Pakistan People's Party*. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan_Peoples_Party.
- Wikipedia. *Hartal*. Diakses pada tanggal 2 November 2015 dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Hartal>.
- Wikipedia. *Bongobondho Family*. Diakses pada 7 November 2015 dari http://www.bangobondhu.Org/index.php?option=com_homevideo&Itemid102&videofamily&chln2&me1arhive&arcworldarc_liberation_war1&gidslbg.
- Zakarias, Cecep El Bilad. *Perjalanan Politik Islam di Pakistan: Misteri di Balik Terbunuhnya Benazir Butho*. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 dari <https://zakariaselbilad.wordpress.com/2009/01/23/perjalanan-politik-islam-di-pakistan-misteri-di-balik-terbunuhnya-benazir-butho>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar: Bendera Negara Bangladesh
(Sumber: www.liberation war of Bangladesh 1971)



Peta Kawasan Anak Benua India
(Sumber: www.maps.com)



Peta Negara Bangladesh
(Sumber: www.maps.com)



Sheikh Mujibur Rahman, Presiden pertama Bangladesh (Pakistan Timur)
(Sumber: www.Father of the Nation.com)



DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY
OPERATIONAL INTELLIGENCE DIVISION

DI-2

DIA SPOT REPORT



WHITE HOUSE
SITUATION ROOM

MAR 26 PM 3:53

DATE: 26 March 1971

TIME: 1430 EST

SUBJECT: Civil War in Pakistan

REFERENCE:

1. Pakistan was thrust into civil war today when Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the east wing of the two-part country to be "the sovereign independent People's Republic of Bangla Dash." Fighting is reported heavy in Dacca and other eastern cities where the 10,000 man paramilitary East Pakistan Rifles has joined police and private citizens in conflict with an estimated 23,000 West Pakistani regular army troops. Continuing reinforcements by sea and air combined with the government's stringent martial law regulations illustrate Islamabad's commitment to preserve the union by force. Because of logistical difficulties, the attempt will probably fail, but not before heavy loss of life results.
2. Indian officials have indicated that they would not be drawn into a Pakistani civil war, even if the east should ask for help. Their intentions might be overruled, however, if the fever of Bengali nationalism spills across the border.
3. Sheikh Mujibur Rahman is little interested in foreign affairs and would cooperate with the United States if he could. The west's violent suppression, however, threatens to radicalize the east to the detriment of US interests. The crisis has exhibited anti-American facets from the beginning and both sides will find the United States a convenient scapegoat.

DISTRIBUTION:

WHITE HOUSE SIT ROOM (LDX)
DEPT OF STATE RCI (LDX)
DIR OF CIA OPNS CEN (LDX)
SEC DEF
DEF SEC DEF
ASST SEC DEF, ISA
ASST SEC DEF, PA
ASST SEC DEF, ADMIN
CHAIRMAN, JCS (CAPT TRAIN)
CHAIRMAN, JCS (MR. KEARNEY)
ASST TO CHAIRMAN, JCS
DIR, JOINT STAFF
DIR, J-3
DIR, J-5
JCS (ACSAN) RM 10923

RELEASED BY: JOHN J. PAVELLE, JRL
Captain, USN
DI-4/71564

PREPARED BY: JOHN B. BUNT
Major, USA
DI-4A3/25009

DECLASSIFIED
E.O. 12958, Sect. 3.6

MMR JALAL

CONFIDENTIAL NO FOREIGN DISSEM

By: [Signature] NARA, Date: 7-19-80



CONFIDENTIAL
 Classification
 31 MAR 71 11 55
 Department of State
TELEGRAM

053712

6473

INDICATE:
 COLLECT
 CHARGE TO

DISTRIBUTION

ACTION: AmEmbassy COLOMBO
 AmEmbassy KABUL
 AmEmbassy KATHMANDU
 AmEmbassy RANGOON
 AmEmbassy BANGKOK
 AmEmbassy TEHRAN
 AmEmbassy ROME
 AmEmbassy MANILA
 USINT KHARTOUM

STATE

1. Following message summarizes recent developments in East Pakistan:
 The situation in East Pakistan deteriorated sharply the night of March 25-26 after President Yahya broke off negotiations with Mujibur Rahman and flew back to ~~Yixixixixix~~ Islamabad. A series of stringent martial law regulations were promulgated in East Pakistan, including a ban on all political activities and the imposition of a 24-hour curfew, and troops moved rapidly and ruthlessly, including the use of tanks, to take control of Dacca. In a nationwide broadcast on March 26, Yahya branded Mujib a traitor, prohibited political activity in both wings and proscribed the Awami League.

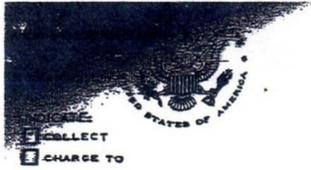
2. Meanwhile those Awami League leaders who were able to escape went underground and a clandestine radio began to broadcast resistance messages. One of the first of these was a declaration of the QUOTE sovereign and independent People's Republic of Bangla Desh UNQUOTE,

53712

9

DRAFTED BY: <i>WFS</i> NEA: HESchaffer	DRAFTING DATE: 3/31/71	TEL. EXT.: 23172	APPROVED BY: <i>WFS</i> PAF - William F. Spengler
---	------------------------	------------------	--

CLEARANCES: S/S-O: Sean Holly



CONFIDENTIAL
Classification

Department of State
TELEGRAM

DISTRIBUTION

ACTION: Page 2

made in the name of Mujib. The Martial Law Administration, however claims to have arrested Mujib and his leading lieutenants the night of March 25-26, and their failure to surface publicly thus far lends credence to this claim. On March 27 the clandestine radio announced the formation of a revolutionary army and a provisional government under the leadership of a QUOTE Major Zia Khan UNQUOTE.

4. There continue to be conflicting reports on the actual situation in East Pakistan although the city of Dacca remains relatively quiet. With strict press censorship and the expulsion of foreign newsmen from East Pakistan hard news is difficult to come by. Eyewitness reports of the killing by the Pak Army of large numbers of Bengali students, intellectuals, police, Awami League leaders, slum dwellers and members of the Hindu minority continue to trickle in. They have already/given prominence in the American press. Further reports may be expected as foreigners leave East Pakistan.

4. Claims regarding the situation by put forward by martial law and Bengali sources differ widely, although even Radio Pakistan has now reported that QUOTE miscreants UNQUOTE have been active in Chittagong

DRAFTED BY: MMR JALAL DRAFTING DATE: TEL. EXT.: APPROVED BY:

CLEARANCES:



INDICATE:
 COLLECT
 CHARGE TO

CONFIDENTIAL
 Classification
Department of State
TELEGRAM

DISTRIBUTION	ACTION: Page 3
	<p>and Khulna. A Japanese wire service reported that Chittagong was the scene of civilian-military XXXXXX QUOTE conflagrations UNQUOTE Monday night, citing radio contact with Japanese ships anchored in the harbor as its source. Indian wire services continue to report widespread fighting in many places, as well as the arrival of aircraft and tanks from the West wing.</p> <p>4. Europeans, mostly dependents of Yugoslav technicians evacuated from Dacca March 31, have said that the Pakistani Army appears to be firmly in control of the city and that some shops were opening. A Yugoslav foreign office official accompanying the group said the situation in Dacca has improved but is not yet normal. He also reports the Yugoslav Consul General has been unable to establish telephone contact with technicians in the ports of Chittigong and XXXXXX Chalna.</p> <p style="text-align: center;">END</p> <p style="text-align: right;">ROGERS</p>
DRAFTED BY: MMR JALAL	DRAFTING DATE: _____ TEL. EXT.: _____ APPROVED BY: _____
LEARANCES: _____	

EXTENSIONS OF REMARKS

July 28, 1971

27783

PROCLAMATION OF INDEPENDENCE OF BANGLA DESH

HON. SEYMOUR HALPERN

OF NEW YORK

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

Tuesday, July 27, 1971

Mr. HALPERN. Mr. Speaker, as you know from my previous statements and from the resolutions and statutes I have introduced, I continue to be much concerned with the refugee problem of the Bengali people in the area known as East Pakistan.

My primary concern is the famine and cholera problem facing these refugees and the express desire to prevent the shipment of American arms to Pakistan.

I would like to call your attention to certain political activities which are taking place in that area. While I do not recommend that any action be taken at this time, I think it well for us to be apprised of the fact that East Pakistan has declared its independence as the new nation of Bangla Desh, Pakistan, as an entity, had 130 million. In West Pakistan there are 55 million. The Bengali in what was East Pakistan numbered 75 million. If the new nation of Bangla Desh—translated, this means "Bengali homeland"—becomes independent now, it will be the eighth largest nation in the world. Only China, India, the Soviet Union, the United States, Indonesia, Japan, and Brazil have more people.

Prof. Albert P. Blaustein, professor of law at Rutgers University, has procured from the Bangla Desh Consulate in Calcutta a copy of the Bangla Desh Declaration of Independence proclaimed on April 10, 1971. The text of that declaration is as follows:

PROCLAMATION OF INDEPENDENCE OF BANGLA DESH, APRIL 10, 1971

Whereas free elections were held in Bangla Desh from December 7, 1970 to January 17, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution and

Whereas at these elections the people of Bangla Desh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League, and

Whereas Gen. Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd of March, 1971, for the purpose of framing a Constitution, and

Whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for an indefinite period, and

Whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangla Desh Pakistan authorities started an unjust and treacherous war, and

Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct, Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 millions of people of Bangla Desh, in due fulfillment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangla Desh duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and

27784

urged the people of Bangla Desh to defend the honour and integrity of Bangla Desh, and Whereas in the conduct of a ruthless and savage war, the Pakistani authorities committed and are still committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others, on the civilian and unarmed people of Bangla Desh, and

Whereas the Pakistan Government by carrying on an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangla Desh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government, and

Whereas the people of Bangla Desh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangla Desh,

We the elected representatives of the people of Bangla Desh, as honour-bound by the mandate given to us by the people of Bangla Desh whose will is supreme, on this day of April 10, 1971, duly constitute ourselves into a Constituent Assembly, and

In order to ensure for the people of Bangla Desh equality, human dignity and social justice,

do hereby declare and constitute Bangla Desh to be an Sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

We hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and

that the President shall be the Supreme Commander of all the armed forces of the Republic, and

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon,

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary, shall have the power to levy taxes and expend moneys,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangla Desh an orderly and just Government,

We the elected representatives of the People of Bangla Desh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties, and responsibilities herein conferred on the President,

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations devolved upon us as a member of the family of nations and by the Charter of the United Nations,

We further resolve that this proclamation of Independence shall be deemed to have come into effect since 26th day of March 1971,

To give effect to this our resolution, we further authorize and appoint Prof. M. Yusuf Ali, our duly constituted Potentiate to give to the President and Vice-President oaths of office.

MMR JALITZ

New York Times

LATE CITY EDITION

Weather: Mostly sunny, cold today; clear tonight. Fair, mild tomorrow. Temp. range: today 32-42; Friday 30-36. Full U.S. report on Page 36.

NEW YORK, SATURDAY, MARCH 27, 1971

MMRJALAL

15 CENTS



BEFORE OUTBURST: Sheik Mujibur Rahman on March 7 in Dacca. Flag is that of rebellious group he leads.

PAKISTAN'S PRESIDENT, Agha Mohammad Yahya Khan, at a news session in his Islamabad home some time ago.

LEADER OF REBELS IN EAST PAKISTAN REPORTED SEIZED

Sheik Mujib Arrested After a Broadcast Proclaiming Region's Independence

DACCA CURFEW EASED

Troops Said to Be Gaining in Fighting in Cities — Heavy Losses Seen

NEW DELHI, Saturday, March 27—The Pakistan radio announced today that Sheik Mujibur Rahman, the 51-year-old leader of East Pakistan, had been arrested only hours after he had proclaimed his region independent and after open rebellion was reported in several cities in the East.

The radio, quoting what it described as an official statement made in Dacca, said that Sheik Mujib was arrested early this morning at his home in Dacca.

The 51-year-old leader of the Awami League, the dominant party in the East, was arrested as the West Pakistan-dominated army sought to reassert control in the East.

Reports reaching neighboring India indicated the army was gaining the upper hand in the battle that erupted yesterday between the army and East Pakistani citizens and militiamen.

Curfew Reported Lifted

The Pakistan radio reported that a 24-hour curfew imposed in Dacca yesterday was lifted for an nine-hour period this morning, indicating that the army was in control of the city.

United News of India said in a dispatch from the Indian border town of Agartala that the army had occupied the headquarters of the East Pakistani Rifles, the provincial militia, in Comilla district, after a prolonged fight.

The army was also reported to have occupied police stations in East Pakistan's Comilla and Noakhali districts. The agency said there were heavy casualties on both sides.

MNR JALAL

Armed Rebellion Reported

NEW DELHI, Saturday, March 27 — Open rebellion broke out in East Pakistan yesterday, with fighting reported in several cities, and a radio station broadcast a proclamation of an independent people's republic.

The proclamation was attributed to Sheikh Mujibur Rahman, the East Pakistani nationalist leader, whose Awami League has been campaigning for autonomy for the eastern wing of Pakistan. He and his chief aides were reportedly driven underground by martial-law authorities sent from West Pakistan, about 1,000 miles away on the other side of India.

Most sources of communication with East Pakistan were broken off, and reports of the uprising came mainly from

Continued on Page 3, Column 1



BEFORE TALKS WERE BROKEN OFF: Pakistani soldiers facing demonstrators in Dacca on Tuesday outside the residence of President Agha Mohammad Yahya Khan. He was with Sheikh Mujibur Rahman in East Pakistan.

Leader of Rebels in East Pakistan Is Reported Seized

Continued From Page 1 in Col. 5

Indian news dispatches quoting what they described as authoritative sources in the area, President Agha Mohammad Yahya Khan, who flew back to West Pakistan late Thursday after the failure of his 11 days of negotiations with Sheikh Mujib, said in a broadcast: "I have ordered the armed forces to do their job and fully

restore the authority of the Government." Accusing Sheikh Mujib of treason, the President outlawed the Awami League, East Pakistan's dominant political party, which in three weeks of strikes and other protest action had become the regional government. The protest had been against President Yahya Khan's decision to postpone the opening of the National Assembly,

which the Awami League dominated. The assembly was to have met March 3 to start drafting a constitution to return Pakistan to civilian rule.

The present rebellion erupted when the Pakistani Army moved to reimpose the authority of the military Government, based in West Pakistan, on the East. Indian news dispatches said the fighting was between troops from West Pakistan on one side and East Pakistani policemen and a paramilitary organization known as the East Pakistani Rifles on the other.

The Press Trust of India, this country's main news agency, reported that fighting was raging at Chittagong, Comilla and Rangpur, as well as at Dacca. It said that at least 10,000 soldiers from West Pakistan had been transported to the East, raising the total there to about 70,000.

Reports of fighting also came from what one Indian dispatch described as a clandestine radio station, presumably in the northern part of East Pakistan. This, it said, was the same station that announced the proclamation of an independent nation, Bangla Desh, whose name is Bengali for the Bengal Nation.

The broadcast said that those battling for East Pakistani independence had surrounded West Pakistani troops in the cities of Sylhet, Jessore, Barisal and Khulna as well as in Chittagong and Comilla.

"Sheikh Mujibur Rahman is the only leader of the people of independent Bangla Desh and his commands should be obeyed by all sections of people to save the country from the ruthless dictatorship of West Pakistan," the broadcast said. It reiterated the Awami League's decision to organize a strike throughout the eastern wing today to protest army attacks in the last few days that reportedly had resulted in the death of more than 100 civilians.

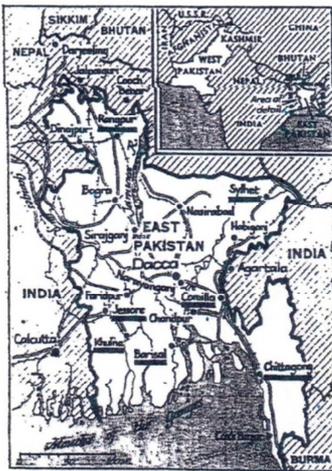
Curfew Is Announced

The first confirmation that the Government in West Pakistan had reasserted control of the East came early yesterday when the Dacca radio went off the air briefly and the army authorities came on to announce a 24-hour curfew in Dacca and seven other districts in East Pakistan. The radio station had been under the control of the Awami League, which had seized it during the constitutional crisis.

Yesterday's developments followed an announcement Thursday night of "a serious deadlock" in the talks between President Yahya Khan, Sheikh Mujib and Zulfikar Ali Bhutto, chairman of the dominant political party of West Pakistan, the Pakistan People's party.

President Yahya postponed the March 3 meeting of the National Assembly when Mr. Bhutto said his party, holding only a minority of the seats, would not attend. Opposing Sheikh Mujib's demands for autonomy, Mr. Bhutto favored what he described as an effective central government.

Soon after the breakdown Thursday of the President's talks with Sheikh Mujib, the martial-law administrator for East Pakistan, Lieut. Gen. Tikka Khan, began issuing a series of stringent orders to assert army control. The army seized the Intercontinental Hotel in Dacca and confined scores of foreign newsmen to the building, prohibiting news dispatches, reports said.



The New York Times, March 27, 1971. Underlining indicates cities where fighting was reported.

What's News—

MMR JALAL

Business and Finance

BIG BOARD RULE CHANGES were proposed to the SEC to allow "outside" capital contributors to invest in more than one brokerage-house member of the exchange. One potential beneficiary of such a change would be the group headed by Texas businessman H. Ross Perot. The group, about to assume control of F. I. duPont, Gloré Forgan, is considering a big investment in Walston & Co.

(Story on Page 3)

The New York Stock Exchange is reorganizing its controversial rules-enforcement unit. Robert M. Bishop, director of the department for six years, including the 1967-68 industry operational crisis, is being named exchange vice president, special projects. A successor is being sought.

(Story on Page 3)

Construction industry curbs are expected to be announced by President Nixon today. His executive order would establish wage and price stabilization machinery manned largely by Labor and management. Goal of the plan would be to restrict pay boosts to 6% a year, with price limits to be set.

(Story on Page 2)

Machine tool orders and shipments last month topped January but still lagged far behind a year earlier. Some producers expect the gradual uptrend to continue, but they don't see any dramatic increase in business.

(Story on Page 2)

A discount-rate cut from the current 4¾% is considered less likely at present than it was a week ago. The Federal Reserve's failure to act indicates to monetary observers that the board is expecting a general economic recovery to strengthen short-term interest rates soon and that the board is concerned about dollar outflows to foreigners because of low rates here.

(Story on Page 4)

Interest rates of 6% and 5¾% will

World-Wide

WEST PAKISTAN TOOK full control of Dacca, the East Pakistan capital.

Radio Pakistan claimed that "calm now prevails" throughout East Pakistan, but Sheikh Mujibur Rahman's followers insisted they were winning the civil war. The rebels said a provisional government had been established, and its forces were marching on Dacca. United News of India quoted one clandestine broadcast as saying Rahman was at the "revolutionary headquarters," but an AP reporter who left Dacca said reliable sources insisted Rahman and most of his major followers were in custody. Some 5,000 to 7,000 persons are believed to have died in the weekend fighting.

A martial law order formally banning Rahman's Awami League was issued, Radio Pakistan said. The league's bank accounts had been frozen and membership in the league was prohibited, it added.

TOTAL WITHDRAWAL from Indochina was urged by Senator Mansfield.

The time has come "for drastic action," Mansfield said on NBC's "Meet the Press." The Senate Democratic Leader said he favors a resolution calling for a complete U.S. pullout by the end of the year. He added that while he doesn't favor cutting off all U.S. funds under the same time limit, "I've been giving that a good deal of consideration." Senators Church (D., Idaho) and Cooper (R., Ky.) told UPI they were near agreement on a new amendment committing the nation to total withdrawal from Indochina and will introduce it later this year.

Sen. Fulbright (D., Ark.), who heads the Foreign Relations Committee, said he doesn't believe Congress can force the President to end the war. But, he added, it can prod the administration toward a negotiated settlement.

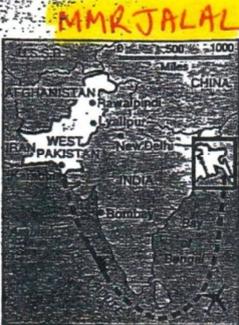
Heavy sappers partially overran a U.S. artillery base 50 miles south of Danang, killing 33 GIs and wounding 76. It was the heaviest casualty toll in a single ground action in more than two years. The sappers blasted their way through the base's defenses and ran around hurling dynamite bombs at the Americal Division defenders. Twelve sappers were killed, officials said. Earlier, U.S. bombers attacked major arteries of the Ho Chi Minh Trail in Laos in an attempt to prevent enemy forces and supplies from reaching the south.

The U.S. and Saigon refused to meet with the Communists this Thursday at the deadlocked Paris talks, and diplomatic sources said the move may have put continuance of the weekly sessions into question. Future sessions, they said, may be held on a less regular basis.

INTERNATIONAL

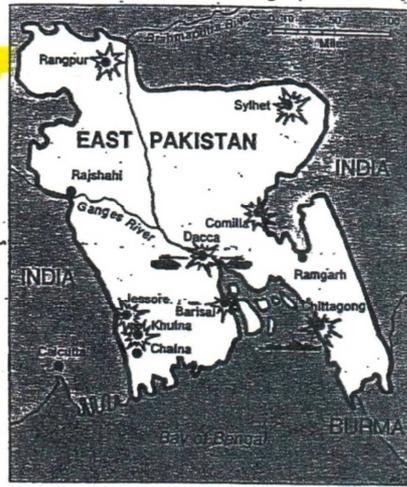


Yahya: New orders



MMRJALAL

War: As fighting erupted in East Pakistan, Mujib declared independence



Pakistan Plunges Into Civil War

The man and his party are enemies of Pakistan. This crime will not go unpunished. We will not allow some power-hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny of 120 million people.

—President Mohammed Yahya Khan

Come out of your houses with whatever weapons you have. Resist the enemy forces at any cost... until the last enemy soldier is conquered, and save the country from the ruthless dictatorship of West Pakistanis.

—Sheikh Mujibur Rahman

Until the very last moment, it looked as if the two proud men entrusted with Pakistan's destiny might still be able to avert a head-on clash. From the East Pakistani capital of Dacca came optimistic reports that President Mohammed Yahya Khan and Mujib—as the leader of secessionist-minded East Pakistan—were about to reach a compromise. But then, with stunning suddenness, the pieces of Pakistan's complicated political puzzle flew apart. In the East Pakistani cities of Rangpur and Chittagong, federal troops poured machine-gun fire into mobs of demonstrating Bengali nationalists. Swiftly, Yahya issued orders to his army to "crush the movement and restore the full authority of the government." In his turn, Mujib proclaimed East Pakistan the "sovereign, independent People's Republic of Bangladesh [Bengal nation]." And with that, Pakistan was plunged into civil war.

1 week, April 5, 1971

MMRJALAL

try in tenuous union snapped. Because Pakistan's central government immediately imposed strict censorship on communications in and out of East Pakistan, early reports were sketchy. Still, even the fragmentary dispatches from neighboring India provided a dismal picture of bloody fighting that pitted a modern, professional army against rebels who were often armed with little more than passion and pitchforks. Hopelessly outgunned, the East Pakistani guerrillas reportedly suffered thousands of casualties. But although by the end of the week it appeared that the federal army—largely composed of fierce Punjabis—had dealt its Bengali adversary a devastating blow, few people thought that the widely separated wings of Pakistan could ever be effectively reunited again.

What made the Pakistani upheaval so unexpected was that it occurred even as Yahya and Mujib were in the midst of private negotiations. On hearing the reports of "massacres" in Rangpur and Chittagong, an enraged Mujib accused the army of unleashing a reign of terror. Yahya's response was to quit the talks in a huff and leave Dacca unannounced to return to West Pakistan. Back in his home region, the President took to national radio to ban Mujib's Awami League, East Pakistan's dominant political organization. "Sheikh Mujib's action of starting his non-cooperation movement is an act of treason," the President declared.

Shortly after Yahya left Dacca, the army's tough martial-law administrator, Lt. Gen. Tikka Khan, slapped tight censorship over East Pakistan. All foreign correspondents were restricted to their hotels and then, after federal troops

seized their notes and film, the reporters were expelled from the country. Among the correspondents forced to leave was NEWSWEEK's Loreff Jenkins, who filed this report:

From our windows in Dacca's modern Intercontinental Hotel, we watched a jeopful of soldiers roll up to a shopping center and taking aim with a heavy machine gun, open fire on a crowd. While the firing was still going on, some fifteen young Bengalis appeared in the street about 200 yards away and shouted defiantly at the soldiers. The youths seemed to be empty-handed, but the soldiers turned the machine gun on them anyway. Then, the federal soldiers moved down an adjacent alley leading to the office of a pro-Mujib daily newspaper that had strongly denounced the army. The troops shouted in Urdu—a language which few Bengalis understand—warning anyone inside to surrender or be shot. No one emerged. So they blasted the building and set it afire. And when they emerged, they waved their hands in triumph and shouted "Pakistan Zindabad" ("Long Live Pakistan").

By late in the week, firing throughout the city was heavy and flashes of 105-mm. howitzers in the night preceded the heavy crump of incoming shells which seemed to be landing on the new campus of Dacca University. I woke up one morning to the sound of six Chinese-made T-54 light tanks clanging down Airport Road. A gray pall of smoke hung low over the muggy sky. Soon new artillery blasts were heard and new fires were seen in the region of Old Dacca, a warren of narrow, open-sewered streets.

MMRJALAL

Rebel Leader Arrested in Pakistan War

NEW DELHI, March 27 (Saturday) (AP)—Radio Pakistan announced today that Sheikh Mujibur Rahman was arrested only hours after he proclaimed independence



... sends troops

MMRJALAL

in the East Pakistan capital of Dhaka. Mujibur Rahman was taken into custody at a residence in the city at about 11 p.m. The 51-year-old Awami League leader was arrested by the West Pakistan-dominated army sought to reassert its control in the Eastern province.

Reports reaching neighboring India indicated the army was gaining the upper hand in the battle against East Pakistan citizens and militia men.

United News of India said in a dispatch from the border town of Agartala that the army had occupied the headquarters of the East Pakistani Rifles, the provincial militia, in Comilla district, after a prolonged fight.

The army also was reported to have occupied police stations in East Pakistan's Comilla and Noakhali districts. The agency said there were heavy casualties on both sides.

Pakistan: Toppling Over the Brink

WITH the awesome fury of a cyclone off the Bay of Bengal, civil war swept across East Pakistan last week. In city after crowded, dusty city the army turned its guns on mobs of rioting civilians. Casualties mounted into the thousands. Though the full toll remained uncertain because of censorship and disorganization in the world's most densely populated corner (1,400 people per sq. mi.), at week's end some estimates had 2,000 dead. Even if President Agha Mohammed Yahya Khan is prepared to accept casualties of a geometrically greater magnitude, the outcome is likely to be the final breakup of East and West Pakistan and the painful birth of a new nation named Bangla Desh (Bengal State).

The indistinct battle lines reflected the ethnic and cultural divisions that have beset Pakistan since its creation as a Moslem homeland when British India was partitioned in 1947. Two predominantly Moslem areas that used to be part of India became a new country, the two parts separated by 1,000 miles of Indian territory. Thus, though 80,000 West Pakistani soldiers were on hand to keep order in East Pakistan last week, their supply bases were 1,000 miles away and most food and ammunition had to be carried 3,000 miles around the coast of India. The troops

—mostly tall, fierce Punjabis and Pathans—were surrounded in East Pakistan by a hostile population of 78 million Bengalis. The civil war—and it could be called no less—promised to be long and bloody. The Bengalis, armed with a few looted guns, spears and often just bamboo staves, were ill-trained for a guerrilla war. But a resistance movement, once organized, might eventually force the West Pakistanis to depart. In a way, the struggle evoked haunting memories of the Nigerian civil war of 1967-70, when the federal regime sought justification in the name of national unity and the Biafrans in the name of self-determination.

First Shot. Until last week, Pakistan's political leaders seemed on the verge of settling their differences. Then, in rapid order, three events carried the nation over the brink of violence. In Chittagong, a mob surrounded West Pakistani troops unloading supply ships. Where the first shots came from is unclear, but when the troops opened fire, 35 Bengalis were killed. Their political leader, Sheik Mujibur Rahman, called a general strike to protest. Then, Yahya Khan outlawed Mujib and his Awami League Party as "enemies of Pakistan" and ordered the armed forces to "do their duty."

In Dacca, army tanks and truckloads of troops with fixed bayonets came clat-

tering out of their suburban base, shouting "Victory to Allah," and "Victory to Pakistan." TIME Correspondent David Coggin, who, along with other newsmen, was subsequently expelled from Pakistan, reported: "Before long, howitzer, tank artillery and rocket blasts rocked half a dozen scattered sections of Dacca. Tracers arced over the darkened city. The staccato chatter of automatic weapons was punctuated with grenade explosions, and tall columns of black smoke towered over the city. In the night came the occasional cry of 'Bangla [Victory to Bengal],' followed by a burst of machine-gun fire."

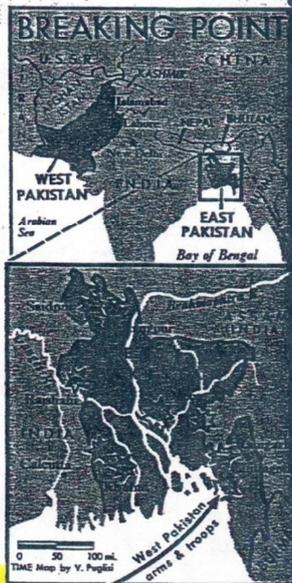
The army ordered a strict 24-hour curfew in Dacca, with violators shot on sight. But soon the Free Bengal Revolutionary Radio Center, probably somewhere in Chittagong, cracked into life. Over the clandestine station, Mujib proclaimed the creation of the "sovereign independent Bengali nation," and called on its people to "resist the enemy forces at all costs in every corner of Bangla Desh." The defiant words, however, lacked military substance. At 1:30 a.m. the following day, soldiers seized the sheik in his home. Meanwhile, scattered rioting broke out in West Pakistan, protesting the prospect of prolonged military rule.

The rupture in Pakistan stems



EAST PAKISTANIS DEMONSTRATE FOR INDEPENDENCE IN DACCAs
Divided by more than geography.

MMR JALAL



TIME, APRIL 5, 1971

SATURDAY MORNING, MARCH 27, 1971

MMR JALAL

Civil War Flares as East Pakistanis Claim Independence

BY WILLIAM J. COUGHLIN

Times Staff Writer

NEW DELHI — Sheikh Mujibur Rahman declared independence for East Pakistan Friday as the long smoldering feud between the two wings of the Islamic nation flamed into open civil war.

A clandestine radio broadcast monitored here from a station identifying itself as "The Voice of Independent Bangla Desh (Bengali homeland)," said, "The sheik has declared the 75 million people of East Pakistan as citizens of the sovereign independent Bangla Desh."

But the official Radio Pakistan announced today that Rahman was arrested only hours after he proclaimed East Pakistan independence.

The radio, quoting an official announcement made in the East Pakistani capital of Dacca, said Rahman was taken into custody at his Dacca residence.

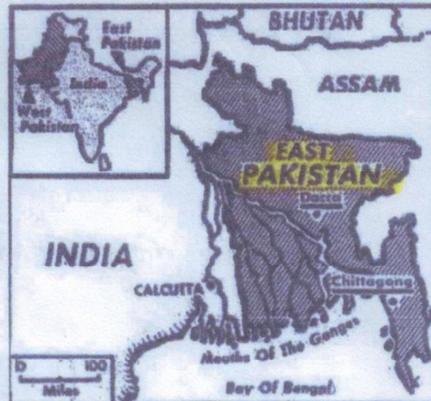
(Reuters news agency quoted the Press Trust of India today as reporting that at least 10,000 civilians were killed in bitter fighting throughout East Pakistan Friday as government troops used tanks, artillery and machine guns against Rahman's followers.)

Radio reports reaching here reported heavy fighting between West Pakistani troops and the East Pakis-

Please Turn to Page 3, Col. 3



AP Wirephoto



MMR JALAL

REVOLT—Sheik Mujibur Rahman, who proclaimed independence for East Pakistan as civil war broke out in the province. Map shows how East and West Pakistan are separated by 1,000 miles of India.

Pakistan Independence Move Brings Warfare

Continued from First Page
tani Rifles, loyal to Rahman.

In a broadcast from Karachi on Radio Pakistan, Pakistani President Agha Mohammad Yahya Khan charged Rahman and his Awami League with treason, outlawed the league and imposed martial law and press censorship.

"They have defied the lawful authority and have tried to run a parallel government," he said. "They have unleashed a reign of terror, a number of murders have been committed. Millions of Pakistanis who have settled down in East Pakistan are living in terror. Many have fled."

With censorship in effect, the outside world was dependent upon radio broadcasts and reports from travelers for information

on the situation inside East Pakistan which is separated from larger but less densely populated West Pakistan by 1,000 miles of Indian territory.

The declaration of independence, for instance, was read not by Rahman but in his name.

All India Radio and the news agency Press Trust of India quoted reports from the border saying there was heavy fighting in several principal towns, mainly the East Pakistani capital of Dacca. Numerous casualties were reported on both sides. P.T.I. also reported fighting in Chittagong, Comilla and Rangpur.

Radio Pakistan reported late Friday that the general situation in East Pakistan was under control.

However, it quoted Lt. Gen. Tikka Khan, adm-

nistrator of martial law in East Pakistan, as saying that unbridled political activities had assumed "alarming proportions beyond the normal control of the civil administration (and) the police . . ."

Friction and deep suspicion have plagued the two parts of Pakistan since the nation was founded with partition of India in 1947.

Rahman, whose power rests on his control of the Awami League, and other leaders consistently have demanded greater autonomy for their wing of the nation.

Behind the outbreak of civil war is long-smoldering discontent in East Pakistan over virtually colonial treatment by the federal government based in West Pakistan. It was this that led to the overthrow of President Mohammad Ayub Khan just two years ago and his replacement by a military government headed by Gen. Yahya Khan. Yahya Khan promised an early return to democratic government and

was taking steps in that direction when December's election gave Rahman a victory in East Pakistan that amounted to a virtual mandate for autonomy.

MMR JALAL

DAFTAR KONSULTASI BIMIBINGAN SKRIPSI

Nama : Pujiatun Patmasari
NIM : 11420023
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul Skripsi : Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan Terbentuknya Negara Bangladesh
Pembimbing I : Dr. Nor Huda, M.A

No	Tanggal	Permasalahan	Paraf

DAFTAR KONSULTASI BIMIBINGAN SKRIPSI

Nama : Pujiatun Patmasari
NIM : 11420023
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul Skripsi : Mujibur Rahman (1920-1975 M) dan Terbentuknya Negara Bangladesh
Pembimbing II : Otoman, S.S., M.Hum

No	Tanggal	Permasalahan	Paraf